

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj-IP)
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2019



MARET, 2020

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
RINGKASAN EKSEKUTIF		iv
BAB I PENDAHULUAN		I.1
I.1 Latar Belakang		I.1
I.2 Dasar Hukum		I.1
I.3 Gambaran Umum Kondisi Daerah		I.2
I.4 Organisasi		I.7
I.5 Permasalahan Pembangunan dan Isu-Isu Strategis Kabupaten		I.10
BAB II PERENCANAAN KINERJA		II.1
II.1 Visi dan Misi Pemerintah Kab. Lombok Tengah		II.1
II.2 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah		II.4
II.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah		II.8
II.4 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019		II.8
II.5 Metode Pengumpulan Data Kinerja		II.10
II.6 Prosedur Penyesuaian LKjIP		II.11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		III.1
III.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kab.Lombok Tengah Tahun 2019		III.1
III.1.1. Tujuan 1	Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup beragama	III.4
III.1.2. Sasaran 1	Terpeliharanya stabilitas sosial	III.9
III.1.3. Sasaran 2	Terpeliharanya kerukunan umat beragama	III.14
III.1.4. Tujuan 2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Dan kesejahteraan masyarakat	III.20
III.1.5. Sasaran 3	Meningkatnya kualitas pendidikan	III.42
III.1.6. Sasaran 4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	III.51
III.1.7. Sasaran 5	Meningkatnya perlindungan sosial dan kesempatan kerja	III.56
III.1.8. Tujuan 3	Meningkatnya nilai perdagangan, jasa unggulan dan investasi daerah	III.68

III.1.9. Sasaran 6	Meningkatnya nilai perdagangan, jasa unggulan Dan investasi daerah	III.76
III.1.10. Sasaran 7	Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor agraris Serta ketahanan pangan	III.82
III.1.11. Tujuan 4	Meningkatnya pemerataan pembangunan dan keterpaduan kawasan dan antar kawasan	III.91
III.1.12. Sasaran 8	Meningkatnya infrastruktur Dalam mendukung koneksitas wilayah	III.96
III.1.13. Sasaran 9	Terwujudnya tata ruang dan lingkungan hidup yang berkualitas	III.98
III.1.14. Sasaran 10	Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup beragama	III.103
III.1.15. Sasaran 11	Terwujudnya kawasan perdesaan maju dan mandiri	III.107
III.1.16. Tujuan 5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	III.112
III.1.17. Sasaran 12	Meningkatnya akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintahan daerah	III.115
III.1.18. Sasaran 13	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah	III.123
III.3. Analisis Efisiensi		III.128
III.4. Realisasi Anggaran Dan Akuntabilitas Keuangan		III.136
BAB IV PENUTUP		IV.1

LAMPIRAN

Daftar Lampiran:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lombok Tengah;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020;
3. Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 165.A Tahun 2016 Tentang Pengumpulan dan Pengolahan Data Kinerja
4. SOP penyusunan dokumen LKJIP.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2019. Oleh karena itu, laporan kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi, misi organisasi pada Tahun 2019. Selanjutnya, laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan bagi perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel dan profesional.

Akhirnya, laporan kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh komponen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Praya, Maret 2020
Bupati Lombok Tengah,

H. MOH. SUHAILI FT, SH

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. LKjIP Kabupaten Lombok Tengah memaparkan capaian dan analisis kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2019. Dokumen ini disusun oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan untuk mencapai visi misi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 adalah: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU”.

Dalam mencapai Visi Kabupaten Lombok Tengah, telah dijabarkan melalui 5 (lima) Misi yang pada tahun 2019 telah mencapai tingkat keberhasilan pada tiap-tiap misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerukunan, kedamaian dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan beragama melalui revolusi mental dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan kearifan lokal;

Misi I terdapat 1 tujuan dan 1 indikator tujuan. Capaian kinerja indikator tujuan adalah “sangat baik”. Dalam misi I juga terdapat 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja. Capaian kinerja indikator sasaran adalah 1 indikator “sangat baik” dan 1 indikator “baik”.

2. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kecerdasan dan kesehatan masyarakat dengan mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender

Misi II terdapat 1 tujuan dan 3 indikator tujuan. Capaian kinerja indikator tujuan adalah 1 “sangat baik” dan 2 “baik”. Dalam misi II juga terdapat 3 sasaran dengan 9 indikator kinerja. Capaian kinerja indikator sasaran adalah 1 indikator “sangat baik”, 6 indikator “baik” dan 2 indikator “sangat kurang”.

3. Mendorong kemajuan ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat melalui perkuatan struktur ekonomi masyarakat dengan dukungan stabilitas kamtibmas

Misi III terdapat 1 tujuan dan 2 indikator tujuan. Capaian kinerja indikator tujuan adalah 1 “sangat baik” dan 1 “sangat kurang”. Dalam misi III juga

terdapat 2 sasaran dengan 4 indikator kinerja. Capaian kinerja indikator sasaran adalah 1 indikator “sangat baik”, 1 indikator “baik”, 1 indikator “sedang” dan 1 indikator “sangat kurang”.

4. Menjaga keselarasan, keserasian dan keterpaduan pembangunan kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infra strukturyangmemadai

Misi IV terdapat 1 tujuan dan 1 indikator tujuan. Capaian kinerja indikator tujuan adalah “baik”. Dalam misi IV juga terdapat 4 sasaran dengan 6 indikator kinerja. Capaian kinerja indikator sasaran adalah 1 indikator “sangat baik”, 2 indikator “baik” dan 2 indikator “sangat kurang”.

5. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Misi V terdapat 1 tujuan dan 1 indikator tujuan. Capaian kinerja indikator tujuan adalah “baik”. Dalam misi V juga terdapat 2 sasaran dengan 3 indikator kinerja. Capaian kinerja indikator sasaran adalah 1 indikator “sangat baik”, 1 indikator “baik”, dan 1 indikator “sangat kurang”.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tujuan kumulatif Tahun 2019 adalah sebesar 95,08% dengan kriteria “baik”.

BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan LKJ-IP Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 ini dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. LKJ-IP juga disusun dengan tujuan menciptakan transparansi, meningkatkan partisipasi publik, serta mewujudkan perbaikan dan pembangunan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

I.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan LKj-IP Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 adalah sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala LAN No 239 / IX / 6/8/2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

I.3. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Lombok Tengah terletak diantara 116°05' - 116°24' Bujur Timur dan 8°24' - 8°57' Lintang Selatan, luas wilayah 1.208,39 km² (1.208.390 Ha), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Barat;
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia;
- Sebelah Barat : Kabupaten Lombok Barat;
- Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Timur.

Secara administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2019 terdiri 12 kecamatan, 127 desa dan 12 kelurahan dengan jumlah dusun 1.802 dusun dan 71 lingkungan seperti tertera pada tabel berikut ini.

Tabel I.1
Jumlah Desa, Kelurahan, Dusun dan Lingkungan menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 s.d 2019

Kecamatan	Desa				Kelurahan				Dusun				Lingkungan			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1. Praya Barat	10	10	10	10	-	-			134	138	140	145	-	-		
2. Praya Barat Daya	11	11	11	11	-	-			121	128	123	135	-	-		
3. P u j u t	16	16	16	16	-	-			262	269	281	279	-	-		
4. Praya Timur	10	10	10	10	-	-			183	181	181	187	-	-		
5. Janapria	12	12	12	12	-	-			217	203	203	229	-	-		
6. K o p a n g	11	11	11	11	-	-			116	120	115	121	-	-		
7. P r a y a	6	6	6	6	9	9	9	9	82	83	105	88	50	50	50	55
8. Praya Tengah	9	9	9	9	3	3	3	3	110	108	107	111	16	16	16	16
9. Jonggat	13	13	13	13	-	-			135	135	142	136	-	-		
10. Pringgarata	11	11	11	11	-	-			114	113	112	117	-	-		
11. Batukliang	10	10	10	10	-	-			144	140	145	156	-	-		
12. Batukliang Utara	8	8	8	8	-	-			91	82	90	98	-	-		
Jumlah/Total	127	127	127	127	12	12	12	12	1.709	1474	1744	1802	66	66	66	71

Sumber: Data Jumlah Dusun/ Lingkungan Kab. Lombok Tengah Tahun 2019 (DPMD Kab. Lombok Tengah)

Berdasarkan kondisi topografi, Kabupaten Lombok Tengah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah dengan karakteristik yang berbeda, yaitu:

- Bagian Utara

Wilayah ini meliputi Kecamatan Batukliang, Kecamatan Batukliang Utara, Kecamatan Kopang, Kecamatan Pringgarata dan sebagian wilayah Kecamatan Jonggat. Sebagian besar wilayah ini merupakan dataran tinggi karena merupakan bagian dari kaki Gunung Rinjani (3.726 m). Curah hujan di wilayah ini relatif tinggi sehingga sangat sesuai untuk pengembangan sektor pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan).

Wilayah ini juga merupakan kawasan hutan lindung Kabupaten Lombok Tengah serta sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata (wisata alam dan wisata budaya).

- Bagian Tengah

Wilayah ini meliputi Kecamatan Praya, Kecamatan Praya Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Janapria, sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat Daya, sebagian wilayah Kecamatan Praya Timur, dan sebagian wilayah Kecamatan Jonggat. Sebagian besar wilayah ini merupakan daerah dataran rendah. Potensi yang dimiliki antara lain adalah pertanian padi dan palawija, yang didukung oleh lahan persawahan yang luas dan sarana irigasi yang memadai.

- Bagian Selatan

Wilayah ini meliputi Kecamatan Pujut, sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat Daya, sebagian wilayah Kecamatan Praya Timur, serta sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat. Sebagian besar wilayah ini berupa daerah perbukitan dan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pertanian dan pengembangan pariwisata yang didukung oleh keberadaan Bandara Internasional Lombok.

2. Gambaran Umum Demografis

Kondisi demografis Kabupaten Lombok Tengah dalam laporan ini akan digambarkan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Tengah.

Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2019 adalah 1.043.759 jiwa yang terdiri dari 520.614 jiwa penduduk laki-laki dan 523.145 jiwa penduduk perempuan. Bila dibandingkan dengan luas wilayah seluas 1.208,39 km², maka tercatat kepadatan penduduk sebesar 863,76 jiwa/km².

Secara lebih rinci, jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah disampaikan sebagai berikut :

**Tabel I.2`
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan**

Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 s.d 2019

No	Kecamatan	Laki-laki				Perempuan				Jumlah			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Praya	59.150	60.839	63.238	63.000	59.165	61.032	63.843	63.502	118.315	121.871	127.081	126.502
2	Jonggat	48.047	48.620	53.795	53.649	47.928	48.484	54.129	53.815	95.975	97.104	107.924	107.464
3	Batukliang	39.489	41.737	44.040	44.646	39.622	41.723	43.886	44.299	79.111	83.460	87.926	88.945
4	Pujut	56.008	57.720	57.644	58.196	56.657	58.492	58.511	58.792	112.665	116.212	116.155	116.988
5	Praya Barat	42.042	41.691	40.419	41.093	42.854	42.403	41.054	41.423	84.896	84.094	81.473	82.516
6	Praya Timur	37.586	37.078	36.554	36.699	38.204	37.790	37.076	37.203	75.790	74.868	73.630	73.902
7	Janapria	43.621	43.413	42.516	42.497	43.721	43.708	42.396	42.298	87.342	87.121	84.912	84.795
8	Pringgarata	39.428	38.838	38.311	38.336	38.942	38.130	38.111	38.194	78.370	76.968	76.422	76.530
9	Kopang	48.016	47.211	46.230	46.239	48.823	47.942	46.728	46.696	96.839	95.153	92.958	92.935
10	Praya Tengah	37.867	37.017	36.723	36.965	38.262	37.272	36.972	37.025	76.129	74.289	73.695	73.990
11	Praya Barat Daya	29.094	28.771	28.513	28.704	29.751	29.372	29.102	29.184	58.845	58.143	57.615	57.888
12	Batukliang Utara	32.623	32.210	30.407	30.590	32.270	32.126	30.396	30.714	64.893	64.336	60.803	61.304
	Jumlah	512.971	515.145	518.390	520.614	516.199	518.474	522.204	523.145	1.029.170	1.033.619	1.040.594	1.043.759

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2019

Pada Tabel I.2 dapat dilihat bahwa penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Praya yakni sebanyak 1261.502 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Praya Barat Daya dengan jumlah penduduk sebanyak 57.888 jiwa. Kondisi demografi berupa kepadatan, sebaran serta komposisi penduduk merupakan salah satu aspek yang harus menjadi perhatian dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah.

**Tabel I.3`
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 s.d 2019**

No	Kecamatan	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Praya	33.551	39.258	39.302	39.224
2	Jonggat	28.787	32.073	34.677	35.078
3	Batukliang	22.923	27.489	28.209	28.574
4	Pujut	31.937	36.049	35.766	36.659
5	Praya Barat	24.713	26.693	25.308	26.043
6	Praya Timur	23.409	24.941	23.711	24.295
7	Janapria	26.935	29.399	27.515	27.677
8	Pringgarata	23.769	25.121	23.898	24.351

No	Kecamatan	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
9	Kopang	29.022	30.907	29.093	29.467
10	Praya Tengah	22.836	24.134	23.165	23.610
11	Praya Barat Daya	17.938	19.480	18.678	18.896
12	Batukliang Utara	19.652	21.083	19.168	19.623
Jumlah		305.472	336.627	328.490	333.497

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2019

Pada Tabel I.3 diketahui bahwa jumlah kepala keluarga terbanyak terdapat di Kecamatan Praya sebesar 39.224 kepala keluarga. Sedangkan jumlah kepala keluarga paling sedikit terdapat di Kecamatan Praya Barat Daya sebanyak 18.896 kepala keluarga.

Adapun komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel I.4
Data Penduduk Kabupaten Lombok Tengah
berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2017 s.d 2019

No	Kelompok Umur	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	00 - 04	33.104	34.284	30.226	30.640	31.478	27.617	63.744	65.762	57.843
2	05 - 09	49.997	50.262	52.141	47.602	47.658	49.464	97.599	97.920	101.605
3	10-14	47.348	45.104	48.002	44.588	42.617	45.618	91.936	87.721	93.620
4	15 - 19	45.861	44.403	44.484	44.490	43.413	42.934	90.351	87.816	87.418
5	20 - 24	45.191	42.630	42.746	45.218	42.885	42.411	90.409	85.515	85.157
6	25 - 29	47.554	45.868	40.601	50.532	49.265	42.871	98.086	95.133	83.472
7	30 - 34	46.789	46.420	43.716	50.768	50.111	48.474	97.557	96.531	92.190
8	35 - 39	43.549	45.280	44.070	47.669	49.252	47.783	91.218	94.532	91.853
9	40 - 44	38.091	38.971	40.827	38.538	39.289	43.275	76.629	78.260	84.102
10	45 - 49	33.931	35.092	35.264	34.577	35.019	33.855	68.508	70.111	69.119
11	50 - 54	23.613	24.668	28.661	25.361	26.593	30.688	48.974	51.261	59.349
12	55 - 59	21.305	22.018	22.209	21.689	22.553	22.384	42.994	44.571	44.593
13	60 - 64	14.462	15.503	17.546	14.734	15.840	18.244	29.196	31.343	35.790
14	65 - 69	11.080	11.750	12.272	10.574	11.462	11.673	21.654	23.212	23.945
15	70 - 74	6.941	7.912	8.905	6.480	7.521	8.508	13.421	15.433	17.413
16	75+	6.329	8.225	8.944	5.014	7.248	7.346	11.343	15.473	16.290

No	Kelompok	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
		Jumlah	515.145	518.390	520.614	518.474	522.204	523.145	1.033.619	1.040.594

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2019

Pada Tabel I.4 dapat dicermati sebaran jumlah penduduk berdasarkan tingkatan umur. Hal tersebut penting untuk mengetahui komposisi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur terutama penduduk usia produktif (15-60 tahun), jumlah balita dan anak-anak serta jumlah penduduk usia lanjut yang terdapat di Kabupaten Lombok Tengah. Secara umum, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Lombok Tengah cukup besar dengan komposisi sex ratio perempuan yang lebih tinggi. Kondisi demografi dengan komposisi usia ini akan menjadi modal pembangunan yang potensial dalam pelaksanaan pembangunan. Namun di lain pihak, jika komposisi penduduk ini tidak dikelola dengan baik akan menjadi potensi pengangguran terbuka yang cukup tinggi.

I.4. ORGANISASI

I.4.1. Kelembagaan

Tugas dan wewenang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Secara teknis fungsional dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan. Pembentukan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan pada peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah yaitu:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1.a Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Daerah Nomor 2.a Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Peraturan Daerah Nomor 2.b. Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain;
- d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6).

Berikut kami sampaikan perincian OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2019:

NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE
PENUNJANG		
1	SEKRETARIAT DAERAH	A
2	SEKRETARIAT DPRD	A
3	INSPEKTORAT	A
DINAS DAERAH		
1	DINAS PENDIDIKAN	A
2	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	C
3	DINAS KESEHATAN	A
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	A
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	B
6	DINAS SOSIAL	B
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	B
8	DINAS PERHUBUNGAN	C
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	B
10	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	A
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	B
12	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	B
13	DINAS PERTANIAN	A
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	B
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	A
16	DINAS KETAHANAN PANGAN	C
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	B
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	B
19	DINAS KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA	C
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	C
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	B
22	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	B
BADAN DAERAH		
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	B
2	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	A
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	A
4	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	B
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	B
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	B
KECAMATAN		
1	PRAYA	A
2	PRAYA TENGAH	A
3	PRAYA BARAT	A
4	PRAYA BARAT DAYA	A
5	PRAYA TIMUR	A

NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE
6	PUJUT	A
7	JANAPRIA	A
8	KOPANG	A
9	BATUKLIANG	A
10	BATUKLIANG UTARA	A
11	PRINGGARATA	A
12	JONGGAT	A

I.4.2. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia (ASN) merupakan salah satu indikator penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kondisi ASN (Kuantitas dan kualitas) akan menentukan pelaksanaan birokrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Gambaran umum tentang SDM di pemerintahan Lombok Tengah kami sampaikan dalam tabel berikut:

Tabel I.5
Kondisi Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	GOLONGAN				JENIS KELAMIN	
			I	II	III	IV	L	P
1	SEKRETARIAT DAERAH	150	11	45	71	23	115	35
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	54	0	25	24	5	40	14
3	DINAS PENDIDIKAN	4799	13	424	2136	2226	2678	2121
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	82	2	47	30	3	77	5
5	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP)	50	1	14	31	4	33	17
6	BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI	24	0	5	15	4	19	5
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	58	3	36	16	3	53	5
8	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)	69	0	12	48	9	30	39
9	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)	132	5	65	56	6	101	31
10	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	49	1	10	31	7	29	20
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	38	0	7	24	7	28	10
12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	47	2	7	33	5	34	13
13	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	25	1	7	12	5	17	8
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	35	0	11	20	4	17	18
15	DINAS KESEHATAN	993	5	179	716	93	411	582
16	DINAS KETAHANAN PANGAN	22	0	3	14	5	14	8
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	29	0	9	18	2	23	6
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	32	0	7	21	4	21	11
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	72	28	14	24	6	60	12
20	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	66	16	23	23	4	59	7
21	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	263	28	165	68	2	220	43

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	GOLONGAN				JENIS KELAMIN	
			I	II	III	IV	L	P
22	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (P3AP2KB)	58	0	13	40	5	38	20
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	31	0	7	20	4	20	11
24	DINAS PERHUBUNGAN	43	1	15	23	4	37	6
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	43	2	17	18	6	27	16
26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	24	0	11	8	5	15	9
27	DINAS PERTANIAN	314	3	87	172	52	215	99
28	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	60	1	21	35	3	41	19
29	DINAS SOSIAL	26	0	7	16	3	18	8
30	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	50	0	5	37	8	36	14
31	INSPEKTORAT	71	0	5	45	21	47	24
32	KECAMATAN BATUKLIANG UTARA	17	0	4	12	1	17	0
33	KECAMATAN BATUKLIANG	16	0	4	11	1	14	2
34	KECAMATAN JANAPRIA	22	0	5	14	3	19	3
35	KECAMATAN JONGGAT	22	0	9	11	2	20	2
36	KECAMATAN KOPANG	26	0	14	11	1	20	6
37	KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA	19	0	9	8	2	18	1
38	KECAMATAN PRAYA BARAT	22	0	10	10	2	14	8
39	KECAMATAN PRAYA TENGAH	39	1	15	21	2	34	5
40	KECAMATAN PRAYA TIMUR	19	0	7	12	0	15	4
41	KECAMATAN PRAYA	83	0	31	52	0	57	26
42	KECAMATAN PRINGGARATA	16	0	6	8	2	12	4
43	KECAMATAN PUJUT	27	0	11	14	2	24	3
44	KOMISI PEMILIHAN UMUM	4	0	2	2	0	3	1
45	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	343	5	54	241	43	133	210
JUMLAH		8484	129	1484	4272	2599	4973	3511

Sumber: BKPP Kab. Lombok Tengah, Kondisi per 31 Desember 2019

I.5. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KABUPATEN

I.5.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan pada Tahun 2019 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Bab II halaman 54 sebagai berikut:

a. Permasalahan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

- a) Tingginya angka buta huruf;
- b) Kurangnya aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat miskin dan penyandang disabilitas;
- c) Sarana dan prasarana pendidikan masih belum memadai;
- d) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan, yang disertai distribusinya yang belum merata;
- e) Implementasi regulasi pendidikan belum optimal;

2. Urusan Kesehatan

- a) Masih rendahnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan;
- b) Masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan;
- c) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan pada semua tingkat layanan;
- d) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan pada semua tingkat layanan;
- e) Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih relatif rendah.
- f) Kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Masih ada ruas jalan kabupaten dalam kondisi tidak mantap
- b. Perawatan jalan masih kurang optimal
- c. Masih kurangnya tenaga teknis kebinamargaan
- d. Kurangnya cakupan dan kualitas Pelayanan irigasi;
- e. Menurunnya fungsi jaringan irigasi;
- f. Terbatasnya upaya pemeliharaan bangunan utama irigasi dan prasarana pendukungnya;
- g. Masih lemahnya koordinasi pengelolaan irigasi antar kewenangan (Pusat, provinsi dan kabupaten);
- h. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi relatif masih kurang;
- i. Masih kurangnya cakupan pelayanan air bersih dan air minum
- j. Belum optimalnya fungsi pengendalian dan penataan ruang;
- k. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang;
- l. Kurangnya regulasi penataan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- a. Kurangnya cakupan dan pengelolaan pelayanan persampahan.
- b. Masih terbatasnya prasarana penerangan jalan,
- c. Kurangnya cakupan pelayanan listrik.
- d. Masih terdapatnya rumah tidak layak huni.
- e. Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau
- f. Belum optimalnya penataan penguasaan lahan

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Angka kriminalitas relatif masih tinggi;
- b. Pelanggaran Peraturan Daerah relatif masih tinggi.

6. Sosial

- a. Cakupan layanan bagi PMKS relatif masih rendah;
- b. Belum optimalnya upaya pemberdayaan sosial;

b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- a. Kompetensi angkatan kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja
- b. Belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja;
- c. Kesempatan/pekerjaan masih terbatas.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- b. Masih kurangnya peran lembaga pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak

3. Pangan

- a. Ketersediaan dan distribusi pangan masih belum merata
- b. Rendahnya diversifikasi pangan
- c. Tata kelola cadangan pangan belum optimal
- d. Sertifikasi pangan segar masih rendah

4. Lingkungan Hidup

- a. Masih rendahnya kualitas sanitasi (drainase, limbah, sampah,) di tingkat rumah tangga dan komunal
- b. Belum optimalnya upaya pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. Belum optimalnya upaya perlindungan dan konservasi sumber mata air di luar kawasan hutan.
- d. Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam rangka pengelolaan sampah dengan prinsip 3 R (reduce-Reuse-Recycle).
- e. Masih rendahnya pemahaman dunia usaha dan masyarakat usaha dalam memenuhi perizinan lingkungan dan upaya tindak lanjut pengelolaan lingkungan.
- f. Cakupan layanan persampahan masih kurang.

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Cakupan layanan Administrasi Kependudukan relatif masih belum optimal;
- b. Updating database kependudukan belum optimal

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum optimal;
- b. Belum optimalnya peran serta lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di tingkat desa dalam proses pembangunan;
- c. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan.
- d. Sinkronisasi program desa dan kabupaten belum optimal.
- e. Pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa belum optimal.

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Cakupan layanan KB belum optimal;
- b. Rata-rata usia kawin pertama perempuan masih rendah.

8. Perhubungan

- a. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana keselamatan jalan;
- b. Belum optimalnya cakupan layanan angkutan;
- c. Belum optimalnya pengelolaan Parkir;
- d. Belum optimalnya audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).

9. Komunikasi dan Informatika

- a. Belum optimalnya penertiban penggunaan dan pemanfaatan gelombang radio;
- b. Masih ada beberapa wilayah yang belum terlayani sinyal telekomunikasi (*blankspot area's*);
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam pelayanan publik;

10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Masih rendahnya keunggulan kompetitif koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- b. Masih lemahnya kerjasama dan *networking* antar pelaku Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- c. Akses koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap pasar, Teknologi dan permodalan masih belum optimal;

11. Penanaman Modal

- a. Kualitas layanan perijinan dan Investasi belum optimal;
- b. Pengendalian investasi masih belum optimal;
- c. Promosi Investasi Daerah masih kurang.

12. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Masih minimnya pembinaan Olah Raga Prestasi dan Rekreasi;
- b. Sarana dan Prasarana olahraga masih belum memadai;

- c. Belum optimalnya pemberdayaan pemuda dan pengembangan organisasi kepemudaan.

c. Urusan Pemerintah Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- a. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- b. Belum maksimalnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan.

2. Pariwisata

- a. Rendahnya pengelolaan dan keamanan Objek Pariwisata;
- b. Kurangnya amenities di kawasan destinasi pariwisata;
- c. Belum optimalnya promosi wisata;
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata;
- e. Atraksi dan event wisata masih kurang.

3. Pertanian

- a. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan lahan terutama pada lahan marjinal; (pindah ke urusan pertanian)
- b. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
- c. Menurunnya kualitas infrastruktur pendukung berupa jaringan irigasi maupun jalan produksi/jalan usaha tani;
- d. Meningkatnya gangguan iklim dan hama penyakit tanaman maupun ternak.
- e. Masih rendahnya profesionalitas penyuluh.
- f. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan petani
- g. Penanganan pasca panen kurang optimal
- h. Ketersediaan saprodi pertanian belum optimal

4. Perdagangan dan Perindustrian

- a. Daya Saing produk Industri masih rendah;
- b. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perdagangan.
- c. Belum optimalnya penataan pasar rakyat dan Pedagang Kaki Lima (PKL) .

5. Transmigrasi

- a. Minimnya kuota transmigrasi baik antar daerah maupun dalam daerah;
- b. Rendahnya kapasitas calon transmigran.

6. Perpustakaan dan Kearsipan

- a. Tingkat kunjungan ke perpustakaan masih rendah;

- b. Manajemen pengelolaan arsip belum optimal;

d. Penunjang urusan pemerintahan :

1. Integrasi dan sinergisitas dokumen perencanaan pembangunan masih kurang;
2. Belum optimalnya pelaksanaan sistem manajemen kepegawaian;
3. Masih rendahnya kepatuhan terhadap rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan;
4. Efektifitas perumusan kebijakan dan koordinasi implementasi kebijakan pemerintah daerah masih kurang optimal;
5. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah

**BAB II
PERENCANAAN KINERJA**

Visi, misi, strategi dan arah kebijakan yang disampaikan dalam dokumen ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021. Dokumen LKj-IP melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2019 yang dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan, dokumen keuangan dan dinamika yang terjadi pada Tahun 2019.

II.1. VISI dan MISI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

II.1.1. VISI

Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH
BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU”**

Pernyataan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 ini sangat terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi oleh kualitas hidup masyarakat yang bermutu di segala aspek kehidupan dan disertai dengan pengamalan nilai-nilai agama. Visi BERSATU ini mengandung 3 (tiga) kata kunci, yaitu:

- kata **‘beriman’** berarti masyarakat yang meyakini dan melaksanakan ajaran agama dengan baik dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang SARA;

- kata **'sejahtera'** berarti masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan yang mencukupi memenuhi kebutuhan dasar untuk pangan dan non pangan, tingkat kesehatan yang layak, pendidikan yang memadai;
- kata **'bermutu'** berarti masyarakat yang memiliki daya saing dengan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

II.1.2. MISI

Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

6. MENINGKATKAN KERUKUNAN, KEDAMAIAN DAN KEHARMONISAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERAGAMA MELALUI REVOLUSI MENTAL DENGAN MENGEDEPANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEARIFAN LOKAL

Misi kesatu menekankan pembangunan masyarakat yang bersandar pada nilai agama melalui peningkatan kualitas akhlak serta kerukunan dan persaudaraan masyarakat. Mendorong pembangunan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang bersandar pada nilai-nilai agama diharapkan dapat mencegah semakin menurunnya implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat sehingga terwujud kehidupan yang harmoni antar umat beragama dan diharapkan mampu mencegah berkembangnya paham radikal.

7. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, KECERDASAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER

Misi kedua menekankan pada pentingnya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar guna meningkatkan kualitas pendidikan dan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan serta meningkatnya kerjasama dan kemitraan komponen pelaku pembangunan untuk mendorong tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan, terwujudnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara, terwujudnya pelestarian seni budaya serta prestasi kepemudaan dan olahraga, terwujudnya sistem pendidikan nasional di Kabupaten Lombok Tengah yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global serta meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau. Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan. Terwujudnya partisipasi dan semangat masyarakat dalam membangun secara terpadu.

8. MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI DAERAH DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT MELALUI PERKUATAN STRUKTUR EKONOMI MASYARAKAT DENGAN DUKUNGAN STABILITAS KAMTIBMAS

Misi ketiga menekankan pembangunan perekonomian Kabupaten Lombok Tengah yang kokoh, maju dan berkeadilan untuk mendorong terjaganya pertumbuhan ekonomi, terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi, berkembangnya sentra agribisnis sebagai industri potensial, industri kreatif, industri kecil menengah, koperasi dan UKM, optimalisasi Kabupaten Lombok Tengah sebagai daerah tujuan wisata yang berdaya saing, optimalisasi kawasan pesisir dan pantai, serta optimalnya ranah kreativitas dan inovasi guna terwujudnya sinergitas di antara pemerintah, swasta, kaum cendekia, Perguruan Tinggi, Lembaga penelitian dan pengembangan serta tenaga ahli.

9. MENJAGA KESELARASAN, KESERASIAN DAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN KAWASAN DAN ANTAR KAWASAN DENGAN DUKUNGAN INFRA STRUKTUR YANG MEMADAI

Misi keempat menekankan pentingnya mewujudkan penataan ruang kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan dan menyediakan infrastruktur, permukiman dan sanitasi bagi masyarakat yang memadai, mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kabupaten yang konsisten. Terwujudnya infrastruktur jalan dan irigasi yang berkualitas dan merata, terwujudnya pemukiman yang layak huni, terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata serta meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan upaya mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.

10. MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KEPASTIAN HUKUM DENGAN DUKUNGAN BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS

Misi kelima menekankan peningkatan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi pembangunan daerah, kualitas penatausahaan keuangan daerah, kualitas pengawasan aparatur yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya aparatur yang professional, tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai terselamatkannya dokumen/ arsip daerah, meningkatnya perencanaan pembangunan, pengelolaan data dan koordinasi pembangunan daerah, terwujudnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah (aset) yang baik, serta terwujudnya pengawasan yang professional.

II.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rangkaian langkah terpadu untuk mewujudkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien bagi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah lima tahun ke depan, maka dijabarkan dalam strategi dan arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 dengan tabel berikut.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI KESATU: MENINGKATKAN KERUKUNAN, KEDAMAIAN DAN KEHARMONISAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERAGAMA MELALUI REVOLUSI MENTAL DENGAN MENGEDEPANKAN NILAI NILAI AGAMA DAN KEARIFAN LOKAL			
1. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup beragama	1. Terpeliharanya stabilitas sosial	Menjaga kondusifitas kehidupan sosial politik	Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan Pendidikan politik bagi masyarakat dan partai politik Menurunkan Gangguan Keamanan Kenyamanan dan Ketertiban
	2. Terpeliharanya kerukunan umat beragama	Pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan budaya lokal	Peningkatan kualitas layanan keagamaan Menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal
MISI KEDUA: MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, KECERDASAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER			
1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat	1. Meningkatnya kualitas pendidikan	Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan PAUD
			Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar sembilan tahun
			Pengembangan kurikulum pendidikan
			Peningkatan akses dan mutu pendidikan non formal
			Pendidikan inklusi pendidikan dasar
			Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan
			Pengembangan sistem informasi dan manajemen pendidikan
			Penyediaan bantuan pendidikan untuk anak-anak keluarga miskin
			Pencapaian SPM Pendidikan dasar
			Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan
Pembinaan olah raga prestasi			
Pembinaan pemuda dan organisasi kepemudaan			

VISI :			
TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2. <i>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</i>	<i>Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat</i>	<i>Memenuhi standar layanan kesehatan dasar dan rujukan</i> <i>Peningkatan pemenuhan standar dan kualitas layanan rumah sakit pariwisata</i> <i>Penyediaan obat dan vaksin</i> <i>Peningkatan SDM tenaga aparatur kesehatan</i> <i>Pembangunan/rehab puskesmas/pustu/polindes</i> <i>Pengembangan sistem informasi layanan kesehatan</i> <i>Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular</i> <i>Peningkatan promosi, kesehatan masyarakat dan lingkungan</i> <i>Peningkatan kesehatan ibu dan anak</i> <i>Perbaikan gizi masyarakat</i> <i>Layanan kesehatan masyarakat miskin</i> <i>Implementasi SPM pelayanan kesehatan</i> <i>Layanan kesehatan bagi penduduk terdampak bencana</i> <i>Pembinaan keluarga berencana</i> <i>Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan</i> <i>Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</i> <i>Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak</i>
	3. <i>Meningkatnya perlindungan sosial dan kesempatan kerja</i>	<i>Peningkatan perlindungan sosial dan kesempatan kerja</i>	<i>Meningkatkan cakupan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan korban bencana</i> <i>Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial</i> <i>Peningkatan daya saing tenaga kerja lokal</i> <i>Penguatan sistem ketenagakerjaan daerah</i> <i>Pembinaan transmigran</i>
MISI KETIGA:			
MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI DAERAH DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT MELALUI PERKUATAN STRUKTUR EKONOMI MASYARAKAT DENGAN DUKUNGAN STABILITAS KAMTIBMAS			
1. <i>Meningkatnya Perekonomian Daerah</i>	1. <i>Meningkatnya nilai perdagangan, Jasa Unggulan dan Investasi Daerah</i>	<i>Memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif serta kemudahan berinvestasi</i>	<i>Peningkatan nilai tambah produk lokal dan unggulan</i> <i>Pemberdayaan koperasi dan UMKM</i> <i>Pengembangan koperasi syariah</i> <i>Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan barang</i> <i>Penataan kawasan kaki lima</i> <i>Pembinaan dan pengembangan IKM</i> <i>Peningkatan pengelolaan pariwisata</i> <i>Promosi Investasi</i> <i>Peningkatan Kualitas Layanan Investasi, Perijinan dan Non Perijinan</i>
	2. <i>Meningkatnya produktivitas dan</i>	<i>Intensifikasi dan ekstensifikasi</i>	<i>Penerapan panca usaha pertanian</i>

VISI :				
TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
	<i>daya saing sektor agraris serta ketahanan pangan</i>	<i>sektor agraris</i>	<i>Peningkatan kapasitas petani</i> <i>Penataan kawasan pertanian unggulan</i> <i>Peningkatan kualitas layanan irigasi</i> <i>Peningkatan Populasi Ternak</i> <i>Peningkatan produksi Perikanan</i> <i>Penataan kawasan perikanan unggulan</i> <i>Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan</i> <i>Peningkatan akses pangan, pengendalian distribusi dan diversifikasi pangan</i> <i>Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin</i>	
MISI KEEMPAT:				
MENJAGA KESELARASAN, KESERASIAN DAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN KAWASAN DAN ANTAR KAWASAN DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI				
1. <i>Meningkatnya pemerataan pembangunan dan keterpaduan kawasan dan antar kawasan</i>	1. <i>Meningkatnya infrastruktur dalam mendukung koneksitas wilayah</i>	<i>Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan layanan Lalu Lintas Angkatan Jalan (LLAJ)</i>	<i>Peningkatan pengelolaan infrastruktur jalan</i>	
			<i>Penyediaan fasilitas dan pengamanan keselamatan jalan</i>	
			<i>Peningkatan layanan angkutan</i>	
	2. <i>Terwujudnya Tata ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas</i>			<i>Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang</i>
				<i>Pengendalian dampak pencemaran lingkungan</i>
				<i>Perlindungan sumber mata air</i>
				<i>Koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup</i>
	3. <i>Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman</i>		<i>Peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman</i>	<i>Pengembangan kawasan perumahan</i>
				<i>Peningkatan/Pembangunan Rumah Keluarga Miskin dan korban bencana</i>
				<i>Penyediaan prasarana sarana dan utilitas (PSU) kawasan permukiman</i>
				<i>Penyediaan air bersih</i>
				<i>Penyediaan tanah untuk infrastruktur public</i>
4. <i>Terwujudnya kawasan perdesaan maju dan mandiri</i>		<i>Pembangunan kawasan perdesaan secara komprehensif</i>	<i>Peningkatan kualitas layanan persampahan</i>	
			<i>Peningkatan ketangguhan menghadapi bencana</i>	
			<i>Pengembangan ekonomi perdesaan</i>	
			<i>Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa</i>	
			<i>Peningkatan kapasitas pemerintahan desa</i>	
MISI KELIMA:				
MEWUJUDKAN KEPEREMINTAHAN YG BAIK DAN KEPASTIAN HUKUMDENGAN DUKUNGAN BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS				
1. <i>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan</i>	1. <i>Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah</i>	<i>Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan daerah berbasis e-government</i>	<i>Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah</i>	
			<i>Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah</i>	
			<i>Peningkatan kualitas pengawasan</i>	
			<i>Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan</i>	
			<i>Penyediaan data dan informasi pembangunan daerah</i>	
			<i>Peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan kedinasan kepala daerah</i>	
			<i>Peningkatan layanan administrasi DPRD</i>	

VISI :			
TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<i>Peningkatan layanan kepegawaian</i>
			<i>Peningkatan kapasitas ASN</i>
			<i>Peningkatan kualitas kinerja aparatur</i>
			<i>Peningkatan kualitas manajemen ASN</i>
			<i>Peningkatan kapasitas dan layanan administrasi kecamatan</i>
			<i>Peningkatan kualitas layanan adminduk</i>
			<i>Koordinasi kepemilikan akte nikah</i>
			<i>Penyediaan data dan informasi yang berkualitas</i>
			<i>Peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah</i>
			<i>Pengamanan Informasi daerah</i>
			<i>Penguatan Sistem Inovasi Daerah</i>
			<i>Peningkatan sarana prasarana aparatur</i>
			<i>Pembangunan gedung pemerintahan</i>
			<i>Peningkatan kualitas pelayanan administratif</i>
			<i>Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD</i>
	2. Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan Pengelolaan Asli Daerah (PAD)	

II.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 7.a Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Penetapan IKU Kabupaten ini merujuk pada halaman 8, Bab V lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Tahun 2016-2021. Secara rinci, IKU Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kami jabarkan dalam dokumen *terlampir*.

II.4. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH TAHUN 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka seluruh pemerintah daerah di Indonesia diwajibkan menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja sebagai janji dan panduan dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah membuat perjanjian kinerja tahun 2019 berdasarkan dokumen perencanaan dan DPA Tahun Anggaran 2019 yang telah ditetapkan. Adapun perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 kami sampaikan sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	TUJUAN / SASARAN	NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
A	Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup beragama	A1	Indeks Toleransi	Poin	3,43
		1	Tingkat Kriminalitas	Kasus/100.000 penduduk	88,55
2	Terpeliharanya kerukunan umat beragama	2	Konflik berlatar belakang agama	Kasus	0
B	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat	B1	IPM	point	66,36
		B2	Angka Kemiskinan	%	14,51
		B3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,85
3	Meningkatnya kualitas pendidikan	3	Rata-rata lama sekolah	Tahun	6,52
		4	Harapan lama sekolah	Tahun	13,69
		5	PAUD terakreditasi A	%	1,11
		6	SD terakreditasi A	%	5,18
		7	SMP terakreditasi A	%	10,06
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	8	Usia Harapan Hidup	Tahun	65,73
5	Meningkatnya perlindungan sosial dan kesempatan kerja	9	Angka PMKS	orang	3.112
		10	tingkat partisipasi angkatan kerja	%	73,80
		11	Pengeluaran per kapita disesuaikan	Rp (ribu)/tahun	9.802
C	Meningkatnya Perekonomian Daerah	C1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,53
		C2	Indeks Gini	Poin	0,34
6	Meningkatnya nilai perdagangan, Jasa Unggulan dan Investasi Daerah	12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan		4,27
		13	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum	%	8,18
7	Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor agraris serta ketahanan pangan	14	Rata-rata Nilai Tukar Petani	Poin	105,28
		15	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	85,6
D	Meningkatnya pemerataan pembangunan dan keterpaduan kawasan dan antar kawasan	D1	Indeks Wiliamson	Poin	0,4
8	Meningkatnya infrastruktur dalam mendukung koneksitas wilayah	16	Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis	%	70,87
9	Terwujudnya Tata ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas	17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	52,51
		18	Ketaatan terhadap RTRW	%	82,54
10	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	19	Luasan Kawasan Kumuh	Ha	35,90
		20	Spot kawasan kumuh	Spot	3
11	Terwujudnya kawasan perdesaan maju dan mandiri	21	Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang	Desa	24
E	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	E1	Nilai EKPPD	Poin	3,1431

NO.	TUJUAN / SASARAN	NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
12	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	22	Nilai SAKIP	Nilai	B
		23	Nilai Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	poin	2
13	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	24	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	%	9,28

II.5. METODE PENGUMPULAN DATA KINERJA

LKj-IP harus disusun berdasarkan data dan informasi yang valid, relevan, dan terpercaya. Data Kinerja dalam laporan ini diperoleh melalui pengumpulan data kinerja yang berasal dari 2 (dua) sumber utama, yaitu:

- a. Sumber Data Internal, yaitu: data yang berasal dari Unit Kerja (OPD teknis) yang bersangkutan baik yang berupa dokumen, laporan, ataupun sebagai bagian dari sistem informasi yang diterapkan. Untuk menyusun data internal ini, OPD menyusun dan melakukan pengolahan data yang terangkum dalam profil OPD atau laporan statistik sektoral sesuai Tupoksi dan target kinerja OPD. Contoh : Profil Pendidikan di Dinas Pendidikan, Profil Kesehatan di Dinas Kesehatan, Laporan Kamtrantibmas di Satpol PP, Laporan kondisi jalan di Dinas PUPR, Laporan SIAK di DISDUKCAPIL, Laporan SiMPEG di BKPP, Laporan pelaksanaan Monev pada Bagian AP-LPSE di SETDA, dll.
- b. Sumber Data Eksternal, yaitu: data yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah baik berupa data primer maupun data sekunder (Pemprov. NTB, Instansi vertikal, NGO, dll). Data eksternal secara rutin dikumpulkan/ diolah oleh instansi yang bersangkutan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metodologi ilmiah serta standar pelaksanaan fungsi yang dimiliki. Hampir seluruh data eksternal berasal dari analisis hasil survei lapangan atau wawancara yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh: Data Pertanahan dari Kantor Pertanahan, data pelanggan air minum pada PDAM, Dokumen Lombok Tengah Dalam Angka dan data statistik lainnya pada BPS.

Adapun tahapan dalam pengumpulan data kinerja kami sampaikan sebagai berikut:

1. Tim Penyusun LKjIP Kabupaten mengidentifikasi kebutuhan data yang diperlukan dari OPD teknis, instansi vertikal dan/ atau sumber-sumber

lainnya. Kebutuhan data ini terinci mengenai format, jenis, waktu, sumber dan dokumen pendukung yang diperlukan. Selain itu, Tim juga meminta uraian/ penjelasan tentang capaian target kinerja dari masing-masing OPD;

2. Tim Kabupaten menyampaikan daftar kebutuhan data kepada OPD disertai batas waktu penyampaian data;
3. Untuk mengumpulkan data, terdapat “tim pengumpul data” yang bertugas untuk:
 - Meminta data kepada OPD jika belum menyampaikan laporan/ data sesuai batas waktu yang ditentukan;
 - Meminta perbaikan data kepada OPD yang menyampaikan data tidak sesuai dengan format atau kebutuhan yang diinginkan;
 - Sebagai penghubung antara OPD dengan tim kabupaten.
4. Tim Kabupaten meng-*entry* data yang disampaikan OPD;
5. Tim Kabupaten melakukan analisis data dan menyampaikan dalam format Laporan;
6. Draf laporan kemudian dikoordinasikan dengan OPD untuk melakukan kros cek terhadap data yang dicantumkan di dalam laporan;
7. Perbaikan laporan dilakukan secara simultan antara kros cek OPD, reviu oleh APIP Kabupaten;
8. Finalisasi laporan berdasarkan reviu APIP dan masukan dari OPD.

Dalam rangka memberikan pedoman dalam pengumpulan dan pengolahan data kinerja, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 165.a Tahun 2016 tentang Pengumpulan dan Pengolahan Data Kinerja. *Dokumen terlampir.*

II.6. PROSEDUR PENYUSUNAN LKjIP

Penyusunan LKjIP Lombok Tengah dilakukan secara sistematis sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah. *Dokumen SOP terlampir.*

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam pencapaian perjanjian kinerja (PK) Bupati Lombok Tengah Tahun 2019.

III.1. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja dari suatu instansi pemerintah. Hasil pengukuran kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Dalam bab ini memuat rangkaian pengukuran kinerja terhadap tingkat pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator tujuan dan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Persentase pencapaian}}{\text{Rencana tingkat pencapaian}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Persentase pencapaian}}{\text{Rencana tingkat pencapaian}} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Lebih dari 100	SANGAT BAIK
2	Nilai 86 s.d 100	BAIK
3	Nilai 71 s.d 85	SEDANG
4	Nilai 56 s.d 70	KURANG
5	Nilai ≤ 55	SANGAT KURANG

Hingga akhir tahun 2019 , Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Ringkasan capaian indikator tujuan dan sasaran tahun 2019 diuraikan sebagai berikut :

NO	TUJUAN/ SASARAN	NO	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET 2019	TARGET 2021	REALISASI 2019	TARGET 2019/ REALISASI (%)	TARGET 2021/ REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA TUJUAN /MISI
MISI I :										
Meningkatkan Kerukunan, Kedamaian dan Keharmonisan Kehidupan Bermasyarakat dan Beragama Melalui Revolusi Mental Dengan Mengedepankan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal										
A	Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup beragama	A1	Indeks Toleransi	Poin	3,43	3,44	3,56	103,8 (SANGAT BAIK)	103,5 (SANGAT BAIK)	103,8 (SANGAT BAIK)
1	Terpeliharanya Stabilitas Sosial	1	Tingkat Kriminalitas	Kasus/100.000 penduduk	88,55	85,3	0,03842	200,0 (SANGAT BAIK)	200,0 (SANGAT BAIK)	
2	Terpeliharanya kerukunan umat beragama	2	Konflik berlatar belakang agama	Kasus	0	0	0	100 (BAIK)	100 (BAIK)	
MISI II :										
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Kecerdasan dan Kesehatan Masyarakat Dengan Mengedepankan Keadilan dan Kesetaraan Gender										
B	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat	B1	IPM	point	66,36	67,19	65,36	98,5 (BAIK)	97,3	98,28 (BAIK)
		B2	Angka Kemiskinan	%	14,51	14,17	13,87	104,4 (SANGAT BAIK)	102,1 (SANGAT BAIK)	
		B3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,85	2,84	3,08	91,9 (BAIK)	91,5 (BAIK)	
3	Meningkatnya kualitas pendidikan	3	Rata-rata lama sekolah	Tahun	6,52	6,74	5,96	91,4 (BAIK)	88,4 (BAIK)	
		4	Harapan lama sekolah	Tahun	13,69	13,93	13,47	98,4 (BAIK)	96,7 (BAIK)	
		5	PAUD terakreditasi A	%	1,11	1,53	0	0,0 (SANGAT KURANG)	0,0 (SANGAT KURANG)	
		6	SD terakreditasi A	%	5,18	6,02	5,79	111,8 (SANGAT BAIK)	96,2 (BAIK)	
		7	SMP terakreditasi A	%	10,06	11,73	9,5	94,4 (BAIK)	81,0 (SEDANG)	
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	8	Usia Harapan Hidup	Tahun	65,73	65,91	65,59	99,8 (BAIK)	99,5 (BAIK)	
5	Meningkatnya perlindungan sosial dan kesempatan kerja	9	Angka PMKS	orang	3.112	1.901	9.319	-99,5 (SANGAT KURANG)	-290,2 (SANGAT KURANG)	
		10	tingkat partisipasi angkatan kerja	%	73,8	74,23	66,97	90,7 (BAIK)	90,2 (BAIK)	
		11	Pengeluaran per kapita disesuaikan	Rp (ribu)/tahun	9.802	10.030	9800	100,0 (BAIK)	97,7 (BAIK)	

NO	TUJUAN/ SASARAN	NO	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET 2019	TARGET 2021	REALISASI 2019	TARGET 2019/ REALISASI (%)	TARGET 2021/ REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA TUJUAN /MISI
Misi III : Mendorong Kemajuan Ekonomi Daerah Dan Kemakmuran Masyarakat Melalui Perkuatan Struktur Ekonomi Masyarakat Dengan Dukungan Stabilitas Kamtibmas										
C	Meningkatnya Perekonomian Daerah	C1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,53	6,56	3,17	48,5 (SANGAT KURANG)	48,3 (SANGAT KURANG)	75,45 (SEDANG)
		C2	Indeks Gini	Poin	0,34	0,336	0,332	102,4 (SANGAT BAIK)	101,2 (SANGAT BAIK)	
6	Meningkatnya nilai perdagangan, Jasa Unggulan dan Investasi Daerah	12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan		4,27	4,47	3,52	82,4 (SEDANG)	78,7 (SEDANG)	
		13	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum	%	8,18	8,24	2,6	31,8 (SANGAT KURANG)	31,6 (SANGAT KURANG)	
7	Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor agraris serta ketahanan pangan	14	Rata-rata Nilai Tukar Petani	Poin	105,28	105,48	104,36	99,1 (BAIK)	98,9 (BAIK)	
		15	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	85,6	85,8	90,7	106,0 (SANGAT BAIK)	105,7 (SANGAT BAIK)	
Misi IV : Menjaga Keselarasan, Keserasian dan Keterpaduan Pembangunan Kawasan dan Antar Kawasan Dengan Dukungan Infra Struktur yang memadai										
D	Meningkatnya pemerataan pembangunan dan keterpaduan kawasan dan antar kawasan	D1	Indeks Wiliamson	Poin	0,4	0,39	0,4	100,0 (BAIK)	97,4 (BAIK)	100 (BAIK)
8	Meningkatnya infrastruktur dalam mendukung koneksitas wilayah	16	Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis	%	70,87	77,64	60,62	85,5 (BAIK)	78,1 (BAIK)	
9	Terwujudnya Tata ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas	17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	52,51	53	66,254	126,2 (SANGAT BAIK)	125,0 (SANGAT BAIK)	
		18	Ketaatan terhadap RTRW	%	82,54	84,36	77,32	93,7 (BAIK)	91,7 (BAIK)	
10	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	19	Luasan Kawasan Kumuh	Ha	35,9	23,77	59,06	35,5 (SANGAT KURANG)	-48,5 (SANGAT KURANG)	
		20	Spot kawasan kumuh	Spot	3	2	5	33,3 (SANGAT KURANG)	-50,0 (SANGAT KURANG)	
11	Terwujudnya kawasan perdesaan maju dan mandiri	21	Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang	Desa	24	29	27	112,5 (SANGAT BAIK)	93,1 (BAIK)	
Misi V : Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Kepastian Hukum Dengan Dukungan Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas										
E	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	E1	Nilai EKPPD	Poin	3,1431	3,1488	3,0738	97,8 (BAIK)	97,6 (BAIK)	97,9 (BAIK)
12	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	22	Nilai SAKIP	Nilai	2	2	1	50,0 (SANGAT KURANG)	50,0 (SANGAT KURANG)	
		23	Nilai Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	poin	2	2	2	100,0 (BAIK)	100,0 (BAIK)	
13	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	24	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	%	9,28	9,32	9,65	104,0 (SANGAT BAIK)	103,5 (SANGAT BAIK)	

Secara umum capaian kinerja tujuan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Pada Tahun 2019 adalah **95,08** dengan kriteria “BAIK”. Adapun uraian capaian kinerja per tujuan dan per sasaran kami jabarkan sebagai berikut:

III.1.1. TUJUAN 1 MENINGKATNYA HARMONI SOSIAL DAN KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA

Tujuan tersebut diukur dengan 1 (Satu) indikator yaitu: Indeks toleransi. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2019	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2017	2018		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Indeks Toleransi	Poin	3,43	3,45	3,56	103,8	103,5	-	-	Laporan Penelitian Indeks Toleransi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019, Halaman : 37. Bappeda Kab. Lombok Tengah	BAPPEDA
Rata-rata						103,8%	Kriteria 2019 : SANGAT BAIK				

Catatan: Indeks toleransi Tahun 2017 dan 2018 di Kabupaten Lombok Tengah tidak ada data karena tidak pernah dilakukan penelitian/ survei;

Perbandingan capaian indikator “Indeks tolerasi” Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional:

Tahun	Lombok Tengah	NTB	Nasional
2019	3,56	-	-

Ket: Indeks toleransi NTB dan Nasional tidak ada karena Kementerian Agama menggunakan indeks Kerukunan Beragama.

Program Kegiatan OPD yang berkaitan dengan Indikator “Indeks Toleransi” di Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

- a. BAKESBANGPOLDAGRI;
 - Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
 - Koordinasi Lintas Agama (Kemah Bakti Pembaruan)
 - Seminar/Diskusi Wawasan Kebangsaan
 - Program Penanganan Konflik Sosial
 - Pemantauan Aliran Kepercayaan
- b. SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Kesra)
 - Program Pemberdayaan Berbasis Rumah Ibadah
 - Peningkatan peran serta Pemerintah dalam Peringatan Hari-hari besar
 - Pembinaan Pengurus Rumah Ibadah
 - Peningkatan Kapasitas Pengurus Rumah Ibadah
 - Pembinaan dan Pengembangan Tilawatil Qur'an
 - Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
 - Pengendalian Penanganan Masalah Sosial
 - Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

c. DINAS PENDIDIKAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Pendidikan Non Formal

Program Pendidikan Luar Biasa

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Analisis :

Capaian Indeks Toleransi Kabupaten Lombok Tengah 2019

Capaian Indeks	Skor	Kategori
Indeks Dimensi Persepsi	3,80	Tinggi
Indeks Dimensi Sikap	3,27	Cukup
Indeks Dimensi Kerjasama-Hub. Sosial	3,32	Tinggi
Indeks Sikap Pemerintah	3,88	Tinggi
INDEKS TOLERANSI	3,56	Tinggi

Sumber: Laporan Penelitian Indeks Toleransi Kab. Lombok Tengah 2019, Halaman 37

Interval nilai indeks toleransi :

1 - 1.7	=	Sangat rendah
1.8 - 2.5	=	Rendah
2.6 - 3.3	=	Cukup
3.4 - 4.1	=	Tinggi
4.2 - 5	=	Sangat tinggi

Indeks Toleransi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan indeks toleransi Provinsi NTB dan nasional karena tidak ada data. Meskipun demikian, terdapat alternatif indikator lain yang sangat relevan untuk mengukur tingkat toleransi masyarakat, yaitu: indeks kerukunan beragama. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan sendiri oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dapat diketahui bahwa nilai indeks kerukunan beragama Nusa Tenggara Barat: 70,4 sedangkan IKB nasional adalah: 73,83. Sumber: artikel "Daftar Skor Indeks Kerukunan Beragama versi Kemenag 2019", <https://tirto.id/engH>.

Kondisi indeks toleransi Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019 sebesar 3,56 dan masuk dalam kategori "tinggi". Kondisi ini mencerminkan bahwa dari dimensi persepsi, sebagian besar masyarakat Lombok Tengah telah menyadari

bahwa kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan yang dianut merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini didukung oleh peran tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan dan intervensi pemerintah dalam mensosialisasikan hak-hak asasi manusia khususnya yang terkait dengan kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut.

Dari dimensi sikap, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat Lombok Tengah bersedia melakukan interaksi sosial dengan pemeluk agama lain dan bertempat tinggal dilingkungan yang sama tanpa melihat perbedaan agama yang ada dan bersedia melakukan musyawarah sebagai jalan penyelesaian masalah apabila terdapat perselisihan atau pertikaian di antara mereka. Namun masih ada sebagian besar responden tidak bersedia apabila ada pemeluk agama lain membangun rumah ibadah di sekitar lingkungan tempat tinggal.

Berdasarkan hasil penelitian, indeks dimensi kerjasama-hubungan sosial dan indeks sikap pemerintah mendapatkan nilai yang cukup baik. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah dalam membina kerukunan beragama cukup baik misalnya dalam hal fasilitasi pembangunan rumah ibadah, fasilitasi dialog antar umat beragama dan sosialisasi kebijakan-kebijakan kerukunan umat beragama.

Pendukung capaian kinerja indikator “indeks toleransi” di Lombok Tengah antara lain:

- Norma dan ajaran agama;
Norma dan ajaran agama yang diakui di Indonesia selalu mengajarkan kebajikan dan nilai-nilai toleransi antar umat seagama maupun berbeda agama. Islam sebagai agama yang dianut mayoritas penduduk di Kabupaten Lombok Tengah sangat menghargai toleransi saling menghormati antar umat se agama dan beda agama.
- Pemberdayaan tokoh agama dan tokoh masyarakat
Keberadaan alim ulama/ tokoh-tokoh agama sangat penting untuk memberikan pengajaran agama yang benar dan toleran kepada umat beragama. Selain itu adanya kelompok/ organisasi keagamaan juga sangat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap agama yang dipeluknya.
- Pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan lembaga sosial kemasyarakatan di Kabupaten Lombok Tengah. Contoh : kegiatan

pemberdayaan rumah ibadah dengan pembuatan akta yayasan masjid dan pemberian insentif bagi marbot masjid;

- Sikap pemeluk agama.

Sikap ummat islam dan ummat agama lain di Kabupaten Lombok Tengah dinilai cukup taat dalam beribadah. Bahkan Kabupaten Lombok Tengah sejak dahulu telah dikenal dengan nama “pulau seribu masjid”. Label “pulau seribu masjid” mencerminkan jumlah pemeluk agama islam yang mayoritas serta pemberdayaan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan.

- Persepsi pemeluk agama.

Persepsi ini berkaitan dengan respon terhadap peristiwa/ kejadian/ isu-isu yang terjadi di tengah masyarakat. Persepsi pemeluk agama terhadap peristiwa atau suatu isu akan mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat pada aspek toleransi. Dibawah bimbingan tokoh agama serta pembinaan pemerintah daerah, masyarakat Lombok Tengah selalu memiliki persepsi positif terhadap peristiwa/ kejadian/ isu-isu yang berkaitan dengan agama.

- Kerjasama antar umat beragama

Kerjasama antar umat beragama secara nyata diwujudkan melalui pembentukan lembaga khusus seperti :

- a) Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)
- b) Forum Pembauran Kebangsaan (FKB)
- c) Majelis Adat Sasak;
- d) Koordinasi Keluarga Bima Dompu (KKBD);
- e) Perhimpunan masyarakat etnis tionghoa;
- f) Forum koordinasi pimpinan Kabupaten, Kecamatan dan desa/ kelurahan;
- g) Komunitas intelijen daerah (Kominda)
- h) Badan Keamanan Desa/ Kelurahan;
- i) Pengamanan Swakarsa (Pam swakarsa);
- j) Bale mediasi

- Sikap pemerintah

Pemerintah Indonesia mulai dari tingkat desa sampai dengan pemerintah pusat selalu mendukung kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Dukungan ini diberikan dalam bentuk pembinaan, fasilitasi

serta penyusunan regulasi dalam rangka pembinaan kehidupan beragama di Indonesia. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah: Gerakan ABSOR (aman, bersih, sehat dan religius). Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang aman, bersih, sehat dan religius.

- Tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi masyarakat.
Tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi masyarakat Lombok Tengah saat ini relatif merata dan cukup tinggi. Hal tersebut memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat toleransi masyarakat.

Toleransi beragama di Kabupaten Lombok Tengah didukung oleh sikap, persepsi dan pemahaman masyarakat yang cukup tinggi terhadap agamanya masing-masing. Kondisi inilah yang mendukung terwujudnya toleransi dan kerukunan umat beragama pada seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Sampai dengan Tahun 2019 tidak pernah ada konflik sosial masyarakat yang dilatarbelakangi masalah agama.

Dokumentasi:



III.1.2. SASARAN 1 TERPELIHARANYA STABILITAS SOSIAL

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (Satu) indikator yaitu: Tingkat Kriminalitas. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2019	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2017	2018		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Tingkat Kriminalitas	Kasus/100.000 penduduk	88,55	88,55	$3845^{*}/100.000 = 0,03842$	200	200	-	0,03842	Survei Statistik Politik dan Keamanan dalam Buku Statistik Kriminalitas Provinsi NTB Tahun 2018 Halaman no. 19	SAT POL PP
Rata-rata						200 %	Kriteria 2019: SANGAT BAIK				

Catatan: * Kondisi Tahun 2018. Data Tingkat kriminalitas Tahun 2019 tidak ada karena masih dalam proses pengolahan data oleh Sat Pol PP maupun oleh BPS

Perbandingan capaian kinerja indikator “tingkat kriminalitas” Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional.

Tahun	Lombok Tengah		NTB		Nasional		Ket
	Jumlah Kriminalitas*	Tingkat Kriminalitas	Jumlah Kriminalitas	Tingkat Kriminalitas	Jumlah Kriminalitas	Tingkat Kriminalitas	
2019	3845*	0,038*	-	-	-	-	-

Program/ kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “angka kriminalitas” antara lain:

1. SAT POL PP

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

- Pengendalian keamanan lingkungan
- Operasi Penegakan PERDA

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

- Penyuluhan/Sosialisasi Perda, Tramtibmas terhadap Masyarakat/PKL/Pelajar

2. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

- Koordinasi Lintas Agama (Kemah Bakti Pembaruan)
- Seminar/Diskusi Wawasan Kebangsaan

Program pendidikan politik masyarakat

- Sosialisasi kepada pengurus partai politik
- Pendataan dan Monitoring kegiatan Ormas LSM dan Yayasan

- Penyuluhan Politik kepada Masyarakat
 - Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Partai Politik
- Program Penanganan Konflik Sosial
- Pembinaan Kewaspadaan Dini
 - Pemantauan Orang Asing
 - Rencana aksi penanganan konflik sosial
 - Pelatihan ketahanan bangsa
 - Pemantauan Aliran Kepercayaan

Analisis:

Pendukung capaian kinerja indikator “angka kriminalitas” antara lain:

- Pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang cukup baik. Seiring dengan maraknya investasi dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pun semakin meningkat. Kondisi tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh dalam mengurangi jumlah kriminalitas di daerah;
- Pemberdayaan tokoh agama dan tokoh masyarakat
Keberadaan alim ulama/ tokoh-tokoh agama sangat penting untuk memberikan pengajaran agama yang benar dan toleran kepada umat beragama. Selain itu adanya kelompok/ organisasi keagamaan juga sangat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap agama yang dipeluknya.
- Pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan lembaga sosial kemasyarakatan di Kabupaten Lombok Tengah.
- Efektifitas mediasi dan fasilitasi yang dilakukan aparat Pemerintah beserta seluruh unsur kamtrantib dalam penyelesaian masalah-masalah di desa (Babinsa, Polmas, Pol PP, BKD, Bale mediasi desa, Krame dese dll);
- Adanya kegiatan yang dilaksanakan Sat. Pol. PP yang langsung menyasar (mengarah) ke masyarakat sehubungan dengan penyuluhan/sosialisasi produk-produk hukum. Selain itu, Sat Pol Pp Kab. Lombok Tengah juga rutin melaksanakan patroli pengamanan ketertiban umum;
- Adanya Gerakan ABSOR (aman, bersih, sehat dan religius). Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang aman, bersih, sehat dan religius.
- Adanya kegiatan pengendalian keamanan lingkungan yang dikhususkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan di Lombok Tengah. Contoh kegiatan pengamanan lingkungan di KEK Mandalika;

- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya toleransi, keamanan dan ketertiban lingkungan;
- Dukungan pihak-pihak terkait dalam menciptakan suasana toleran, aman dan tertib lingkungan yang kondusif;
- Keselarasan antara program/kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan keinginan/harapan masyarakat, sehingga menimbulkan kepuasan masyarakat.

Kriminalitas merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh seluruh daerah di Indonesia. Kesuksesan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, seperti pembangunan sumber daya manusia maupun infrastruktur sangat bergantung terhadap besar kecilnya hambatan dari kriminalitas. Pembangunan akan maksimal jika tingkat kriminalitas berkurang.

Kriminalitas dapat menimbulkan kerugian ekonomi, fisik, moral, dan psikologis. Dari sudut pandang ekonomi, kriminalitas menimbulkan kerugian dengan adanya biaya yang harus dikeluarkan akibat dari tindak kriminal. Biaya tersebut tidak hanya ditanggung korban, namun oleh masyarakat, dunia usaha, dan juga negara atau pemerintah daerah.

Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*) Menurut Jenis Kejahatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2018

Kabupaten/Kota	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan		
	2016	2017	2018
Pembunuhan	35	21	18
Penganiayaan Berat (Anirat)	70	37	19
Penganiayaan Ringan (Anira)	115	256	603
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	401	313	303
Perkosaan	50	44	46
Penculikan	11	2	2
Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)	390	310	204
Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)	597	526	394
Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	1.978	1.397	1.021
Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)	975	488	529
Pengrusakan/Penghancuran Barang	228	325	174
Pembakaran Dengan Sengaja	26	4	4
Narkotika Dan Psicotropika	210	155	188
Penggelapan	339	318	329
Korupsi	2	15	11

Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	0	3	0
JUMLAH	5427	4214	3845

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan dalam Buku Statistik Kriminalitas Provinsi NTB Tahun 2018 Halaman no. 19

Kriminalitas menurut S. Wojowasito dan W. J. S. Poerwadarminta (1980) (dalam Abdulsyani, 1987) dapat diartikan sebagai perbuatan kejahatan. Kriminalitas juga dapat dipandang dari beberapa aspek, antara lain :

- a) Dari aspek yuridis, kriminalitas adalah jika seseorang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Akan tetapi, bila seseorang belum dijatuhi hukuman berarti orang tersebut belum dianggap sebagai penjahat.
- b) Dari aspek sosial, kriminalitas adalah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar/tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.
- c) Dari aspek ekonomi, kriminalitas adalah jika seseorang/lebih dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia di anggap sebagai penghambat atas kebahagiaan pihak lain.

Tinggi rendahnya angka kriminal di daerah, termasuk di Kabupaten Lombok Tengah dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain:

A. Menurut Zsolt Becsi (1999) dalam Astuti (2014) :

- variabel kepadatan penduduk
- variabel usia pelaku/ korban
- variabel pengangguran
- variabel pendapatan personal
- variabel kesejahteraan
- variabel pendidikan
- variabel personil kepolisian (kuantits dan kualitas)

B. Menurut Alison Oliver (2002) dalam Astuti (2014) :

- GDP perkapita
- Indeks Gini
- Tingkat pengangguran

- Jumlah aparat keamanan/ polisi

Berdasarkan variabel-variabel kriminalitas diatas, maka dapat dipastikan bahwa Kabupaten Lombok Tengah memiliki potensi kriminalitas yang cukup tinggi. Namun, alhamdulillah besarnya potensi kriminalitas tersebut ternyata dibarengi dengan kesadaran aparat untuk terus melakukan sosialisasi, pembinaan, koordinasi serta penindakan terhadap kriminalitas di daerah. Kesadaran masyarakat untuk mendukung keamanan dan kertertiban umum juga sangat tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi serta adanya akulturasi budaya dan semangat toleransi tinggi antara masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah yang telah terjalin dengan baik. Selain itu, hal yang paling mendukung capaian kinerja tersebut adalah adanya aparatur pemerintah dan petugas Kamtrantib pada setiap level tingkatan masyarakat yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Beberapa organisasi yang mendukung kerukunan dan akulturasi budaya dan kamtrantib di Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

- a) Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)
- b) Forum Pembauran Kebangsaan (FKB)
- c) Majelis Adat Sasak;
- d) Koordinasi Keluarga Bima Dompu (KKBD);
- e) Perhimpunan masyarakat etnis tionghoa;
- f) Forum koordinasi pimpinan Kabupaten, Kecamatan dan desa/ kelurahan;
- g) Komunitas intelijen daerah (Kominda)
- h) Badan Keamanan Desa/ Kelurahan;
- i) Pengamanan Swakarsa (Pam swakarsa);
- j) Bale mediasi
- k) Siskamling, dll.

Dokumentasi :





III.1.3. SASARAN 2 TERPELIHARANYA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (Satu) indikator yaitu: Konflik berlatar belakang agama. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2019	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2017	2018		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Konflik berlatar belakang agama	Kasus	0	0	0	100	100	0	0	Laporan Kamtrantibmas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019. Sat Pol PP Kab. Lombok Tengah	SAT POL PP
Rata-rata						100 %	Kriteria 2019 : BAIK				

Perbandingan capaian kinerja indikator “konflik berlatar belakang agama” Kabupaten Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional:

Tahun	Lombok Tengah	NTB	Nasional
2019	0	-	-

Catatan: Data tentang “konflik berlatar belakang agama” di NTB dan Nasional Tahun 2019 tidak ada.

Program/ kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “konflik berlatar belakang agama” antara lain:

1. SAT POL PP

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

- Pengendalian keamanan lingkungan
- Operasi Penegakan PERDA

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

- Penyuluhan/Sosialisasi Perda, Tramtibmas terhadap Masyarakat/PKL/Pelajar

2. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

- Koordinasi Lintas Agama (Kemah Bakti Pembaruan)
- Seminar/Diskusi Wawasan Kebangsaan

Program pendidikan politik masyarakat

- Sosialisasi kepada pengurus partai politik
- Pendataan dan Monitoring kegiatan Ormas LSM dan Yayasan
- Penyuluhan Politik kepada Masyarakat
- Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Partai Politik

Program Penanganan Konflik Sosial

- Pembinaan Kewaspadaan Dini

- Pemantauan Orang Asing
- Rencana aksi penanganan konflik sosial
- Pelatihan ketahanan bangsa
- Pemantauan Aliran Kepercayaan

3. SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Kesra)

Program Pemberdayaan Berbasis Rumah Ibadah

- Peningkatan peran serta Pemerintah dalam Peringatan Hari-hari besar
- Pembinaan Pengurus Rumah Ibadah
- Peningkatan Kapasitas Pengurus Rumah Ibadah
- Pembinaan dan Pengembangan Tilawatil Qur'an

Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

- Pengendalian Penanganan Masalah Sosial
- Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Analisis:

Sampai dengan Tahun 2019, di Kabupaten Lombok Tengah tidak pernah terjadi konflik berlatar belakang agama. Kondisi ini antara lain dibuktikan dengan rekapitulasi gangguan kamtrantibmas Tahun 2019 di Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

Rekapitulasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2019

NO	LOKASI KEJADIAN	PERZINAHAN	PENCURIAN BARANG	PENCURIAN HEWAN TERNAK	CURANMOR	PENEMUAN MAYAT/JENAZAH	PENCURIAN HEWAN TERNAK	PENGANIAYAAN	KDRT	PELECEHAN SEKSUAL/PEMERKOSAAN	PENGELAPAN/ PENIPUAN	PENGRUSAKAN	PERJUDIAN	KEKERASAN TERHADAP ANAK	MIRAS	KEBAKARAN	BANJIR
1	KECAMATAN PRAYA	0	46	0	22	2	0	5	0	0	20	1	1	5	0	0	0
2	KECAMATAN KOPANG	0	8	2	13	1	0	16	0	0	2	0	0	0	0	0	0
3	KECAMATAN PRINGGARATA	0	22	1	13	1	0	13	3	1	6	0	0	1	0	2	0
4	KECAMATAN JANAPRIA	0	4	0	8	0	0	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0
5	KECAMATAN PUJUT	0	15	1	13	0	0	23	1	1	3	2	0	0	0	1	1
6	KECAMATAN PRAYA BARAT	0	6	0	1	0	0	7	1	1	1	0	0	0	0	0	1

NO	LOKASI KEJADIAN	PERZINAHAN	PENCURIAN BARANG	PENCURIAN HEWAN TERNAK	CURANMOR	PENEMUAN MAYAT/JENAZAH	PENCURIAN HEWAN TERNAK	PENGANIAYAAN	KDRT	PELECEHAN SEKSUAL/PEMERKOSAAN	PENGGELAPAN/ PENIPUAN	PENGRUSAKAN	PERJUDIAN	KEKERASAN TERHADAP ANAK	MIRAS	KEBAKARAN	BANJIR
7	KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA	0	5	2	4	0	0	1	2	0	2	2	0	1	0	0	0
8	KECAMATAN PRAYA TIMUR	0	2	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	KECAMATAN PRAYA TENGAH	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KECAMATAN JONGGAT	0	5	0	2	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KECAMATAN BATUKLIANG	0	12	0	6	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	KECAMATAN BATUKLIANG UTARA	0	1	0	2	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	JUMLAH	0	128	6	90	5	0	86	10	3	35	6	1	8	0	3	2

Sumber : Laporan Sat Pol Pp Kab. Lombok Tengah Tahun 2019.

Pendukung capaian kinerja indikator “konflik berlatar belakang agama” antara lain:

- Efektifitas upaya-upaya preventif dalam mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat melalui kegiatan kewaspadaan dini, deteksi dini, pemetaan potensi masalah serta mediasi dan fasilitasi yang dilakukan aparat Pemerintah beserta seluruh unsur kamtrantib (babinsa, polmas, pol pp, BKD, Bale mediasi desa, Krame dese dll). Upaya preventif ini dilakukan pada seluruh permasalahan/ potensi konflik yang terjadi di masyarakat, termasuk jika berkaitan dengan latar belakang agama;
- Adanya tradisi adat masyarakat yang harmonis sejak dahulu kala karena telah terjadi akulturasi budaya antar masyarakat terutama pada bidang sosial budaya dan kemasyarakatan;
- Pemberdayaan tokoh agama dan tokoh masyarakat
Keberadaan alim ulama/ tokoh-tokoh agama sangat penting untuk memberikan pengajaran agama yang benar dan toleran kepada umat beragama. Selain itu adanya kelompok/ organisasi keagamaan juga

sangat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap agama yang dipeluknya.

- Adanya kegiatan yang dilaksanakan Sat. Pol. PP, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FKB) , Majelis Adat Sasak, Badan Keamanan Desa/ Kelurahan, bale mediasi , siskamling dll yang langsung menysasar (mengarah) ke masyarakat sehubungan dengan penyuluhan/sosialisasi produk-produk hukum serta pentingnya kerukunan dalam beragama;
- Adanya Gerakan ABSOR (aman, bersih, sehat dan religius). Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang aman, bersih, sehat dan religius.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan ketertiban lingkungan
- Dukungan pihak-pihak terkait dalam menciptakan suasana keamanan dan ketertiban lingkungan yang kondusif
- Keselarasan antara program/kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan keinginan/harapan masyarakat, sehingga menimbulkan kepuasan di masyarakat.

Berkaitan dengan ketegangan atau konflik dalam masyarakat, antara lain dijelaskan oleh Syafia (2004) dalam kajiannya yang berjudul *Kerukunan antar umat Beragama dan Konflik Sosial* (Sumber: eprints.umm.ac.id. 2984.2 diunduh Tanggal 7 Pebruari 2020),. Ia menjelaskan bahwa “keinginan setiap komunitas agama untuk mempertahankan eksistensinya bahkan melakukan ekspansi pengikut adalah suatu yang alamiah terutama bagi agama dakwah (*mission*) seperti Islam dan Kristen (Katolik dan Protestan). Bahkan sebenarnya secara sosiologis sikap ekspansif tersebut tidak hanya dimiliki oleh agama-agama dakwah itu tetapi oleh kelompok sosial politik dan ekonomi apa pun. Namun demikian, sikap ekspansif itu akan menjadi positif apabila terorientasi pada prinsip keselamatan dan didasarkan pada pengakuan hak-hak orang lain untuk memilih keyakinannya sendiri tanpa pemaksaan “.

Faktor-faktor penyebab konflik dibedakan dalam beberapa jenis (Jamil, Sholihan, et.al, 2007:16. Sumber: eprints.umm.ac.id. 2984.2 diunduh Tanggal 7 Pebruari 2020), yaitu :

1. *Triggers* (pemicu) yaitu peristiwa yang memicu sebuah konflik namun tidak diperlukan dan tidak cukup memadai untuk menjelaskan konflik itu sendiri.
2. *Pivotal factors or root causes* (faktor inti atau penyebab dasar) yaitu terletak pada akar konflik yang perlu ditangani supaya pada akhirnya dapat mengatasi konflik.
3. *Mobilizing factors* (faktor yang memobilisasi) yaitu masalah-masalah yang memobilisasi kelompok untuk melakukan tindakan kekerasan.
4. *Aggravating factors* (faktor yang memperburuk) yaitu faktor yang memberikan tambahan pada *mobilizing factors* dan *pivotal factors*, namun tidak cukup untuk dapat menimbulkan konflik itu sendiri.

Tidak adanya konflik berlatar belakang agama di Kabupaten Lombok Tengah disebabkan oleh kesadaran masyarakat dan para tokoh masyarakat yang tinggi, serta tidak adanya permasalahan pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya konflik.

Kondisi sosial kemasyarakatan dan Trantibum di Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan saat ini patut kita syukuri dan terus jaga agar terawat dan menjadi semakin baik dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, Pemerintah daerah beserta seluruh *stakeholder* harus memperhatikan enam isu utama yang biasanya melatari konflik-konflik agama, yang kadang bersifat tumpang-tindih satu sama lain (Ali-Fauzi dkk. (2009) sebagaimana dikutip oleh Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, serta Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI 2018 dalam dokumen yang berjudul “Menggapai Kerukunan Umat Beragama : Buku Saku FKUB”. Halaman: 16). Isu-isu tersebut yaitu:

1. *Isu moral*, mencakup antara lain isu-isu di seputar perjudian, minuman keras (miras), narkoba, perbuatan asusila, prostitusi, pornografi/pornoaksi. Isu-isu moral lainnya seperti antikorupsi juga bisa dimasukkan ke dalam isu keagamaan selama isu tersebut melibatkan kelompok keagamaan dan/atau dibingkai oleh para aktor yang terlibat dalam slogan atau ekspresi keagamaan.
2. *Isu sektarian*, yang melibatkan perseteruan terkait pemahaman ajaran dalam suatu komunitas agama maupun status kepemimpinan dalam suatu kelompok agama. Dalam Islam, misalnya, kelompok Ahmadiyah adalah di antara kelompok-kelompok agama yang kerap memicu berbagai insiden

konflik. Sedangkan dalam komunitas Kristen, konflik kepemimpinan gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) menjadi contoh yang mewakili isu sektarian ini.

3. *Isu komunal*, yang melibatkan perseteruan di antara komunitas agama yang berbeda, seperti konflik Muslim-Kristen di Poso, Sulawesi Tengah. Isu seperti penodaan agama, seperti dalam kasus karikatur tentang Nabi Muhammad, masuk ke dalam kategori isu komunal ini.
4. *Isu terorisme*, yang terkait dengan aksi-aksi serangan teror dengan sasaran kelompok keagamaan atau hak milik kelompok keagamaan tertentu, maupun serangan teror yang ditujukan terhadap warga asing maupun hak milik pemerintah asing. Contohnya adalah pengeboman di Bali, yang dilakukan oleh kelompok Imam Samudra, dan berbagai serangan bom di Jakarta.
5. *Isu politik-keagamaan*, yang melibatkan sikap anti terhadap kebijakan pemerintah Barat atau pemerintah asing lainnya dan sikap kontra ideologi/kebudayaan Barat atau asing lainnya. Termasuk ke dalam isu politik-keagamaan di sini adalah isu penerapan Syariah Islam atau Islamisme, serta pro-kontra menyangkut kebijakan pemerintah Indonesia yang berdampak pada komunitas keagamaan tertentu.
6. *Isu lainnya*, meliputi isu subkultur keagamaan mistis seperti santet, tenung dan sebagainya, maupun isu-isu lainnya yang tidak termasuk dalam 5 (lima) kategori sebelumnya.

Dokumentasi:





III.1.4. TUJUAN 2 MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Tujuan tersebut diukur dengan 3 (Tiga) indikator yaitu: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun * 2019	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2017	2018		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	IPM	point	66,36	67,87	65,36*	98,5	97,3	64,36	65,36	Buku Lombok Tengah dalam Angka Tahun 2019, IPM di Halaman 414, Angka kemiskinan di Halaman 199, tingkat pengangguran terbuka di halaman 102. www.lomboktengahkab.bps.go.id	Lintas OPD
2	Angka Kemiskinan	%	14,51	13,86	13,87*	104,4	102,1	-	13,87		
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,85	2,83	3,08*	91,9	91,5	-	3,08		
Rata-rata						98,28 %	Kriteria 2019: BAIK				

Ket: * Kondisi Tahun 2018. Data Tahun 2019 belum dipublikasikan oleh BPS

A. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Perbandingan capaian indikator "IPM" Kabupaten Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2016-2018:

NO	TAHUN	LOMBOK TENGAH	NTB	NASIONAL
1	2016	63,22	65,81	70,18

2	2017	64,36	66,58	70,81
3	2018	65,36	67,30	71,39

Sumber: Berita Resmi Statistik tentang Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTB 2018, No. 25/04/52/Th.XIII, 15 April 2019, Halaman: 3 sebagaimana telah diunduh dari [www.ntb.bps.go id](http://www.ntb.bps.go.id), tanggal 7 Pebruari 2020

Program/ kegiatan yang berkaitan dengan capaian indikator IPM di Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

A. DINAS PENDIDIKAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 Program Pendidikan Anak Usia Dini
 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 Program Pendidikan Non Formal
 Program Pendidikan Luar Biasa
 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

B. DINAS KESEHATAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 Program Pengawasan Obat dan Makanan
 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
 Program Kebijakan dari manajemen pembangunan kesehatan
 Program Jaminan Kesehatan Nasional
 Program peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan

C. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

D. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
 Program pengembangan industri kecil dan menengah
 Program pengembangan wilayah transmigrasi

E. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

F. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

Analisis:

Sampai dengan akhir penyusunan laporan ini, BPS belum merilis data IPM Kab. Lombok Tengah Tahun 2019. Oleh karena itu, analisis dilakukan dengan melakukan perbandingan antara target Tahun 2019 dengan capaian IPM Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018.

Belum optimalnya capaian IPM di Kabupaten Lombok Tengah disebabkan oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- a. program/upaya peningkatan IPM di Kabupaten Lombok Tengah masih belum terpadu, terutama pada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan IPM. Contoh: Sampai dengan saat ini belum terlihat keterkaitan kebijakan urusan perdagangan dan tenaga kerja di Lombok Tengah dengan tingkat perkembangan pendidikan penduduk. Bagaimana keterkaitan/ pengaruh kebijakan pemerintah daerah dalam menggalakkan dan meningkatkan kualitas perizinan dan investasi dengan kebijakan peningkatan kapasitas SDM, penyiapan tenaga kerja, penyiapan komoditi pertanian, kondisi keamanan dan ketertiban, sampai dengan pengaruhnya terhadap kelesarian adat budaya masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah belum memiliki kebijakan/ *road map* khusus dalam upaya peningkatan IPM agar lebih fokus, terarah dan terpadu;
- b. Besarnya pengaruh lingkungan terhadap perkembangan IPM.

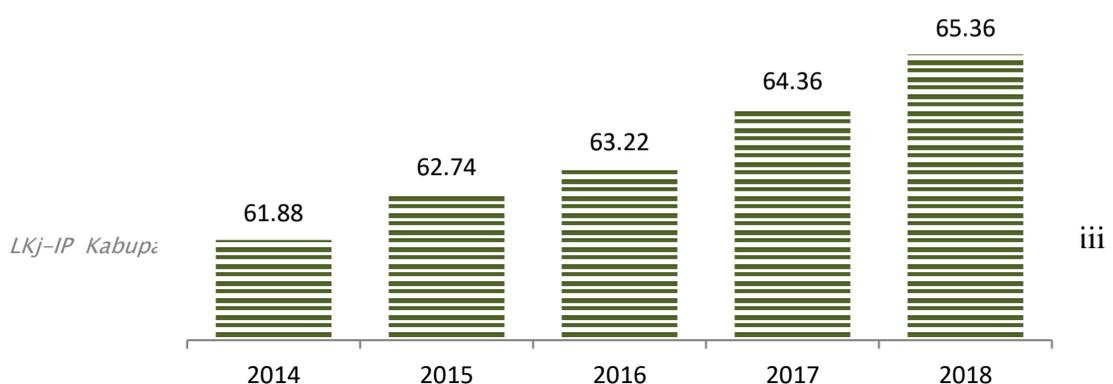
Secara internal, ekses gempa Bumi 7 SR Tahun 2018 masih terasa pada Tahun 2019. Turunnya kunjungan wisata ke Lombok Tengah sampai dengan perbaikan fisik dan psikis akibat gempa secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan IPM di Lombok Tengah. Secara eksternal, dinamika pertumbuhan ekonomi serta peristiwa sosial politik nasional dan regional juga sangat berpengaruh terhadap capain IPM Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019.

Adapun pendukung peningkatan nilai IPM di Kab. Lombok Tengah antara lain:

- Besarnya perhatian pemerintah daerah pada bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian;
- Meningkatnya upaya promotif dan preventif di Puskesmas dan jaringannya dalam menanggukangi penyakit menular/ tidak menular, gizi buruk, kematian ibu dan anak, dll.
- Adanya data PMKS dan pemberian bantuan kepada PMKS;
- Gerakan ABSOR (aman, bersih, sehat dan religius). Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang aman, bersih, sehat dan religius.
- Banyaknya sosialisasi dan pelatihan terhadap pola hidup bersih dan sehat;
- Peningkatan kompetensi tenaga medis;
- Pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui kursus di BLK;
- Pembinaan dan pengembangan UMKM ;
- Pemberian bantuan sarana prasarana dan permodalan kepada UMKM dan kelompok usaha;
- Kondisi yang aman dan tertib dapat memberikan pengaruh positif bagi investor yang berminat menanamkan modalnya di Kabupaten Lombok Tengah;
- Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum seperti jalan dan irigasi yang secara langsung atau tidak langsung mendukung perkembangan perekonomian;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pada bidang perizinan.

Setiap tahun, IPM Lombok Tengah meningkat rata-rata 1,31 persen selama periode 2014-2018. Dalam kurun waktu lima tahun terjadi kenaikan IPM hingga 3,48 poin. Pada tahun 2018, IPM Lombok Tengah mencapai 65,36, meningkat 1 poin dibanding tahun sebelumnya. Hal ini berarti IPM Lombok Tengah tumbuh 1,55 persen pada periode 2017-2018 dan merupakan pertumbuhan IPM tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018.

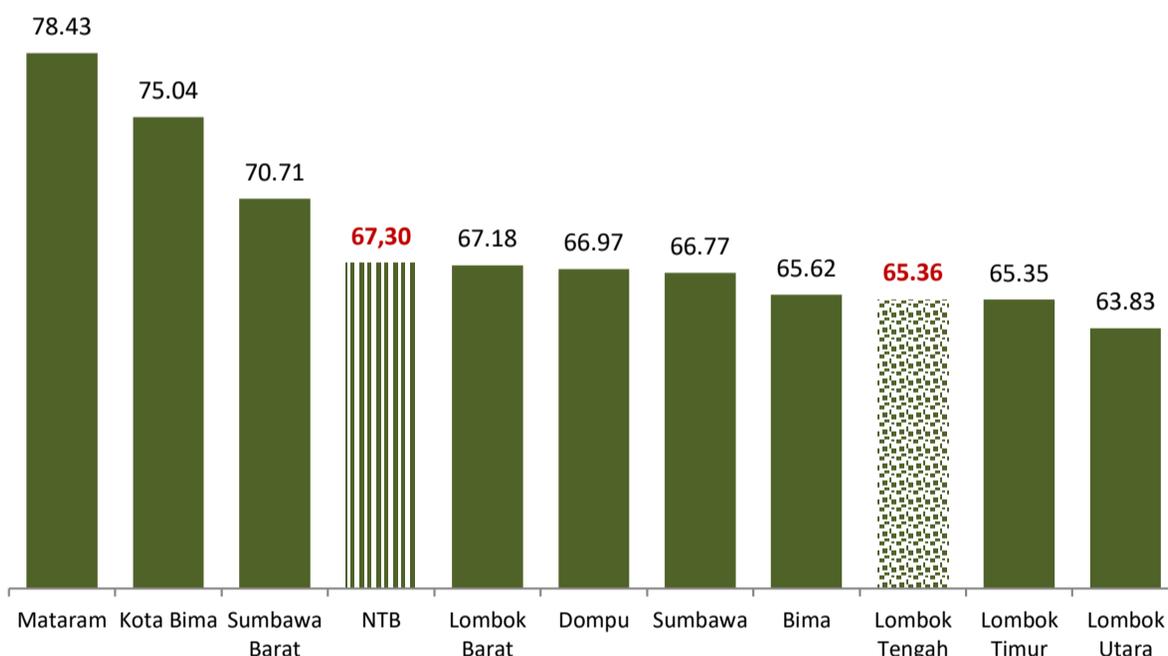
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lombok Tengah 2014-2018



Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dengan tingkat IPM tersebut, Kabupaten Lombok Tengah masih menyandang predikat “sedang” dalam pembangunan manusia. Posisi IPM Kabupaten Lombok Tengah tahun 2018 meningkat dari posisi ke-9 menjadi ke-8 dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2018

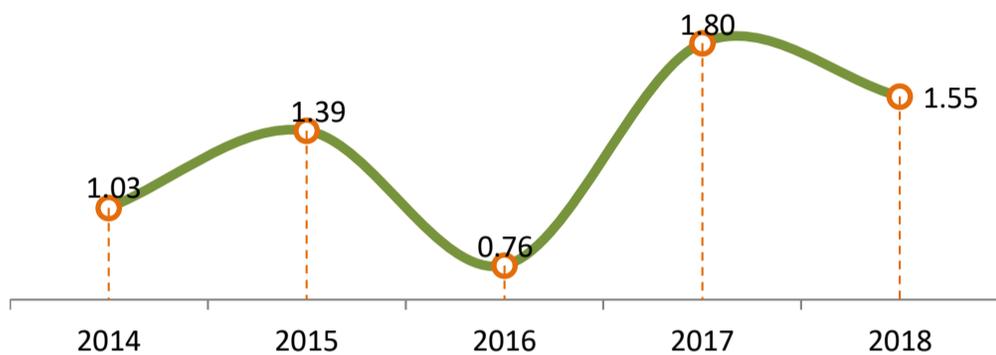


Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Untuk mempercepat peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Lombok Tengah diperlukan modal, investasi, dan semangat yang besar dari masyarakat untuk berubah menjadi lebih baik. Investasi bukan hanya dalam bentuk pengembangan usaha yang tujuannya untuk mendapatkan nilai tambah dari usaha tersebut, tapi investasi bisa melalui pendidikan. Karena dengan pendidikan akan lahir sumber daya manusia yang berkualitas yang nantinya bisa

membangun daerahnya. Dengan sumber daya berkualitas dapat menggerakkan dan mempercepat roda perekonomian di daerah.

Tren dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lombok Tengah 2014-2018



Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Angka IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator masing-masing. Dimensi kesehatan diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Terakhir, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Berdasarkan data tahun 2018, umur harapan hidup saat lahir di Lombok Tengah mencapai 65,59 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa hidup bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 65,59 tahun. Dari sisi pendidikan, penduduk Kabupaten Lombok Tengah yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata sudah menempuh 5,96 tahun masa sekolah atau telah menyelesaikan kelas V SD. Selain itu, rata-rata anak usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diperkirakan dapat mengenyam pendidikan hingga 13,47 tahun atau setara dengan tahun kedua di bangku kuliah. Pada aspek ekonomi, pengeluaran per kapita mencapai 9,8 juta rupiah per tahun.

Dimensi kesehatan diwakili oleh indikator angka harapan hidup saat lahir (AHH). AHH saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan angka harapan hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat semakin baik dalam semua aspek kesehatan.

Pada tahun 2014, AHH saat lahir di Lombok Tengah mencapai 64,45 tahun. Empat tahun kemudian (Tahun 2018) bertambah 1,14 tahun menjadi

65,59 tahun. Ini berarti rata-rata harapan bayi baru lahir untuk hidup bertambah 0,23 setiap tahunnya. AHH saat lahir Lombok Tengah meningkat setiap tahunnya yang menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar. Secara tidak langsung mencerminkan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. Terdapat beberapa hal yang mendorong meningkatnya derajat kesehatan masyarakat seperti peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat, serta meningkatnya status sosial ekonomi masyarakat.

Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah indikator dari dimensi pengetahuan. Selama tahun 2014-2018, pengetahuan penduduk Lombok Tengah semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang menunjukkan peningkatan. Rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang, sedangkan harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun ke atas. Perlu diketahui, indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Lebih jauh, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat memberikan gambaran tentang capaian (stock) dan penambahan (flow) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Lombok Tengah menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2014-2018. Secara rata-rata, harapan lama sekolah usia 7 tahun tumbuh sebesar 2,21 persen per tahun selama tahun 2014-2018. Sementara itu, rata-rata lama sekolah hanya tumbuh sebesar 2,15 persen per tahun dalam kurun waktu yang sama.

Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan yang dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama periode 2014-2018, pengeluaran per kapita yang disesuaikan meningkat 477 ribu rupiah atau tumbuh 2,64 persen per tahun. Jika pada tahun 2014 pengeluaran per kapita penduduk hanya sekitar 8,65 juta rupiah, maka pada tahun 2018 mencapai 9,8 juta rupiah per tahun. Hal ini menunjukkan terus membaiknya kesejahteraan penduduk di Kabupaten Lombok Tengah.

Dokumentasi:



B. ANGKA KEMISKINAN

Perbandingan capaian indikator “Angka Kemiskinan” Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional :

NO	TAHUN	LOMBOK TENGAH	NTB	NASIONAL
1	2018 (September)	13,87	14,63	9,66
2	2019 (Maret)	-	14,56	9,41

Sum ber: Berita Resmi Statistik tentang Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019, No. 56/07/Th. XXII, 15 Juli 2019, Halaman: 9 sebagaimana telah diunduh dari www.bps.go.id tanggal 7 Pebruari 2020

Program/ Kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “angka kemiskinan” antara lain:

- A. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 - Program pembangunan jalan dan jembatan
 - Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
 - Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
 - Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
 - Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
 - Program Perencanaan Tata Ruang
 - Program Pemanfaatan Ruang
 - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
 - Program Pengembangan Keciptakarya

Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum

B. DINAS SOSIAL

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

C. DINAS KESEHATAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Program Kebijakan dari manajemen pembangunan kesehatan
Program Jaminan Kesehatan Nasional
Program peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan

D. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

E. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
Program pengembangan industri kecil dan menengah
Program pengembangan wilayah transmigrasi

F. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH

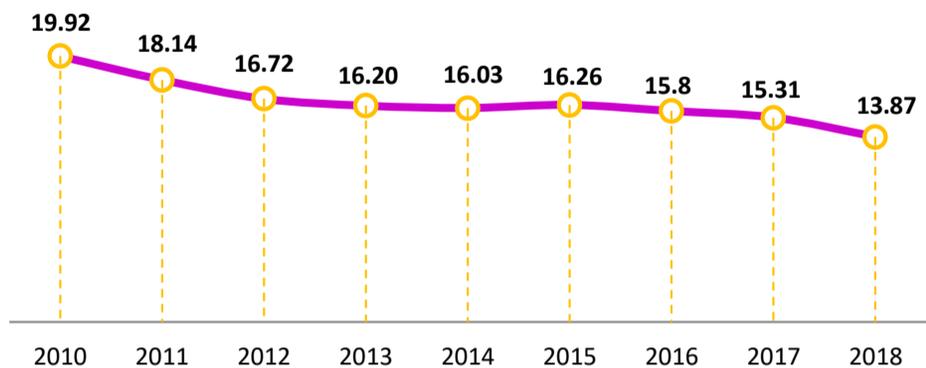
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

G. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

Analisis:

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2018



Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pendukung capaian kinerja indikator “angka kemiskinan” antara lain:

1. Komitmen dan kebijakan pemerintah kabupaten Lombok Tengah yang menjadikan pengentasan kemiskinan prioritas pembangunan daerah. Angka kemiskinan merupakan salah satu indikator utama dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021;
2. Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD);
3. Adanya partisipasi Bazda, NGO dan CSR perusahaan-perusahaan dalam upaya penanggulanagn kemiskinan di daerah;
4. Penetapan daerah kuta sebagai KEK Mandalika beserta seluruh rangkaian kegiatan pembangunan dan event-event yang akan dilaksanakan seperti pagelaran Moto GP Tahun 2021, telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan di daerah tertama aspek pengembangan pariwisata di daerah;
5. Makin meningkatnya investasi dunia usaha di Kabupaten Lombok Tengah terutama pada sektor parwisata telah menambah jumlah lapangan pekerjaan dan penambahan penghasilan bagi masyarakat;
6. Besarnya potensi SDA, demografi dan budaya di Lombok Tengah dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Contoh: banyaknya Obyek wisata alam dan budaya yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan di Kabupaten Lombok Tengah;
7. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif;

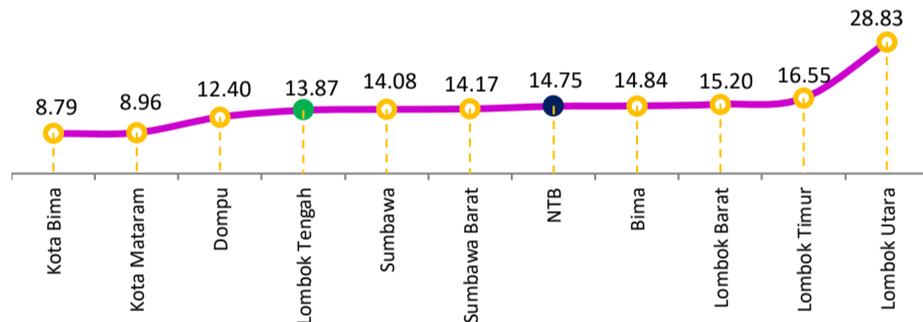
8. Adanya event nasional maupun lokal yang dilaksanakan di Lombok Tengah. Contoh: event bau nyale, seminar/ pertemuan nasional dan internasional, pelaksanaan lomba/ pertandingan skala nasional/ internasional
9. Keberadaan Bandara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok Tengah sebagai pintu masuk utama di NTB;
10. Adanya pembinaan dan penangananan PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah beserta *stakeholder* lain seperti pemerintah desa. Penanganan masalah PMKS ini dilakukan melalui pemberian santunan kebutuhan pokok maupun pembinaan dalam bentuk pelatihan keterampilan, pemberian peralatan dan modal usaha agar masyarakat dapat mandiri sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah PMKS di Lombok Tengah;
11. Adanya pembinaan terhadap koperasi dan UMKM secara terpadu dan berkelanjutan sebagai upaya untuk penciptaan wirausahawan baru dan pembinaan terhadap UMKM agar lebih produktif dan berkembang. Contoh kegiatan yang dilaksanakan seperti: pembinaan manajemen koperasi dan UMKM, pemberian bantuan peralatan, pemberian bantuan modal usaha kelompok, fasilitasi dalam pemasaran melalui pameran dan promosi secara lokal maupun regional;
12. Adanya Job fair dan pelatihan keterampilan pada BLK (balai latihan kerja) yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran sehingga secara langsung sangat berkontribusi pada upaya penurunan angka kemiskinan.
13. Meningkatnya kreativitas dan inisiatif masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah sekaligus dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Contoh : pembentukan desa-desa wisata di Kabupaten Lombok Tengah

Patut disyukuri selama kurun waktu 2010-2018, kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh penurunan persentase penduduk miskin. Persentase penduduk miskin pada tahun 2010 sebesar 19,92 persen, dan pada tahun 2018 terus mengalami penurunan hingga mencapai 13,87 persen. Penurunan tingkat kemiskinan ini

merupakan peran serta semua pihak termasuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui berbagai program pengentasan kemiskinan. Contoh: Kebijakan pembangunan/ rehab rumah tidak layak huni (RTLH) yang dilaksanakan secara terpadu antara dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah. Tahun 2019, seluruh desa dan kelurahan telah melakukan pembangunan / rehab minimal 5 (lima) unit RTLH di wilayah kerja masing-masing. Dengan demikian, diluar pembangunan ratusan RTLH oleh dinas PERKIM, Desa dan kelurahan telah membantu upaya penanganan kemiskinan secara langsung dengan membangun paling sedikit 695 unit RTLH.

Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, persentase penduduk miskin di Kabupaten Lombok Tengah berada pada peringkat ke-4 terendah dan persentasenya lebih rendah dari persentase penduduk miskin Provinsi NTB. Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-pulau Lombok, peringkat Kabupaten Lombok Tengah berada pada posisi ke-2 terendah setelah Kota Mataram.

**Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018**



Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Persoalan kemiskinan bukan hanya jumlah dan persentase penduduk miskin saja, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan, sehingga kebijakan yang dilaksanakan juga mampu mengurangi tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P₁*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Kebijakan kemiskinan sebaiknya tidak hanya ditujukan untuk mengurangi persentase penduduk miskin saja, namun juga dapat mengurangi

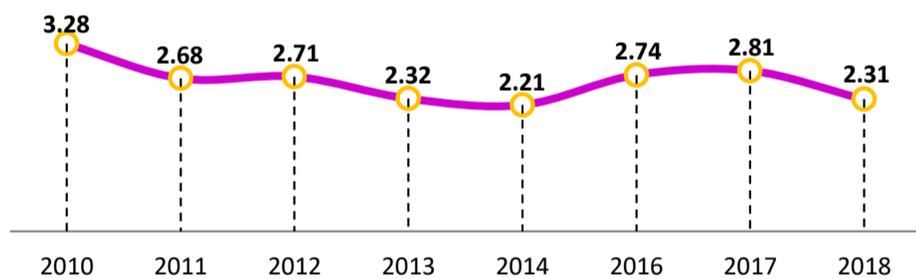
kedalaman kemiskinan sekaligus keparahannya. Semakin tinggi nilai Indeks kedalaman kemiskinan maka artinya kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Lombok Tengah sejak periode 2010 hingga 2018 berfluktuatif namun cenderung mengalami penurunan. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 3,28 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 2,31. Nilai P1 paling rendah terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 2,21.

Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Indeks ini sering dikaitkan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi penduduk miskin diperlukan program perlindungan sosial yang tepat sasaran. Selain itu perlu dirumuskan agar program tersebut dapat mengangkat penduduk miskin keluar dari kemiskinan secara permanen, jadi lebih bersifat padat karya dibanding berbentuk transfer langsung.

**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁)
di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2018**



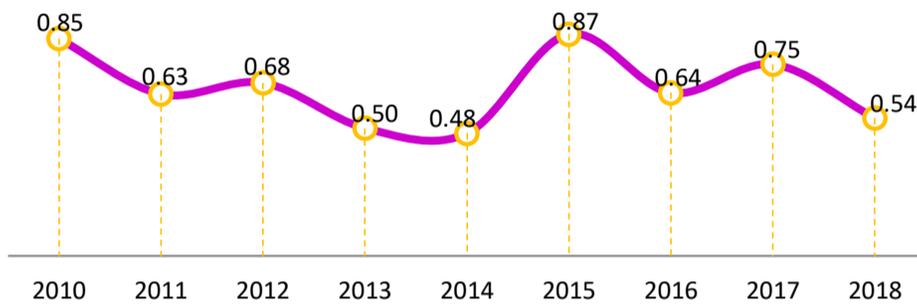
Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri, dan dapat digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin tinggi angka indeks keparahan kemiskinan maka sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin itu semakin timpang dan sebaliknya. Untuk itu, persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja.

Dimensi penyebaran pengeluaran/pendapatan atau ketimpangan dari penduduk miskin perlu dilihat sebagai gambaran parah tidaknya kehidupan penduduk miskin. Karena semakin timpang penduduk miskin maka akan

semakin sulit untuk mengentaskan dari kemiskinan. Apabila kesenjangan antara penduduk miskin tidak jauh berbeda maka kebijakan yang sama akan dapat berefek sama bagi penduduk miskin tersebut. Meningkatnya Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan semakin rendahnya kualitas penduduk miskin.

**Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂)
di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2018**

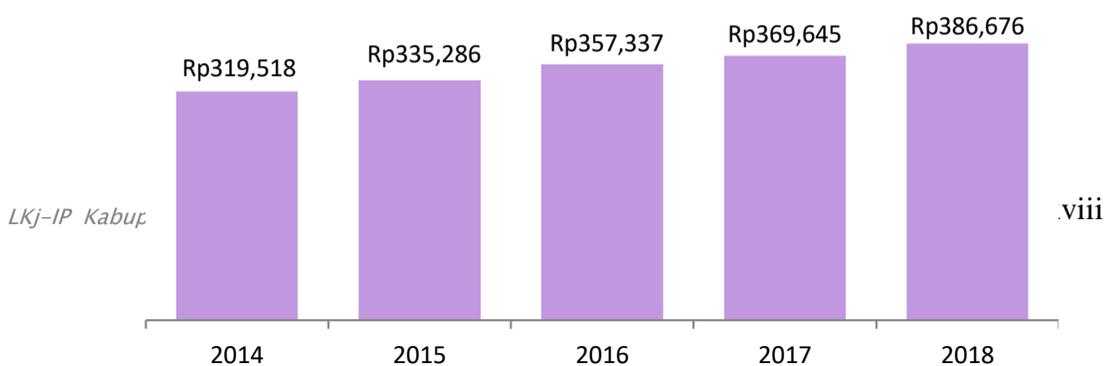


Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pola pergerakan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah terlihat cukup fluktuatif dengan peningkatan tajam pada tahun 2015. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 mencapai 0,85 dan pada tahun 2018 turun menjadi 0,54. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan mencapai nilai terendah pada tahun 2014 yakni sebesar 0,48. Dengan menurunnya angka indeks keparahan kemiskinan ini maka sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin sebaran menyempit atau diantara penduduk miskin pengeluarannya berkurang ketimpangannya. Sementara itu, kenaikan nilai Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin yang semakin melebar.

Garis kemiskinan merupakan pembatas antara penduduk yang miskin dan tidak miskin. Apabila pengeluaran perkapita per bulan penduduk lebih tinggi dari garis kemiskinan maka dia akan menjadi tidak miskin. Sebaliknya apabila lebih kecil dari garis kemiskinan maka ia akan menjadi penduduk miskin. Penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan merupakan kasus batas yang dikategorikan sebagai penduduk yang rentan miskin. Penduduk rentan miskin ini akan mudah naik menjadi tidak miskin namun juga akan mudah jatuh menjadi miskin. Sedikit saja ada gejolak ekonomi maka penduduk rentan miskin akan berkontribusi pada besarnya penduduk miskin.

Garis Kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dokumentasi:



C. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Perbandingan capaian indikator “Tingkat Pengangguran Terbuka” Kabupaten Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional :

Tahun	NASIONAL	Provinsi NTB	Kabupaten Lombok Tengah
2014	5,94	-	6,47
2015	6,18	-	7,42
2016	5,61	-	2,90
2017	5,50	-	3,08

2018	5,34	-	6,47
------	------	---	------

Sumber : Buku Indeks Pembangunan Manusia 2018, Halaman: 55 sebagaimana telah diunduh dari

www.bps.go.id

tanggal 7 Pebruari 2020

Program/ Kegiatan yang berkaitan dengan indikator “tingkat pengangguran terbuka” antara lain:

- A. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- B. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 - Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
 - Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
 - Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
 - Program pengembangan industri kecil dan menengah
 - Program pengembangan wilayah transmigrasi
- C. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
 - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- D. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

Analisis:

Sampai dengan akhir penyusunan laporan ini, BPS tidak dapat merilis data tingkat pengangguran terbuka Kab. Lombok Tengah Tahun 2019. Oleh karena itu, analisis dilakukan dengan melakukan perbandingan antara target Tahun 2019 dengan capaian tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka. TPT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah angkatan kerja, dinyatakan dalam persentase. Ukuran ini digunakan untuk melihat seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat terserap dalam pasar kerja di Kabupaten Lombok Tengah.

Pada tahun 2018, TPT Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 3,08 persen dari total penduduk angkatan kerja. Artinya dari 100 orang angkatan

kerja yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, terdapat 3 orang yang merupakan pengangguran. TPT sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosial kemasyarakatan di daerah tersebut. Pertumbuhan sektor industri dan UMKM yang belum optimal serta kondisi realisasi investasi di daerah sangat mempengaruhi kondisi TPT. Secara umum, gambaran tentang tingkat pengangguran di Kabupaten Lombok Tengah kami paparkan sebagai berikut:

TPT menurut Jenis Kelamin Tahun 2015, 2017-2018 (persen)

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	7,27	5,34	6,47
2015	9,92	4,32	7,42
2017	3,83	1,88	2,90
2018	2,72	3,49	3,08

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah (data diolah)

Daya saing penduduk dalam lapangan pekerjaan akan berkaitan dengan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia. Dengan kualitas SDM yang memadai maka kesempatannya untuk memperoleh pekerjaan juga akan semakin tinggi.

Pendukung capaian kinerja indikator “TPT” yaitu :

1. Penambahan jumlah/ nilai investasi di daerah yang berdampak pada peningkatan jumlah lapangan kerja. Contoh : investasi di bidang pariwisata dengan adanya KEK Mandalika;
2. Pembantuan dan pembinaan terhadap kelompok usaha mikro kecil dan menengah serta pertumbuhan wirausaha baru;
3. Pembinaan dalam manajemen pemasaran produk online dan offline (promosi dalam daerah dan luar daerah);
4. Penyelenggaraan transmigrasi dan peningkatan kualitas pelayanan tenaga kerja ke luar negeri;
5. Penyelenggaraan pelatihan/ kursus keterampilan yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK);

6. Penyelenggaraan job fair secara rutin setiap tahun sebagai upaya menjembatani kebutuhan personil pada dunia usaha serta penyaluran / penempatan tenaga kerja di daerah;
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkaitan dengan dunia usaha dan ketenagakerjaan. Contoh: Peningkatan kualitas perizinan di PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) serta peningkatan kualitas pelayanan bagi para calon TKI di Lombok Tengah;
8. Peningkatan peran serta pemerintah desa dalam program pemberdayaan masyarakat. Program ini dapat meningkatkan lapangan kerja dan sekaligus keterampilan bekerja kepada para pencari kerja;

Gambaran akan dunia ketenagakerjaan di Kabupaten Lombok Tengah akan tercermin dari beberapa indikator seperti jumlah angkatan kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan lain sebagainya.

Yang termasuk dalam kategori angkatan kerja (*labour force*) adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran juga termasuk dalam kategori angkatan kerja. Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja. Semakin tinggi jumlah angkatan kerja, semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.

Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Total
Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) (jiwa)	307.456	363.424	670.880
Angkatan Kerja (jiwa)	240.752	208.533	449.294
Bekerja (%)	97,28	96,51	96,92
Pengangguran (%)	2,72	3,49	3,08
Bukan Angkatan Kerja (jiwa)	66.704	154.891	221.586
Sekolah (%)	38,62	16,14	22,91
Mengurus Rumahtangga (%)	25,98	77,30	61,85
Lainnya (%)	35,40	6,56	15,24

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah (data diolah)

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut yang Bekerja
Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2015, 2017, dan
2018
(Laki-laki + Perempuan)

Tahun	Lapangan Usaha Utama					Jumlah
	Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa	Lainnya	
2015	43,14	12,60	19,23	11,97	13,07	100,00
2017	42,04	15,64	18,99	12,14	11,19	100,00
2018	36,56	17,09	20,71	12,54	13,09	100,00

Sumber: Buku ststistik ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Halaman : 32

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas
Menurut yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Formal-Informal
di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2015, 2017, dan 2018 (Laki-laki +
Perempuan)

Tahun	Sektor		Jumlah
	Formal	Informal	
2015	18,39	81,61	100,00
2017	17,26	82,74	100,00
2018	21,32	78,68	100,00

Sumber: Buku ststistik ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Halaman : 59

Jumlah usia kerja di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2018 sebanyak 670,88 ribu orang, terdiri dari 307,46 ribu laki-laki dan 363,42 ribu perempuan. Dari 670,88 ribu orang penduduk usia kerja, 449,29 ribu orang merupakan angkatan kerja. Meskipun jumlah penduduk usia kerja perempuan lebih banyak dari laki-laki, namun jumlah angkatan kerja penduduk perempuan lebih kecil dari laki-laki. Jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 208,53 ribu orang, sedangkan untuk laki-laki sebanyak 240,75 ribu orang. Salah satu penyebabnya karena budaya yang menempatkan laki-laki harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan perempuan bertugas di rumah untuk mengurus keluarga.

Perluasan lapangan kerja untuk mengimbangi jumlah tenaga kerja yang terus bertambah menjadi kunci penting keberhasilan program pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Artinya, perluasan lapangan pekerjaan akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran dapat ditekan. Dari sisi ekonomi pengangguran merupakan produk ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang

tersedia. Pengangguran akan terjadi apabila jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dibandingkan jumlah pencari kerja, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan informasi pasar kerja bagi pencari kerja kurang lengkap. Selain itu, pengangguran juga dapat disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi karena perusahaan menutup/mengurangi bidang usahanya sebagai akibat dari krisis ekonomi, keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, dan lain-lain.

Tidak seimbangnya *demand* dan *supply* tenaga kerja menyebabkan angka pengangguran bergerak fluktuatif. Bila jumlah *demand* (permintaan) tenaga kerja lebih besar dari jumlah tenaga kerja yang tersedia di pasar tenaga kerja, maka yang terjadi adalah tenaga kerja akan memiliki pilihan yang lebih banyak untuk menentukan kemana akan bekerja. Namun pada kenyataannya, disetiap negara mempunyai kecenderungan bahwa jumlah *demand* tenaga kerja lebih kecil dari pada ketersediaan tenaga kerja (*supply*) yang ada di pasar tenaga kerja, dengan kata lain jumlah lapangan pekerjaan yang diperebutkan para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2018

Pendidikan Terakhir	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
≤SD	0,69	2,15	1,46
SMP	5,09	4,09	4,58
SMA Umum	6,75	3,91	5,82
SMA Kejuruan	0,00	0,00	0,00
Diploma I/II/III	0,00	23,05	14,86
Universitas	0,00	8,40	3,13
TPT Lombok Tengah	2,72	3,49	3,08

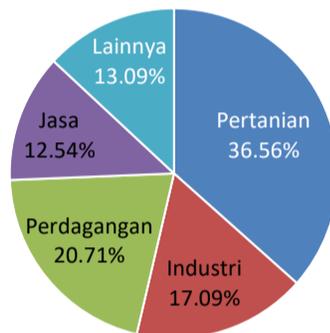
Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah (data diolah)

Jika diamati berdasarkan tingkat pendidikan, pengangguran tertinggi terjadi pada penduduk dengan pendidikan Diploma mencapai 14,86 persen, terutama pada penduduk perempuan. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena mereka yang berpendidikan rendah cenderung tidak selektif dalam memilih pekerjaan dan tidak mensyaratkan pekerjaan tertentu. Selain itu, lapangan pekerjaan yang mereka geluti merupakan lapangan pekerjaan informal yang kesempatan

kerjanya lebih luas dibandingkan lapangan pekerjaan formal. Pola tahun 2018 berbeda dengan tahun 2017 dimana pengangguran tertinggi terjadi pada penduduk dengan pendidikan SMK dengan angka TPT mencapai 12,9 persen.

Potensi dari lapangan usaha yang ada dalam perekonomian dapat tercermin dari besarnya penduduk yang bekerja dalam lapangan usaha tersebut. Dengan melihat besarnya jumlah pekerja menurut lapangan usaha dapat dirumuskan kebijakan untuk mengamankan ketersediaan lapangan pekerjaan sekaligus melihat prospek ekonomi di masa mendatang.

Persentase Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018



Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah

Struktur lapangan pekerjaan di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2018 tidak banyak berubah dibandingkan dengan kondisi tahun 2017. Sektor pertanian masih mendominasi lapangan usaha utama bagi penduduk Kabupaten Lombok Tengah yakni mencapai 35,56 persen meskipun proporsinya menurun dibandingkan tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa ketertarikan masyarakat Lombok Tengah untuk bekerja pada sektor pertanian mulai menurun. Sedangkan penyerapan tenaga kerja di lapangan usaha perdagangan dan industri mengalami peningkatan di tahun 2018, dengan penyerapan tenaga kerja masing-masing sebesar 20,71 persen dan 17,09 persen. Perdagangan dan industri menjadi lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak kedua dan ketiga setelah pertanian.

Apabila dilihat dari pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja pada lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak, maka sebagian besar tenaga kerja pada lapangan usaha pertanian memiliki pendidikan SD ke bawah. Hanya 2,30 persen yang tamatan universitas. Begitu pula dengan lapangan usaha

Industri, sekitar 20,85 persen tenaga kerjanya memiliki latar belakang pendidikan SD ke bawah. Berbeda hal dengan lapangan usaha Perdagangan, 33,39 persen tenaga kerjanya berpendidikan SMK dan 30,36 persen yang berpendidikan SMA. Tenaga kerja yang memiliki ijazah Universitas dan Diploma lebih banyak terserap pada lapangan usaha Jasa.

Hampir separuh dari penduduk Lombok Tengah yang bekerja pada tahun 2018 berstatus berusaha baik berusaha sendiri, dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar maupun dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Proporsi tenaga kerja berstatus buruh/karyawan dan pekerja bebas hampir sama yaitu 19,82 persen dan 18,68 persen. Sedangkan yang berstatus pekerja keluarga masih cukup besar yaitu 13,65 persen.

**Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2018**

Lap. Usaha Utama	≤SD	SMP	SMA Umum	SMK	DI/II/I II	Universitas	Jml
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pertanian	52,74	27,90	22,70	10,57	8,36	2,30	36,56
Pertambangan dan Penggalian	0,29	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,29
Industri	20,85	20,12	9,86	10,20	0,00	6,17	17,09
Listrik, Gas, dan Air	0,00	0,39	0,74	4,80	0,00	0,00	0,45
Konstruksi	5,62	12,49	12,08	6,98	0,00	3,88	8,01
Perdagangan, Rumah makan dan Jasa Akomodasi	13,79	29,11	30,36	33,39	0,00	15,92	20,71
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	2,23	1,61	5,70	18,36	0,00	0,00	3,32
Lembaga Keuangan, Real Estat, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,00	1,28	0,64	4,12	0,00	6,59	1,03
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	4,48	7,09	17,06	11,58	91,64	65,14	12,54
JUMLAH	100,00						

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah

Penduduk yang bekerja dengan latar belakang pendidikan SD ke bawah sebagian besar berstatus berusaha, serta biasanya pada sektor informal. Begitu pula dengan penduduk dengan pendidikan SMP. Untuk penduduk yang berpendidikan SMA, status pekerjaan utamanya hampir berimbang antara berusaha dan sebagai buruh/karyawan. Berbeda halnya dengan yang

berpendidikan SMK lebih banyak berstatus buruh/karyawan mengingat tamatan SMK lebih memiliki keahlian dibanding dengan yang tamatan SMA karena pada saat sekolah kejuruan mereka dididik untuk siap kerja setelah menamatkan pendidikannya. Sedangkan penduduk yang berpendidikan Diploma dan Universitas lebih banyak berstatus sebagai buruh/karyawan mengingat lapangan kerja yang tersedia lebih banyak mensyaratkan yang berpendidikan Diploma maupun universitas dalam penerimaan tenaga kerjanya.

III.1.5. SASARAN 3 MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN

Sasaran tersebut diukur dengan 5 (Lima) indikator yaitu:

1. Rata-rata lama sekolah; R
2. Harapan lama sekolah H
3. PAUD terakreditasi A P
4. SD terakreditasi A S
5. SMP terakreditasi A S

Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2019	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2017	2018		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	6,52	6,88	5,96*	91,4	88,4	5,95	5,96	Buku Statistik Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019, Halaman: 38	Dinas Pendidikan
2	Harapan lama sekolah	Tahun	13,69	14,15	13,47*	98,4	96,7	13,13	13,47		
3	PAUD terakreditasi A	%	1,11	1,53	0	0	0	-	-	LKJIP dinas Pendidikan Tahun 2019 Hal: 12	

4	SD terakreditasi A	%	5,18	6,86	5,79	111,8	96,2	-	5,46	
5	SMP terakreditasi A	%	10,06	13,97	9,50	94,4	81,0	-	8,94	
Rata-rata						79,20 %	Kriteria 2019 : SEDANG			

Catatan: * Kondisi Tahun 2018, Data Tahun 2019 belum dipublikasikan oleh BPS

A. RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Perbandingan capaian indikator “Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)” Kabupaten Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional

Tahun	NASIONAL	Provinsi NTB	Kabupaten Lombok Tengah
2014	7,73	6,67	5,52
2015	7,84	6,71	5,54
2016	7,95	6,79	5,6
2017	8,10	6,9	5,95
2018	8,17	7,03	5,96

Sumber : Buku Statistik Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019, Halaman: 38 dan Buku Indeks

Pembangunan Manusia 2018, Halaman: 21 sebagaimana telah diunduh dari www.bps.go.id tanggal 7 Pebruari 2020

Program/ Kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “Rata-rata Lama sekolah”:

A. DINAS PENDIDIKAN

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program Pendidikan Anak Usia Dini
- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- Program Pendidikan Non Formal
- Program Pendidikan Luar Biasa
- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

B. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

C. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Program Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Pemuda dan Olahraga

Analisis :

Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Secara rata-rata, penduduk Kabupaten Lombok Tengah usia 25 tahun ke atas telah bersekolah selama 5,96 tahun atau sampai kelas 6 SD. Sedangkan penduduk NTB rata-rata bersekolah selama 7,03 tahun atau sampai kelas 2 SMP. Bila dibandingkan dengan nilai maksimum RLS sesuai ketentuan UNDP, nilai RLS Lombok Tengah masih sangat rendah.

Variabel yang mempengaruhi indikator RLS antara lain:

1. Kondisi lapangan / geografi wilayah(kesulitan menuju sekolah);
2. jenis kelamin;
3. Kondisi ekonomi ;
4. Tingkat kemiskinan penduduk;
5. Kurangnya layanan pendidikan (sarana prasarana)
6. Rendahnya motivasi orang tua dan siswa terhadap pendidikan;
7. Kurangnya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pendidikan, serta
8. Faktor sosial budaya.

Pendukung capaian kinerja indikator “RLS” di Kabupaten Lombok Tengah, antara lain:

1. Pembangunan prasarana pendidikan seperti ruang UKS, kamar mandi, ruang perpustakaan, tempat olahraga dan laboratorium di semua jenjang serta adanya rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan sehingga bisa digunakan untuk proses belajar mengajar
2. Pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah agar memenuhi kebutuhan masyarakat dan lebih nyaman untuk proses belajar mengajar;
3. Peningkatan kompetensi dan kualitas guru di jenjang SD dan SMP berupa pelatihan guru dan memberikan ijin/ beasiswa kepada para guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;

4. Perbaiki sarana transportasi (jalan) agar setiap wilayah di Kabupaten dapat terjangkau terutama sarana dan prasarana pendidikan;
5. Bimbingan konseling yang dilaksanakan oleh setiap sekolah untuk meningkatkan kesadaran, pembinaan dan motivasi belajar para siswa;
6. Guru melakukan kunjungan (visite) langsung kepada rumah wali murid / pengampu untuk meningkatkan kesadaran, pembinaan dan motivasi belajar para siswa dan atau wali murid/pengampu agar tetap bersekolah dengan baik. Kunjungan ini dilakukan terutama saat siswa melakukan/ mengalami suatu permasalahan yang berpotensi menimbulkan penurunan prestasi belajar siswa atau bahkan drop out.

Dokumentasi :



B. HARAPAN LAMA SEKOLAH

Perbandingan capaian kinerja Indikator “Angka Harapan Lama Sekolah” Lombok Tengah Dengan Provinsi NTB dan Nasional :

NO	TAHUN	LOMBOK TENGAH	NTB	NASIONAL
1	2016	12,82	13,16	-

2	2017	13,13	13,46	-
3	2018	13,47	13,47	-

Sumber: Buku Statistik Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019, Halaman: 38 dan Berita Resmi Statistik tentang Profil IPM Provinsi NTB 2018, No. 25/05/52/Th. XXII, 15 April 2019, Halaman: 4 sebagaimana telah diunduh dari www.ntb.bps.go.id tanggal 7 Pebruari 2020 .

Program/ kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “rata-rata lama sekolah”:

DINAS PENDIDIKAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 Program Pendidikan Anak Usia Dini
 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 Program Pendidikan Non Formal
 Program Pendidikan Luar Biasa
 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Analisis:

Harapan lama sekolah (HLS) penduduk Kabupaten Lombok Tengah untuk menikmati jenjang pendidikan selama 13,47 tahun atau harapannya baru mencapai tahun kedua di perguruan tinggi. Capain HLS Lombok Tengah sama dengan capaian Provinsi NTB. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang disuatu wilayah. Harapan lama sekolah merupakan indikator yang sangat penting karena berkaitan erat dengan peluang kesempatan kerja. Apalagi Lombok Tengah dengan progres pembangunan di sektor pariwisata, membutuhkan tenaga-tenaga siap pakai. Upaya lain yang perlu dilakukan yaitu peningkatan pelayanan pendidikan serta perbaikan pelayanan dasar di masyarakat.

Variabel yang mempengaruhi indikator HLS pada dasarnya sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi RLS antara lain:

1. Kondisi lapangan / geografi wilayah(kesulitan menuju sekolah);
2. jenis kelamin;
3. Kondisi ekonomi ;
4. Tingkat kemiskinan penduduk,;
5. kurangnya layanan pendidikan (sarana prasarana)
6. Rendahnya motivasi orang tua dan siswa terhadap pendidikan;

7. kurangnya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pendidikan, serta
8. faktor sosial budaya.

Pendukung capaian kinerja indikator “HLS” di Lombok Tengah antara lain:

1. Rehabilitasi dan pembangunan sarana pendidikan yang memadai dan dekat dengan pemukiman masyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan kebijakan sistem zonasi sekolah dalam penerimaan siswa baru;
2. Penyelenggaraan proses belajar mengajar yang ramah anak dan ramah gender di sekolah-sekolah. Hal ini untuk memastikan perlindungan dan pemberian rasa nyaman bagi seluruh peserta didik;
3. Pemberian bantuan dana pendidikan melalui BOS untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah sekaligus meringankan biaya pendidikan bagi siswa;
4. Pembangunan prasarana pendidikan seperti ruang UKS, kamar mandi, ruang perpustakaan, tempat olahraga dan laboratorium di semua jenjang serta adanya rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan sehingga bisa digunakan untuk proses belajar mengajar;
5. Pemberian bantuan sosial ekonomi kepada individu/ kelompok masyarakat yang disertai dengan upaya-upaya peningkatan kesempatan kerja melalui penyelenggaraan job fair, penggalakan investasi di daerah dll. Upaya ini merupakan salah satu upaya penanganan kemiskinan di daerah yang secara langsung dapat meningkatkan angka HLS di Lombok Tengah;

Dokumentasi :





C. PAUD TERAKREDITASI A, SD TERAKREDITASI A, SMP TERAKREDITASI A

Perbandingan capaian Indikator “PAUD terakreditasi A, SD terakreditasi A, SMP terakreditasi A” Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2019:

INDIKATOR	LOMBOK TENGAH	NTB	NASIONAL
Paud terakreditasi A	0	-	-
SD terakreditasi A	5,79	-	-
SMP terakreditasi A	9,5	-	-

Program/ kegiatan OPD yang berkaitan dengan capaian kinerja Indikator “PAUD terakreditasi A, SD terakreditasi A, SMP terakreditasi A”:

DINAS PENDIDIKAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Pendidikan Non Formal

Program Pendidikan Luar Biasa

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Analisis:

Akreditasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektivitas, efisiensi, produktivitas dan inovasinya. Serta untuk memberikan jaminan kepada publik bahwa sekolah tersebut telah diakreditasi dan menyediakan layanan pendidikan yang memenuhi standar akreditasi nasional.

PAUD TERAKREDITASI A

Pada tahun 2019 belum ada lembaga PAUD yang terakreditasi A. Indikator PAUD Terakreditasi A ditargetkan 1,11% dari 335 PAUD Formal dan terealisasi 22,39% (75 lembaga PAUD Formal terakreditasi B dan C). Jika mengacu kepada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2015-2019 jumlah lembaga PAUD terakreditasi pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 42.926 lembaga, sedangkan dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2016-2021, lembaga PAUD Terakreditasi pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 1,11% dari total 335 lembaga PAUD Formal. Sampai dengan tahun 2019 dari 335 lembaga PAUD Formal telah terakreditasi sebanyak 22,39% atau 75 lembaga. Akreditasi PAUD dilaksanakan sesuai dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini setiap lembaga PAUD wajib dilakukan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

Berbagai ikhtiar telah dilakukan dalam upaya pencapaian target sasaran, diantaranya penyediaan dana bagi penyelenggaraan dan pengembangan PAUD serta pengalokasian anggaran. Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran penyelenggaraan PAUD baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun APBN sebesar Rp. 11.156.345.367 terealisasi sebesar Rp.10.822.482.600,00 (97,00%) dari pagu anggaran. Dana tersebut dianggarkan untuk BOP bagi 853 lembaga PAUD Formal dan Non Formal, pelatihan berjenjang bagi guru PAUD, pelatihan K13, penyediaan APE, Honor bagi 1000 orang guru PAUD.

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja ini, antara Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan kegiatan antara lain:

- (1) Penambahan ruang kelas sekolah PAUD
- (2) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD
- (3) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah PAUD
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- (5) Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini
- (6) Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
- (7) Belanja Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)

Hambatan/ masalah yang menjasi penyebab belum tercapainya target Indikator “PAUD terakreditasi A, SD terakreditasi A, SMP terakreditasi A” antara lain:

1. Penilaian akreditasi dilaksanakan tiap lima tahun karena jangka waktu akrediasi adalah 5 (lima) tahun. Saat ini, masih berlaku hasil akreditasi yang lama sehingga belum ada yang mengajukan permohonan akreditasi ;
2. Sebagian besar PAUD diselenggarakan yayasan/ swasta yang tidak memiliki hubungan struktural hirarkis dengan pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan minimnya intervensi yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah dalam rangka akreditasi PAUD;
3. Pertambahan jumlah lembaga PAUD belum dibarengi dengan peningkatan kualitas manajemen penyelenggaran dan pelayanan PAUD;

SD / SMP TERKAREDITASI A

Akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan sekolah/madrasah. Sesuai pasal 8 Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah bahwa program dan satuan pendidikan wajib mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali kepada BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir.

Pada tahun 2019 ditargetkan 5,18% (31 SD) dari 604 SD mendapat Akreditasi A dan terealisasi sebesar 5,79% (35 SD). Sedangkan SMP

ditargetkan 10,06% (18 SMP) dari 179 SMP terakreditasi A dan terealisasi sebesar 9,50% pada Tahun 2019.

Pendukung capaian kinerja indikator SD / SMP terakreditasi A :

- Tingginya komitmen Pemerintah Daerah dalam menyediakan akses dan layanan pendidikan dasar bagi masyarakat khususnya penduduk usia sekolah, serta semakin banyak lembaga pendidikan SD/MI dan SMP/MTs yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat/yayasan yang berdampak kepada bertambahnya jumlah daya tampung pada SD/MI dan SMP/MTs
- Peningkatan kapasitas bagi tenaga pendidik dan kependidikan melalui penyelenggaraan Diklat, Tugas/ Ijin belajar, sosialisasi, studi banding dll;
- Adanya program akreditasi sekolah yang bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan proses belajar mengajar telah memenuhi standar yang telah ditentukan;
- Komitmen Pemkab. Lombok Tengah yang besar dalam dunia pendidikan inklusi yaitu mewajibkan sekolah umum untuk menerima pelajar berkebutuhan khusus;
- Gerakan Masyarakat Penuntasan Tributa dan Pemungutan Siswa Putus Sekolah (Gempita Perpus) yang kegiatannya melibatkan Forkopimda dan seluruh jajaran pendidikan.
- Gerakan perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan termasuk kekerasan yang terjadi di sekolah

Belum tercapainya target SD dan SMP terakreditasi A Tahun 2019 antara lain disebabkan oleh:

- 1) Belum terpenuhinya delapan standar nasional pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang meliputi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian: Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana, dan Standar Pembiayaan;
- 2) Penataan arsip dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan di sekolah yang tidak tertib;
- 3) Implementasi program dan kegiatan tidak sesuai RKS yang ada.

III.1.6. SASARAN 4 MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (Satu) indikator yaitu: Usia Harapan Hidup. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2019	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2017	2018		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	65,73	66,06	65,59*	99,8	99,5	65,01	65,59	Berita Resmi Statistik tentang Profil IPM Provinsi NTB 2018, No. 25/05/52/Th. XXII, 15 April 2019, Halaman: 5	LINTAS OPD
Rata-rata						99,8 %	Kriteria 2019 : BAIK				

Catatan : * Kondisi Tahun 2018. Data Tahun 2019 belum dipublikasikan oleh BPS.

Perbandingan capaian Indikator “Usia Harapan Hidup” Lombok Tengah Dengan Provinsi NTB Dan Nasional :

NO	TAHUN	LOMBOK TENGAH	NTB	NASIONAL
1	2016	65,01	65,48	70,90
2	2017	65,28	65,55	71,06
3	2018	65,59	65,87	71,20

Sumber: Berita Resmi Statistik tentang Profil IPM Provinsi NTB 2018, No. 25/05/52/Th. XXII, 15 April 2019, Halaman: 5 sebagaimana telah diunduh dari www.ntb.bps.go.id tanggal 7 Pebruari 2020

Program/ kegiatan yang berkaitan dengan indikator “Usia Harapan Hidup” antara lain:

A. DINAS KESEHATAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 Program Pengawasan Obat dan Makanan
 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Program Kebijakan dari manajemen pembangunan kesehatan
Program Jaminan Kesehatan Nasional
Program peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan

B. DINAS SOSIAL

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

C. DINAS KETAHANAN PANGAN

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplay pangan
Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan
Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia
Penyusunan neraca bahan makanan
Pelatihan dan penyuluhan pengolahan pangan alternatif
Peningkatan cadangan pangan pemerintah
Pengembangan dan Pemberdayaan Desa Mandiri pangan
Pembinaan Kawasan Mandiri Pangan
Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

D. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Program peningkatan pengendalian polusi
Program Pengelolaan Sampah

E. DINAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Analisis:

Pendukung capaian indikator kinerja “Usia Harapan Hidup” antara lain:

1. Sosialisasi gerakan hidup sehat masyarakat (GERMAS);
2. Sosialisasi pentingnya PHBS kepada sekolah, kantor/ instansi pemerintah/ swasta serta kepada masyarakat luas;
3. Pemberdayaan POSYANDU dalam peningkatan kesehatan masyarakat;

4. Pemberdayaan keluarga yang diinisiasi oleh PKK dan dharma wanita. Melalui pendekatan berbasis dasa wisma, PKK dan Dharma wanita dapat memberikan pembinaan, pelatihan dan pendampingan dalam mewujudkan keluarga yang sehat, aman dan sejahtera;
5. Adanya Gerakan ABSOR (aman, bersih, sehat dan religius). Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang aman, bersih, sehat dan religius.
6. Pembangunan fasilitas umum yang baik dan berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat. Contoh: pembangunan pasar, jalan raya, rambu-rambu lalu lintas, dll
7. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum terutama perlindungan dari tindakan kriminal/ kejahatan;
8. Pembantuan lembaga yang menyelenggarakan manajemen penanggulangan bencana yaitu BPBD, Dinas Ketahanan pangan, dll
9. Pemenuhan sarana prasarana pendukung pelayanan publik. Contoh: adanya kegiatan rehab Puskesmas agar prasarana Puskesmas lebih nyaman dan memadai dalam memberikan pelayanan kesehatan;
10. Adanya kegiatan standarisasi / akreditasi Puskesmas;
11. Peningkatan kapasitas SDM Puskesmas;
12. Kegiatan Monev ke Puskesmas secara rutin.

Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. AHH dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses hingga kualitas kesehatan. AHH selama lima tahun terakhir di Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, AHH Kabupaten Lombok Tengah mencapai 65,59 tahun, mengalami peningkatan 0,47 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Angka Harapan Hidup dan pertumbuhan Angka Harapan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014-2018

Tahun	Angka Harapan Hidup	Pertumbuhan Angka Harapan hidup
2014	64,45	0,23
2015	64,75	0,47
2016	65,01	0,40
2017	65,28	0,42
2018	65,59	0,47

Jika dibandingkan dengan AHH Provinsi Nusa Tenggara Barat, AHH Kabupaten Lombok Tengah masih berada dibawah AHH Provinsi Nusa Tenggara Barat yang nilainya 65,87 tahun. Begitu juga dengan pertumbuhan AHH yang berada dibawah laju pertumbuhan AHH Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup adalah kondisi kesehatan masyarakat yang terhindar dari berbagai penyakit. Angka kesakitan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah masih cukup tinggi yaitu 31,07%. Sedangkan Persentase Penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan menurut karakteristik di Kabupaten Lombok Tengah masih cukup rendah yaitu hanya 11,05 %. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan upaya-upaya preventif dalam menanggulangi penyakit seperti PHBS dan penataan lingkungan agar lebih sehat. Kesadaran masyarakat untuk bergabung dan aktif dalam jaminan kesehatan juga perlu ditingkatkan untuk membantu pembiayaan pengobatan jika masyarakat terkena atau menderita sakit.

Angka Kesakitan menurut Karakteristik, 2019

Karakteristik Jenis Kelamin	Angka Kesakitan
Laki-laki	31,69
Perempuan	30,52
Kelompok Pengeluaran	
40 Persen Terbawah	31,93
40 Persen Tengah	31,39
20 Persen Teratas	28,71
Lombok Tengah	31,07

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019, Halaman: 29

Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan menurut Karakteristik, 2019

Karakteristik Jenis Kelamin	Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan
Laki-laki	9,67
Perempuan	12,25
Kelompok Pengeluaran	
40 Persen Terbawah	8,07
40 Persen Tengah	11,63

20 Persen Teratas	15,52
Lombok Tengah	11,05

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019, Halaman: 30

Dokumentasi:



**III.1.7. SASARAN 5
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEMPATAN KERJA**

Sasaran tersebut diukur dengan 3 (Tiga) indikator yaitu: angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), . tingkat partisipasi angkatan kerja dan Pengeluaran per kapita disesuaikan.

Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2019	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2017	2018		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Angka PMKS	orang	3.112	1.092	9.319* (kondisi tahun 2016)	-99,5	-290,2	-	-	halaman 8, Bab V lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021	Dinas sosial
2	tingkat partisipasi angkatan kerja	%	73,80	74,65	66,97*	90,7	90,2	-	66,97	Buku Statistik ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018. Halaman : vii	Dinas tenaga kerja/ bappeda/ bps
3	Pengeluaran per kapita disesuaikan	Rp (ribu)/tahun	9.802	10.252	9.800*	100,0	97,7	-	9.800		BPS

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2019	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2017	2018		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
Rata-rata						30,42 %	Kriteria 2019 : SANGAT KURANG				

Catatan :

- *Angka PMKS Tahun 2016 (kondisi awal RPJMD) Dinas Sosial tidak dapat menyampaikan data jumlah/ angka PMKS Tahun 2017, 2018 dan 2019
- * "tingkat partisipasi angkatan kerja" dan "Pengeluaran per kapita disesuaikan" kondisi Tahun 2018. BPS belum mempublikasikan kondisi/ data Tahun 2019.

A. ANGKA PMKS

Perbandingan capaian kinerja Indikator "Angka PMKS" Lombok Tengah Dengan Provinsi NTB Dan Nasional :

NO	TAHUN	LOMBOK TENGAH	NTB	NASIONAL
1	2016	9.319	-	-
2	2017	-	-	-
3	2018	-	-	-

Catatan: angka PMKS Provinsi NTB dan Nasional tidak ada data.

Program/ kegiatan yang berkaitan dengan indikator Angka PMKS antara lain:

A. SAT POL PP

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

- Pengendalian keamanan lingkungan
- Operasi Penegakan PERDA

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

- Penyuluhan/Sosialisasi Perda, Tramtibmas terhadap Masyarakat/PKL/Pelajar

B. DINAS SOSIAL

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Analisis:

Salah satu faktor pendukung dalam penanganan masalah PMKS di Kabupaten Lombok Tengah adalah peran aktif Pemerintah Kabupaten/ Dinas Sosial dalam berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait upaya penanganan permasalahan permasalahan sosial yang ada di Daerah sehingga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Sosial mendapatkan berbagai Program Pemberdayaan, Rehabilitasi dan jaminan sosial bagi PMKS yang Sumber Pendanaanya berasal dari APBN maupun APBD II.

Capaian kinerja indikator “angka PMKS” ini didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini terlihat dalam visi, misi dan penjabaran dalam perencanaan pemerintah daerah;
2. Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD);
3. Adanya program/ kegiatan yang secara langsung bertujuan mengurangi kemiskinan seperti: rehab rumah tidak layak huni oleh dinas Perumahan dan Permukiman, kursus/ pelatihan keterampilan oleh BLK (Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi), Bantuan sosial kepada PMKS oleh Dinas Sosial, bantuan peralatan usaha bari UKM, dll
4. Adanya partisipasi Bazda, NGO dan CSR perusahaan-perusahaan dalam upaya penanggulanagn kemiskinan di daerah;
5. Peningkatan keterampilan masyarakat melalui kegiatan kursus-kursus yang dilaksanakan oleh BLK;
6. Pembinaan terhadap UMKM melalui pemberian modal, pelatihan, bantuan alat, sampai dengan pemasaran produk;
7. Perluasan lapangan kerja melalui proyek-proyek pembangunan dan pelaksanaan job fair di daerah.

Dokumentasi :



B. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

Perbandingan capaian kinerja Indikator “Tingkat Parisipasi Angkatan Kerja” Lombok Tengah Dengan Provinsi NTB dan Nasional :

NO	TAHUN	LOMBOK TENGAH	NTB	NASIONAL
1	2016	-	-	-
2	2017	69,31	-	-
3	2018	66,97	-	-

Catatan: angka TPAK Provinsi NTB dan Nasional tidak ada data.

Program/ kegiatan yang berkaitan dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja antara lain:

A. DINAS PENDIDIKAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 Program Pendidikan Anak Usia Dini
 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 Program Pendidikan Non Formal
 Program Pendidikan Luar Biasa
 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

B. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

C. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
 Program pengembangan industri kecil dan menengah
 Program pengembangan wilayah transmigrasi

D. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

E. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

Analisis:

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan proporsi jumlah penduduk angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja yaitu usia 15 tahun ke atas. Indikator ini menggambarkan sejauh mana peran serta penduduk

dalam kegiatan perekonomian wilayah. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah proporsi penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. TKK akan memberikan gambaran bagaimana besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja disuatu wilayah sehingga mencerminkan besarnya angkatan kerja terserap dalam lapangan pekerjaan yang tersedia.

TPAK Kabupaten Lombok Tengah berada di atas 60 persen artinya dapat dikatakan bahwa partisipasi tenaga kerja dalam pasar kerja masih tergolong cukup aktif dalam menggerakkan perekonomian.

Pendukung capaian kinerja indikator “TPAK” antara lain:

1. Bertambahnya investasi didaerah yang berdampak pada peningkatan jumlah lapangan kerja. Investasi ini dapat bersumber dari pemerintah maupun swasta pada sektor formal dan informal. Contoh : investasi di bidang pariwisata dengan adanya KEK Mandalika, berkembangnyadesa wisata di kab. Lombok Tengah;
2. Pelaksanaan job fair yang dapat menarik cukup banyak tenaga kerja;
3. Pembentukan LTSP-P2TKI (Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Adanya peningkatan jumlah kelompok usaha mikro kecil dan menengah serta pertumbuhan wirausaha baru;
5. Meningkatnya permintaan produk dari pemasaran secara *online* dan *offline* (promosi dalam daerah dan luar daerah);
6. Tersedianya lapangan kerja di dalam dan luar negeri;
7. Pelatihan/ kursus keterampilan yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) maupun yang dilaksanakan oleh lembaga kursus swasta;
8. Peran pemerintah desa dalam program pemberdayaan masyarakat. Program ini dapat meningkatkan lapangan kerja dan sekaligus keterampilan bekerja kepada para pencari kerja;

**TPAK dan TKK Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2014-2015 dan 2017-2018 (persen)**

Tahun	TPAK	TKK
(1)	(2)	(3)
2014	71,81	93,63
2015	67,41	92,58
2017	69,31	97,10

Tahun	TPAK	TKK
(1)	(2)	(3)
2018	66,97	96,92

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah (data diolah)

Menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2018 terdapat 670,88 ribu penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Lombok Tengah. Dari jumlah tersebut 66,97 persen merupakan angkatan kerja dan 33,03 persen merupakan penduduk bukan angkatan kerja, yaitu penduduk yang sedang bersekolah, mengurus rumahtangga, dan lainnya. Pada tahun 2018, angka TPAK Kabupaten Lombok Tengah menurun sebanyak 2,34 poin dibanding tahun 2017. Dari sisi TKK, pada tahun 2018 sebanyak 96,92 persen angkatan kerja yang terserap dalam lapangan pekerjaan yang tersedia. Angka ini mengalami penurunan 0,18 poin dibanding tahun 2017.

Peningkatan dan penurunan nilai TPAK dan TKK di Kabupaten Lombok Tengah dipengaruhi oleh beberapa variabel yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan atau penurunannya. Sonny Sumarsono dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Tahun 2009. Penerbit Graha Ilmu Yogyakarta. hal 76 sebagaimana dikutip oleh Hidayat Muhammad, (2014:33) Menjelaskan bahwa Ada beberapa faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja, yakni;

a. Jumlah Penduduk yang masih bersekolah.

Semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah, semakin kecil jumlah angkatan kerja dan semakin kecil TPAK. Jumlah penduduk yang bersekolah dipengaruhi oleh tingkatan penyediaan fasilitas pendidikan dan kondisi serta tingkat penghasilan keluarga.

b. Jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga.

Semakin banyak anggota dalam tiap-tiap keluarga yang mengurus rumah tangga semakin kecil TPAK.

c. Tingkat penghasilan keluarga

Keluarga berpenghasilan relatif terhadap biaya hidup cenderung memperkecil jumlah anggota keluarga untuk bekerja, jadi TPAK relatif rendah. Sebaliknya keluarga yang biaya hidupnya sangat besar relatif kepada penghasilannya cenderung untuk memperbanyak jumlah anggota keluarga untuk bekerja, jadi TPAK relatif meningkat.

d. Struktur Umur

Penduduk yang berumur muda umumnya tidak mempunyai tanggung jawab yang begitu besar sebagai pencari nafkah untuk keluarga. Bahkan mereka umumnya bersekolah. Penduduk dalam kelompok umur 25-55 tahun, terutama laki-laki, umumnya dituntut untuk mencari nafkah. Oleh sebab itu TPAK relatif besar. Selanjutnya penduduk di atas umur 55 tahun sudah mulai menurun kemampuan untuk bekerja, dan TPAK umumnya rendah.

e. Tingkat Upah

Semakin tinggi tingkat upah dalam masyarakat, semakin tinggi anggota keluarga yang tertarik masuk pasar kerja, atau dengan kata lain semakin tinggi TPAK.

f. Tingkat Pendidikan.

Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak waktu yang disediakan untuk bekerja. Terutama bagi para wanita, dengan semakin tinggi tingkat pendidikan, kecenderungan untuk bekerja semakin besar. Keadaan ini menunjukkan bahwa TPAK semakin besar pula.

g. Kegiatan perekonomian.

Program pembangunan disatu pihak menuntut keterlibatan lebih banyak orang dan dilain pihak program pembangunan menumbuhkan harapan-harapan baru. Harapan untuk dapat ikut menikmati hasil pembangunan tersebut dinyatakan dalam peningkatan partisipasi kerja. Semakin bertambahnya kegiatan perekonomian semakin besar TPAK.

Pendapat tersebut diatas sejalan dengan pendapat Simanjuntak (2001:45) dalam Fudloli dan Sukidin (2015;18) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi TPAK disuatu daerah adalah sebagai berikut :

1. Penduduk yang masih sekolah dan mengurus rumah tangga. Semakin besar penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga, maka semakin kecil jumlah angkatan kerja, sehingga semakin kecil pula TPAKnya.
2. Jenis kelamin. TPAK antara laki-laki dan perempuan berbeda, biasanya TPAK perempuan lebih rendah dibandingkan dengan TPAK laki-laki, hal ini erat kaitanya dengan sistem nilai masyarakat, bahwa laki-laki memikul kewajiban utama untuk mencari nafkah.
3. Tingkat umur. Penduduk yang berumur muda umumnya tidak mempunyai tanggung jawab sebagai pencari nafkah untuk keluarga, karena mereka pada umumnya bersekolah.

4. Tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah dalam masyarakat, semakin banyak anggota keluarga yang tertarik masuk pasar kerja, maka semakin banyak jumlah angkatan kerja yang mengakibatkan semakin tinggi juga TPAKnya.
5. Tingkat pendidikan. Semakin banyak penduduk yang bersekolah maka jumlah angkatan kerja semakin kecil sehingga TPAKnya rendah. Selain itu, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak peluang yang disediakan untuk bekerja dan nilai waktunya semakin mahal.

Dokumentasi :



C. PENGELUARAN PER KAPITA DISESUAIKAN

Perbandingan Capaian kinerja Indikator “Pengeluaran Perkapita disesuaikan” Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional :

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2018 mencapai 9,796 juta rupiah, meningkat 477 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan Provinsi NTB, pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Lombok Tengah lebih rendah 488 ribu rupiah.

Perbandingan Pengeluaran Perkapita disesuaikan

Tahun	Nasional	Provinsi NTB	Kabupaten Lombok Tengah
2014	9,903	8,99	8,65
2015	10,150	9,24	8,85
2016	10,420	9,58	9,08
2017	10,664	9,88	9,32
2018	11,059	10,28	9,80

Sumber : Buku Statistik Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019, Halaman: 38 dan Buku Indeks Pembangunan Manusia 2018, Halaman: 22 sebagaimana telah diunduh dari www.bps.go.id tanggal 7 Pebruari 2020

Program/ kegiatan yang berkaitan dengan indikator “Pengeluaran Perkapita disesuaikan” antara lain:

- A. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- B. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 - Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
 - Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
 - Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
 - Program pengembangan industri kecil dan menengah
 - Program pengembangan wilayah transmigrasi
- C. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
 - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- D. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
- E. DINAS PERTANIAN
 - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
 - Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
 - Program peningkatan produksi hasil peternakan
 - Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Analisis:

Indikator “pengeluaran perkapita disesuaikan” sangat berkaitan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pengeluaran perkapita masyarakat. PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta/dihasilkan disuatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut.

Pendukung capaian kinerja Indikator “pengeluaran perkapita disesuaikan” antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Tengah selalu positif dan meningkat. Kondisi ini berpengaruh langsung pada kondisi ekonomi masyarakat termasuk pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan hidup;
2. Ketersediaan faktor-faktor produksi terutama tenaga kerja yang cukup banyak di Kabupaten Lombok Tengah. Faktor produksi mempengaruhi kelancaran dan kapasitas produksi dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Disisilain, kegiatan ekonomi dalam masyarakat berpengaruh secara resiprokal dengan belanja/ pengeluaran masyarakat;
3. Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan Perikanan yang telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Tengah tahun 2018. Kondisi ini mencerminkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar ada pada sektor agraris terus mengalami pertumbuhan yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat;
4. Kondusifitas keadaan kamtrantibum di masyarakat yang memungkinkan aktifitas sosial ekonomi masyarakat dapat terus berjalan dengan baik.
5. Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah dapat menjadi pemicu/ penggerak perekonomian masyarakat. Secara umum, belanja kegiatan pemerintah merupakan salah satu penggerak utama dalam perekonomian di daerah. Contoh: Pembangunan dan rehab pasar tradisional diseluruh kecamatan bahkan di Desa Kopang Rembiga telah dilaksanakan pembangunan pasar tradisional modern terbesar di NTB. Pembangunan jalan, irigasi dan infrastruktur pelayanan dasar lain sesuai kebutuhan masyarakat, Pembinaan kepada UMKM, Pelatiha ketrampilan bagi pencari kerja, dll.

PDRB Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB Kabupaten Lombok Tengah atas dasar harga berlaku tahun 2018 mencapai 16,75 triliun rupiah, meningkat sebesar 6,09 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan terjadinya peningkatan volume produksi sekaligus perubahan harga barang dan jasa yang dihasilkan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai 11,92 triliun rupiah, meningkat 3,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

**PDRB Kabupaten Lombok Tengah atas dasar Harga Berlaku dan Konstan
2010 Tahun 2016-2018 (juta rupiah)**

Tahun	Berlaku	Konstan 2010
(1)	(2)	(3)
2016	14.423.751,17	10.854.980,04
2017*	15.789.214,15	11.551.693,67
2018**	16.750.495,68	11.918.408,40

* angka sementara

** angka sangat sementara

Aktivitas ekonomi yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah telah berperan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Tengah. Kondisi geografis Kabupaten Lombok Tengah sangat mendukung usaha pertanian untuk menghasilkan nilai tambah yang cukup tinggi.

Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tetap memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Tengah tahun 2018 yaitu mencapai 25,33 persen. Kategori Transportasi dan Pergudangan memiliki peranan terbesar kedua dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Tengah selama tahun 2018 yakni sebesar 19,35 persen dan selalu diatas 18 persen sejak beroperasinya Lombok Internasional Airport. Kemudian diikuti oleh kategori Konstruksi yang memberikan kontribusi sebesar 11,90 persen. Kategori ini selalu memberikan peranan di atas 10 persen dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini akibat dampak dari keberadaan Lombok Internasional Airport dan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu agenda prioritas pemerintah yaitu membangun infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia dan menyiapkan sarana yang mendukung kawasan ekonomi khusus Mandalika. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2018 memiliki peranan cukup besar mencapai 11,45 persen. Sementara kategori yang lain hanya memiliki peranan dibawah 6 persen dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Tengah.

Peranan Kategori terhadap PDRB Tahun 2016-2018 (persen)

Kategori	2016	2017*	2018**
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24,75	24,95	25,33
B Pertambangan dan Penggalan	3,79	3,91	3,99

C	Industri Pengolahan	4,85	4,78	4,66
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,12
F	Konstruksi	11,35	11,49	11,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,83	11,10	11,45
H	Transportasi dan Pergudangan	21,46	20,84	19,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,24	1,26	1,24
J	Informasi dan Komunikasi	1,39	1,42	1,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,93	2,03	2,11
L	Real Estat	3,67	3,67	3,76
M,N	Jasa Perusahaan	0,14	0,14	0,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,84	5,62	5,61
P	Jasa Pendidikan	4,42	4,41	4,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,19	2,17	2,29
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,97	2,02	2,06
PDRB		100,00	100,00	100,00

* angka sementara

** angka sangat sementara

III.1.8. TUJUAN 3 MENINGKATNYA PEREKONOMIAN DAERAH

Tujuan tersebut diukur dengan 2 (Dua) indikator yaitu: Laju Pertumbuhan Ekonomi dan indeks gini. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2019	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2017	2018		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,53	6,61	3,17 *	48,5	48,3	-	3,17	Buku Lombok Tengah dalam Angka Tahun 2019, Laju Pertumbuhan Ekonomi di Halaman 402 www.lomboktengahkab.bps.go.id	Bappeda/ bps
2	Indeks Gini	Poin	0,340	0,332	0,332 *	102,4	101,2	-	0,332		Bappeda/ bps
Rata-rata						75,4 %	Kriteria 2019 : SEDANG				

Ket: * Kondisi Tahun 2018. Data Tahun 2019 belum dipublikasikan oleh BPS

A. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Perbandingan Indikator “Laju Pertumbuhan Ekonomi” Lombok Tengah Dengan Provinsi NTB Dan Nasional :

Tahun	Nasional	Provinsi NTB	Kabupaten Lombok Tengah
2014	-	-	6,28
2015	-	-	5,60
2016	-	-	5,65
2017	-	-	6,42
2018	-	-	3,17

Catatan: capaian indikator laju pertumbuhan ekonomi NTB dan Nasional tidak ada data

Program/ kegiatan yang berkaitan dengan indikator “Laju Pertumbuhan Ekonomi” antara lain:

- A. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- B. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 - Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
 - Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
 - Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
 - Program pengembangan industri kecil dan menengah
 - Program pengembangan wilayah transmigrasi
- C. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
 - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- D. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
- E. DINAS PERTANIAN
 - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
 - Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
 - Program peningkatan produksi hasil peternakan
 - Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Analisis:

Pada Tahun 2018, pertumbuhan perekonomian Lombok Tengah melambat 3,17%. Hal ini disebabkan karena menurunnya produksi pertanian terutama tanaman pangan akibat kekeringan dan menurunnya produksi jasa transportasi akibat menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke NTB karena berkurangnya penumpang pesawat akibat gempa Lombok Tahun 2018.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014-2018 (%) adalah sebagai berikut: Tahun 2014= 6,28, Tahun 2015=5,60, Tahun 2016=5,65, Tahun 2017= 6,42, dan tahun 2018= 3,17. Sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah tahun 2018 didominasi oleh Perdagangan mencapai

0,62 persen. Kemudian diikuti oleh Lapangan usaha Konstruksi yang hampir sama peranannya dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah. Pertanian menyumbang 0,58 persen, sedangkan lapangan usaha lainnya hanya menyumbang dibawah 0,5 persen.

Pendukung capaian kinerja “laju pertumbuhan ekonomi” antara lain:

1. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM di daerah;
2. Sosialisasi dan pelatihan *entrepreneurship* kepada masyarakat;
3. Fasilitasi promosi produk UMKM dalam pelaksanaan pameran-pameran dan event-event regional/ nasional;
4. Peningkatan kualitas dan kemudahan dalam perizinan;
5. Adanya pembinaan dan pendampingan yang intensif terhadap UMKM di daerah;
6. Pelatihan/ diklat peningkatan kapasitas SDM UMKM di daerah
7. Intensitas promosi wisata oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang cukup tinggi;
8. Keberadaan obyek wisata alam dan budaya yang menarik;
9. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif;
10. Adanya event nasional maupun lokal yang dilaksanakan di Lombok Tengah. Contoh: event bau nyale, seminar/ pertemuan nasional dan internasional, pelaksanaan lomba/ pertandingan skala nasional/ internasional
11. Keberadaan Bandara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok Tengah sebagai pintu masuk utama di NTB;
12. Adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan seni budaya lokal. Contoh : pembentukan desa-desa wisata di Kabupaten Lombok Tengah

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pada tahun 2018, perekonomian Kabupaten Lombok Tengah mengalami perlambatan sebesar 3,17 persen. Hal ini karena menurunnya produksi pertanian terutama tanaman pangan dan menurunnya produksi jasa transportasi akibat dari menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Nusa Tenggara Barat yang berimbas pada berkurangnya jumlah penumpang pesawat akibat gempa yang melanda Nusa Tenggara Barat pada

tahun 2018. Meskipun demikian, ekonomi Kabupaten Lombok Tengah didorong oleh adanya investasi terutama investasi pada pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan gedung kantor pemerintah, kampus politeknik, pengembangan kawasan KEK Mandalika, serta perbaikan saluran irigasi maupun jalan raya.

Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Kategori Tahun 2016-2018 (persen)

Kategori		2016	2017*	2018**
(1)		(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,86	6,38	2,22
B	Pertambangan dan Penggalian	9,36	7,12	4,86
C	Industri Pengolahan	3,19	4,57	1,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,85	5,39	1,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,72	4,73	1,18
F	Konstruksi	8,68	7,03	4,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,12	7,93	5,60
H	Transportasi dan Pergudangan	5,74	6,14	(0,12)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,54	7,01	2,04
J	Informasi dan Komunikasi	8,62	8,02	5,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	11,11	10,54	6,87
L	Real Estat	6,54	6,81	5,04
M,N	Jasa Perusahaan	6,72	5,34	5,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,31	2,56	1,76
P	Jasa Pendidikan	6,01	5,62	5,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,78	6,02	8,04
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,25	6,81	5,38

PDRB	5,65	6,42	3,17
-------------	-------------	-------------	-------------

* angka sementara

** angka sangat sementara

Seluruh kategori pembentuk PDRB Kabupaten Lombok Tengah mengalami pertumbuhan yang positif selama tiga tahun terakhir meskipun di tahun 2018 mengalami perlambatan. Untuk kategori Transportasi dan Pergudangan yang mengalami kontraksi 0,12 persen pada tahun 2018 akibat dampak gempa yang melanda Lombok di tahun 2018. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,04 persen. Kemudian diikuti oleh kategori Jasa Keuangan dan Asuransi mencapai 6,87 persen dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,6 persen. Kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta hanya mampu tumbuh 4,83 persen di tahun 2018, begitupula dengan kegiatan pertambangan dan penggalian sebagai penopang kegiatan konstruksi tumbuh selaras sebesar 4,86 persen. Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Tengah melambat 2,22 persen.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat peranan suatu kategori terhadap total perekonomian Kabupaten Lombok Tengah adalah sumber pertumbuhan (*source of growth*). Dengan menghitung sumber pertumbuhan ekonomi dapat dilihat peranan suatu kategori dalam penciptaan laju pertumbuhan ekonomi.

Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2018 (persen)

Kategori	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,76	1,66	0,58
B Pertambangan dan Penggalian	0,39	0,31	0,21
C Industri Pengolahan	0,19	0,26	0,08
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,00	0,00
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,00
F Konstruksi	1,07	0,90	0,62
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,87	0,87	0,62

H	Transportasi dan Pergudangan	0,99	1,06	(0,02)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,10	0,08	0,02
J	Informasi dan Komunikasi	0,15	0,14	0,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,21	0,21	0,14
L	Real Estat	0,22	0,23	0,17
M,N	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,12	0,13	0,09
P	Jasa Pendidikan	0,26	0,25	0,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,14	0,15	0,20
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,14	0,16	0,12
PDRB		5,65	6,42	3,17

* angka sementara

** angka sangat sementara

Pada tabel di atas dapat dilihat sumber pertumbuhan Lombok Tengah terbesar dari kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yakni mencapai 0,62 persen. Kemudian diikuti oleh kategori Konstruksi yang juga menyumbang pertumbuhan 0,62 persen. Dan kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menyumbang pertumbuhan sebesar 0,58 persen. Tidak hanya penyumbang pertumbuhan terbesar, ketiga kategori tersebut juga penyumbang terbesar dalam struktur ekonomi Lombok Tengah. Untuk lebih meningkatkan perekonomian Lombok Tengah, pemerintah dapat mengembangkan ketiga kategori tersebut dengan melakukan inovasi dalam kegiatan produksi sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dari setiap kategori tersebut. Selain itu, kelestarian lingkungan juga harus tetap terjaga sehingga tidak menimbulkan masalah baru dalam pengembangan sektor ekonomi. Kategori selain ketiga kategori tersebut memiliki peranan dibawah 0,3 persen dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah selama tahun 2018.

Dokumentasi :



B. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Perbandingan Indikator “Indeks Gini” Lombok Tengah Dengan Provinsi NTB Dan Nasional :

Indeks Gini merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk menganalisa tingkat kesenjangan di suatu daerah. Nilai Gini Ratio yang terletak antara 0,50–0,70 menandakan pemerataan yang sangat timpang, sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36–0,49 menunjukkan kesenjangan sedang, sementara apabila nilai Gini terletak diantara 0,20–0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata).

Perbandingan Indikator Gini Ratio Kabupaten Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019 (maret)
1	Lombok Tengah	0,393	0,352	0,348	0,332	
2	NTB	0,368	0,359	0,371	0,372	
3	Nasional	0,402	0,394	0,391	0,384	0,382

Progam/ kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “Indeks gini” antara lain:

- A. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- B. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 - Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
 - Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
 - Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
 - Program pengembangan industri kecil dan menengah
 - Program pengembangan wilayah transmigrasi
- C. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
 - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- D. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

- E. DINAS PERTANIAN
 - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
 - Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
 - Program peningkatan produksi hasil peternakan
 - Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
- F. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 - Program pengembangan Ekonomi pedesaan
 - Program Pemberdayaan lembaga adat perdesaan
 - Program Peningkatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
 - Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

Analisis:

Dalam empat tahun terakhir, kesenjangan pendapatan di Kabupaten Lombok Tengah dalam kategori sedang dan cenderung bergerak kearah pemerataan. Penurunan tertinggi terjadi pada periode 2015-2016 sebesar 0,041 point meskipun mengalami pelambatan pada periode berikutnya. Namun pada tahun 2018 tingkat penurunan kesenjangan menunjukkan perbaikan yaitu mampu turun sebesar 0,015 dari tahun 2017 dan tingkat kesenjangan di Kabupaten Lombok Tengah masih di bawah gini ratio Provinsi NTB.

Pendukung pemerataan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah untuk mengurangi indeks gini antara lain dilakukan melalui beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembagian zona pembangunan dan pembinaan wilayah pemerintahan menjadi 3 (tiga) zona yaitu zona “aik meneng”, zona “tunjung tilah” dan zona “empak bau”. Pembentukan zona ini berfungsi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan tentang pemetaan, fokus, perencanaan pembangunan serta penetapan pembagian daerah binaan bagi pemerintah daerah;
2. Pembentukan RPJMD dan RTRW sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan secara merata dan adil sesuai potensi dan kondisi wilayah masing-masing;
3. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat dusun, desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten. Musrenbang merupakan instrumen untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat agar mendapat pendanaan dari pemerintah maupun swadaya masyarakat. Penyerapan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang merupakan salah satu upaya dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat atau antar wilayah;
4. Pemanfaatan dana desa dan dana kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa / kelurahan. Pemerintah Kabupaten memberikan arahan, pendampingan, pembinaan dan monev terhadap penggunaan dana desa/ dana kelurahan agar sebesar-besarnya memberikan manfaat kepada kesejahteraan masyarakat secara maju dan merata;
5. Upaya penambahan jumlah/ nilai investasi di daerah yang berdampak pada peningkatan jumlah lapangan kerja. Contoh : investasi di bidang pariwisata dengan adanya KEK Mandalika;
6. Pembantuan dan pembinaan terhadap kelompok usaha mikro kecil dan menengah serta pertumbuhan wirausaha baru;
7. Pembinaan dalam manajemen pemasaran produk secara online dan offline (promosi dalam daerah dan luar daerah);
8. Penyelenggaraan transmigrasi dan peningkatan kualitas pelayanan tenaga kerja ke luar negeri;
9. Penyelenggaraan pelatihan/ kursus keterampilan yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK);

10. Peningkatan peran serta pemerintah desa dalam program pemberdayaan masyarakat. Program ini dapat meningkatkan lapangan kerja dan sekaligus keterampilan bekerja kepada para pencari kerja;

III.1.9. SASARAN 6 MENINGKATNYA NILAI PERDAGANGAN, JASA UNGGULAN DAN INVESTASI DAERAH

Sasaran tersebut diukur dengan 2 (Dua) indikator yaitu: Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2019	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2017	2018		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	4,27	4,68	3,52	82,4	78,7	4,69	1,47	Buku Kabupaten Lombok Tengah Dalam Angka 2020, Halaman : 134	Bappeda/ bps/ dinas perindag
2	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum	%	8,18	8,81	2,60	31,8	31,6	7,0	2,04		Bappeda/ bps/ dinas parbud
Rata-rata						57,11 %	Kriteria 2019 : KURANG				

A. LAJU PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

Perbandingan Indikator “laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan” dan “Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum” Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional :

Tahun	Lombok Tengah	NTB	Nasional
laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan			
2018	1,47	-	-
Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum			
2018	2,04	-	-

Catatan: "laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan" dan "Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum" Provinsi NTB dan nasional tidak ada data

Program/ kegiatan OPD yang berkaitan dengan capaian kinerja indikator "laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan" dan "Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum" antara lain:

- A. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

- B. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 - Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
 - Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
 - Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
 - Program pengembangan industri kecil dan menengah
 - Program pengembangan wilayah transmigrasi

- C. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
 - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

- D. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

- E. DINAS PERTANIAN
 - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
 - Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
 - Program peningkatan produksi hasil peternakan
 - Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

- F. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 - Program pengembangan Ekonomi pedesaan
 - Program Pemberdayaan lembaga adat perdesaan
 - Program Peningkatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
 - Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

Analisis:

PDRB perkapita dapat mengindikasikan perekonomian masyarakat. Selama lima tahun terakhir, PDRB per kapita Lombok Tengah selalu di atas 12 juta rupiah/tahun. Pada tahun 2018, PDRB per kapita Lombok Tengah mencapai 17,83 juta rupiah. Ini menunjukkan secara rata-rata setiap penduduk Lombok

Tengah menerima pendapatan sebesar 17,83 juta rupiah selama tahun 2018. PDRB per kapita tumbuh melambat 5,12 persen di tahun 2018. Hal ini karena kekeringan yang melanda Lombok Tengah dan dampak gempa Lombok tahun 2018 yang berpengaruh terhadap sektor pariwisata NTB.

Perkembangan PDRB Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014-2018

Tahun	PDRB perkapita (juta Rp)	Laju pertumbuhan PDRB (%)
2014	1291	12,67
2015	14,38	11,35
2016	15,64	8,79
2017	16,96	8,44
2018	17,83	5,12

Sumber : Buku Statistik Daerah Kabupaten Lombok Tengah 2019, Halaman: 76

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lombok Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2014–2018

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2014	2015	2016	2017*	2018*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry & Fishing</i>	5,03	5,85	2,86	6,38	2,22
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining & Quarrying</i>	8,98	7,13	9,36	7,12	4,86
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	4,23	2,32	3,19	4,57	1,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity & Gas</i>	39,55	4,42	9,85	5,39	1,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities</i>	7,10	4,16	4,72	4,73	1,18
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	7,83	7,09	8,68	7,03	
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles</i>	7,84	5,40	8,12	7,93	5,60
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation & Storage</i>	6,36	4,25	5,74	6,14	(0,12)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation & food</i>	8,59	6,30	9,54	7,01	2,04

Service Activities						
J	Informasi dan Komunikasi/Information & Communication	9,84	8,92	8,62	8,02	5,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial & Insurance Activities	7,85	7,96	11,11	10,54	6,87
L	Real Estat/Real Estate Activities	7,14	6,93	6,54	6,81	5,04
M,N	Jasa Perusahaan/Bussiness Activities	6,97	5,52	6,72	5,34	5,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration & Defence; Compulsory Social Security	4,02	3,64	2,31	2,56	
P	Jasa Pendidikan/Education	4,58	7,12	6,01	5,62	5,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	7,01	6,56	5,78	6,02	8,04
R,S,T, U	Jasa lainnya/Other Service Activities	6,98	6,37	6,25	6,81	5,38
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		6,28	5,60	5,65	6,42	3,17

* **Angka sementara/Preliminary Figures**

** **Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures**

Sumber : Buku PDRB Kabupaten Lombok Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018, Halaman : 132

Penghambat pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum di Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

1. Penurunan pertumbuhan ekonomi Tahun 2019;
2. Kondisi masyarakat Lombok Tengah yang dominan bersifat agraris dan belum mengarah pada sektor industri. Masih dominannya sektor pertanian sebagai bidang yang digeluti masyarakat menyebabkan perhatian terhadap sektor industri pengolahan belum berkembang dengan baik;
3. Keterbatasan bahan baku industri yang memenuhi standar tertentu dan terjamin kontinuitas pasokan sepanjang tahun;
4. Masih kurangnya inovasi dan kapasitas SDM dalam melakukan identifikasi potensi, pengolahan dan pemasaran hasil industri sektor pengolahan;
5. Keterbatasan modal usaha, karena industri pengolahan dipastikan membutuhkan sarana prasarana serta modal awal yang cukup untuk menjalankan suatu usaha;
6. Masih kurangnya jaringan/ hubungan usaha dengan industri pengolahan di daerah lain yang menyulitkan akses modal, pemasaran dan *transfer of knowledge*;

7. Bencana gempa bumi Tahun 2018 di Pulau Lombok yang mengakibatkan banyak korban jiwa serta kerusakan pada rumah masyarakat dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, bencana gempa bumi tersebut juga mengakibatkan penurunan jumlah wisatawan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata daerah.

Struktur perekonomian Lombok Tengah Tahun 2018 masih sama seperti tahun 2017. Lapangan usaha pertanian masih mendominasi perekonomian Lombok Tengah tahun 2018. Lapangan usaha ini berperan 25,33 persen. Diikuti Jasa Transportasi dan Pergudangan, yang menyumbang 19,35 persen dalam pembentukan ekonomi Lombok Tengah. Kontribusi lapangan usaha ini menurun dibanding tahun sebelumnya akibat dampak gempa Lombok tahun 2018. Konstruksi masih berada pada posisi ketiga dalam pembentukan ekonomi Lombok Tengah, menyumbang sebesar 11,90 %. Lapangan usaha dan perdagangan menyumbang 11,45 %. Sedangkan lapangan usaha lainnya hanya menyumbang dibawah 6%.

Kegiatan industri adalah kegiatan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Kabupaten Lombok Tengah menjadi salah satu sentral industri kecil dan menengah. Pada tahun 2018, jumlah industri kecil dan menengah (IKM) mencapai 42,6 ribu unit usaha. Kondisi ini meningkat jika dibandingkan dengan jumlah usaha di tahun 2017. Jika dirinci berdasarkan sektor industrinya, jumlah industri kerajinan terbanyak selama tahun 2018 mencapai 25,46 ribu unit usaha atau sekitar 59,75 persen dari seluruh IKM yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Disusul industri Sandang sebanyak 7,99 ribu unit usaha dan industri Agro sebanyak 6,21 ribu unit usaha. Peningkatan usaha IKM ini terjadi pada industri kerajinan yang mengalami peningkatan sekitar 35,53 persen dari tahun lalu.

Jenis Industri	2017	2018
<i>Industri Agro</i>	6 304	6 210
<i>Industri Sandang</i>	8 034	7 986
<i>Industri Kimia dan Bahan Bangunan</i>	1 503	1 714
<i>Industri Kerajinan</i>	18 789	25 464
Logam Mesin Elektronika dan Aneka	726	1247
TOTAL	35 356	42 621

Dokumentasi:



**III.1.10. SASARAN 7
MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING SEKTOR AGRARIS
SERTA KETAHANAN PANGAN**

Sasaran tersebut diukur dengan 2 (Dua) indikator yaitu: Rata-rata Nilai Tukar Petani dan skor pola pangan harapan . Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2019	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2017	2018		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Rata-rata Nilai Tukar Petani	Poin	105,28	105,69	104,36*	99,1	98,9	-	-	halaman 8, Bab V lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021	Bappeda/ bps/ dinas pertanian
2	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	85,6	86	90,7	106,0	105,7	-	-	Laporan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020	Dinas ketahanan pangan
Rata-rata						102,54 %	Kriteria 2019 : SANGAT BAIK				

Catatan: * Nilai Tukar Petani Kondisi Tahun 2016. Dinas Pertanian tidak dapat menyampaikan data NTP Tahun 2017, 2018 dan 2019.

A. NILAI TUKAR PETANI

Perbandingan capaian indikator “Nilai Tukar Petani” Lombok Tengah dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional

Tahun	Nasional	Provinsi NTB	Lombok Tengah
2016	-	-	104,36
2017	-	-	-

2018	-	-	-
2019	103,22	113,40 (agustus 2019)	-

Sumber: Berta Resmi Statistik tentang Perkembangan Indeks Harga Konsumen/ Inflasi,
No.69/09/Th. XXII, 2 September 2019, Halaman: 8 . Berita resmi statistik BPS Provinsi
NTB ,
Tanggal 02 September 2019

Program/ kegiatan OPD yang berkaitan dengan capaian kinerja indikator “nilai tukar petani” antara lain:

A. DINAS PERTANIAN

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
Program peningkatan produksi hasil peternakan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

B. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
Program pengembangan industri kecil dan menengah
Program pengembangan wilayah transmigrasi

C. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program pembangunan jalan dan jembatan
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pemanfaatan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
Program Pengembangan Keciptakarya
Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum

Analisis

Nilai Tukar Petani sangat dipengaruhi oleh produktivitas padi, luas lahan, pendidikan (tahun), jumlah anggota keluarga petani (jiwa), harga gabah (rupiah), harga benih (rupiah), biaya pupuk, biaya pestisida, biaya tenaga kerja, pengeluaran pangan rumah tangga petani (rupiah/bulan) dan pengeluaran non

pangan rumah tangga petani (rupiah/bulan). Perubahan terhadap variabel tersebut diatas dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan nilai tukar petani di Kabupaten Lombok Tengah.

Pendukung capaian kinerja “nilai tukar petani” antara lain:

1. Kondisi geografis dan luas areal pertanian di Kabupaten Lombok Tengah cukup besar. Bahkan Lombok Tengah merupakan salah satu daerah lumbung pangan terutama komoditi padi;
2. Upaya intensifikasi pertanian secara modern yang didukung dengan penyuluhan yang intensif;
3. Tradisi dan budaya masyarakat Lombok Tengah bersifat agraris;
4. Pelatihan dan peningkatan kapasitas petani;
5. Pemberian penyuluhan secara intensif kepada petani;
6. Pemberian bantuan peralatan pertanian seperti traktor, alat pembasmi hama, alat panen dll;
7. Pemberian pupuk bersubsidi kepada petani;
8. Pembentukan kelompok-kelompok tani di masyarakat;
9. Pemberian bantuan bibit dan peralatan pertanian kepada kelompok tani;
10. Penyediaan bibit-bibit unggul pertanian (tanaman/ hewan);
11. Pengembangan dan Pemberdayaan Desa Mandiri pangan;
12. Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

Dokumentasi



B. POLA PANGAN HARAPAN

Perbandingan capaian indikator “Pola Pangan Harapan” Lombok Tengah dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional

Tahun	Lombok Tengah	NTB	Nasional
2015	84,8	86,2	85,2
2016	85	94,34	86,0
2017	80,8	83,30	88,0
2018	85,5	89,88	
2019	90,7		

Sumber: Laporan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lombok Tengah Tahun 2019

Program/ kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “Pola Pangan Harapan” antara lain:

DINAS KETAHANAN PANGAN

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

- Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplay pangan
- Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
- Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan
- Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok
- Peningkatan mutu dan keamanan pangan
- Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia
- Penyusunan neraca bahan makanan
- Pelatihan dan penyuluhan pengolahan pangan alternatif
- Peningkatan cadangan pangan pemerintah
- Pengembangan dan Pemberdayaan Desa Mandiri pangan
- Pembinaan Kawasan Mandiri Pangan
- Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

Analisis

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Untuk mengetahui pola konsumsi masyarakat kabupaten Lombok Tengah. Pada Tahun 2019, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan analisis PPH dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000 . PPH Kabupaten Loteng pada tahun 2019 sebesar 90,7 point dari target 87 point, artinya terjadi

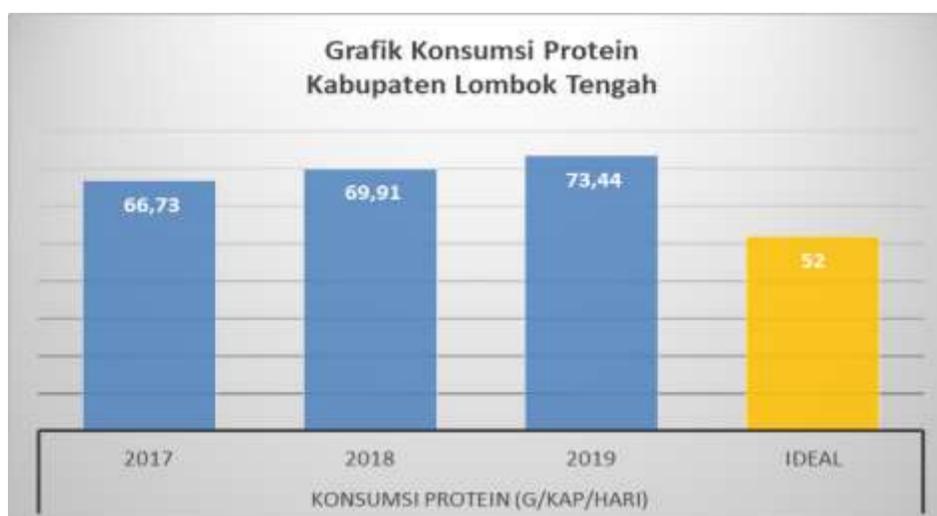
peningkatan sebesar 4,25 % sedangkan PPH ideal sebesar 100%.. Selain itu, Konsumsi Energi dan Protein selama 3 tahun terakhir berada diatas standar Angka Kecukupan Gizi yaitu 2000 kilo kalori untuk energy dan 52 gram untuk protein.

Pendukung pencapaian indikator “skor pola pangan harapan” di Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

1. Ketersediaan lahan pertanian yang cukup luas;
2. Adat budaya masyarakat yang bersifat agraris dan telah mempraktekkan sistem ketahanan pangan sejak dahulu. Hal ini tercermin dari bentuk bangunan khas masyarakat sasak berupa lumbung padi tempat menyimpan hasil-hasil pertanian.
3. Varietas/ jenis tanaman pangan yang beragam/ variatif;
4. Sosialisasi dan penyuluhan yang intensif;
5. Program pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat;
6. Pembangunan lumbung-lumbung pangan oleh pemerintah daerah;
7. Pelatihan dan penyuluhan pengolahan pangan alternatif
8. Pengembangan dan Pemberdayaan Desa Mandiri pangan
9. Pembinaan Kawasan Mandiri Pangan
10. Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

Adapun perkembangan PPH di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada grafik-grafik sebagai berikut:





Untuk menunjang pencapaian ketahanan pangan, Kabupaten Lombok Tengah juga telah melakukan Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Tahunan dilakukan dengan menggunakan data statistik pada tahun sebelumnya. Data yang dihimpun untuk mendukung analisis SKPG tahunan meliputi 3 (tiga) aspek/pilar ketahanan pangan, yaitu 1) aspek ketersediaan pangan; 2) aspek akses pangan; dan 3) aspek pemanfaatan pangan

Berdasarkan hasil analisis data SKPG tahunan (Januari – Desember 2019), maka dapat disimpulkan bahwa situasi pangan dan gizi di Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

1) Ketersediaan Pangan

Dari aspek ketersediaan pangan, semua kecamatan dalam kondisi aman (hijau). Ini terjadi karena analisis menunjukkan bahwa rasio ketersediaan terindikasi tinggi.

2) Akses Pangan

Dari aspek akses pangan, seluruh kecamatan dalam kondisi rawan, kondisi ini disebabkan oleh tingginya rasio keluarga miskin terhadap jumlah keluarga di masing-masing kecamatan.

3) Pemanfaatan Pangan

Dari aspek pemanfaatan pangan, seluruh kecamatan Kabupaten Lombok Tengah dalam aman (warna hijau).

4) Komposit

Hasil analisis komposit dipengaruhi oleh aspek ketiga aspek yaitu aspek ketersediaan, aspek akses dan aspek pemanfaatan pangan. Sesuai dengan hasil analisis komposit menunjukkan dalam kondisi rawan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut :

- Tim SKPG perlu melakukan investigasi untuk menentukan tingkat dan kedalaman kejadian kerawanan pangan dan gizi di lapangan;
- Bila kondisi kerawanan pangan cukup dalam, maka perlu dilakukan intervensi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan skor PPH di Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan bertujuan untuk mewujudkan penyediaan aneka ragam pangan sehingga konsumsi pangan masyarakat lebih beragam, bergizi seimbang dan aman. Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan tahun 2019 adalah 12 Kelompok KK Miskin dan 1 Kelompok Masyarakat di Kawasan Kumuh di Lingkungan Meteng Kelurahan Prapen Kecamatan Praya di Kabupaten Lombok Tengah.
 - a. Pengembangan tanaman sayuran dalam polybag di pekarangan anggota kelompok telah dilaksanakan. Seluruh kelompok telah melakukan pembibitan di rumah bibit dan hasilnya ditanam dalam polybag.
 - b. Pengembangan ternak ayam KUB telah dilaksanakan di setiap KK Miskin masing-masing sebanyak 40 ekor ayam KUB.

- c. Tanaman buah-buahan yang disalurkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, telah ditanam oleh KK Miskin. Setiap KK mendapatkan 3 bibit Jambu Kristal.
2. Kegiatan pelatihan Demonstrasi pengolahan pangan alternatif dilaksanakan sebanyak 2 angkatan dengan peserta 60 orang dari Kelompok Wanita Tani yg dapat bantuan alat pengolahan pangan.
3. Kegiatan peningkatan cadangan pangan pemerintah pada tahun 2019 sebanyak 15 ton dengan pembelian beras kelas medium. Sistem penyimpanan dilakukan dengan kerjasama dengan Gapoktan Binaan Dinas Ketahanan Pangan. Dalam perjanjian kerjasama tersebut jumlah beras yang dititip, tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak. Setiap pemerintah membutuhkan beras maka gapoktan harus siap menyediakan beras yang dibutuhkan. Jumlah cadangan pemerintah sampai dengan Desember tahun 2019 sebanyak 41.120 kg. Jumlah ini terdiri dari saldo beras tahun 2018 sebanyak 26.370 kg dan pembelian tahun 2019 sebanyak 15.000 kg sehingga berjumlah 41.120 kg. Beras cadangan pemerintah ini dititip di dua Gapoktan yaitu Gapoktan Usaha Bersama sebanyak 26.370 kg dan Gapoktan Patuh Bersama sebanyak 14.750 kg.
4. Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan untuk pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan sarana pendukung lainnya .yaitu berupa Gudang Lumbung Pangan, Lantai Jemur , Rumah RMU dan Mesin RMU masing-masing 1 unit. Lokasi pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat yaitu di Kelompok Tani Harapanan Bersama Desa Jango Kecamatan Janapria dan Gapoktan Sopok Angen Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang
5. Kegiatan Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

Dokumentasi:



**III.1.11. TUJUAN 4
MENINGKATNYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN
KETERPADUAN KAWASAN DAN ANTAR KAWASAN**

Tujuan tersebut diukur dengan 1 (Satu) indikator yaitu: Indeks Wiliamson. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2019	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2017	2018		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Indeks Wiliamson	Poin	0,40	0,39	0,40	100,0	97,4	-	-	Kertas Kerja Hasil penghitungan Indeks Wiliamson Kab. Lombok Tengah Tahun 2019. Bappeda Lombok Tengah	Bappeda/ bps
Rata-rata						100 %	Kriteria 2019 : BAIK				

Perbandingan capaian indikator “indeks wiliamson” Kabupaten Lombok Tengah dengan Provinsi dan Nasional:

Tahun	Lombok Tengah	NTB	Nasional
2019	0,40	-	-

Catatan: Data Indeks Wiliamson NTB dan Nasional Tahun 2019 tidak ada.

Program / Kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “indeks wiliamson” antara lain:

A. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

B. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
Program pengembangan industri kecil dan menengah
Program pengembangan wilayah transmigrasi

C. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

D. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

E. DINAS PERTANIAN

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
Program peningkatan produksi hasil peternakan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

F. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program pembangunan jalan dan jembatan
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pemanfaatan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
Program Pengembangan Keciptakarya
Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum

G. DINAS PERKIM

Program Pengembangan Perumahan
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program Pengembangan, Pengelolaan Permukiman dan Lingkungan

H. DINAS SOSIAL

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

I. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program pengembangan Ekonomi pedesaan
Program Pemberdayaan lembaga adat perdesaan
Program Peningkatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

Analisis:

Indeks Williamson adalah suatu indeks yang didasarkan pada ukuran penyimpangan pendapatan per kapita penduduk tiap wilayah dan pendapatan perkapita nasional. Jadi, Indeks Williamson ini merupakan suatu modifikasi dari standard deviasi. Dengan demikian, makin tinggi Indeks Williamson berarti kesenjangan wilayah semakin besar, dan sebaliknya. Selanjutnya Williamson menganalisis hubungan antara kesenjangan wilayah dengan tingkat perkembangan ekonomi.

Nilai Indeks Williamson berkisar antara 0 – 1 (positif). Semakin besar nilai indeksnya, maka semakin besar juga tingkat kesenjangan pendapatan antar wilayah. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeksnya, maka semakin kecil pula tingkat kesenjangan yang terjadi di wilayah tersebut. Ketidakmerataan tinggi terjadi pada nilai indeks diatas 0,50. Sedangkan ketidakmerataan dikatakan rendah apabila nilai indeksnya dibawah 0,50.

Faktor yang mempengaruhi indeks wiliamson (Damarjanti;2010):

1. Pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dari beberapa variabel antara lain: Produk Domestik Bruto (PDB), Pendapatan Per Jam Kerja, dan Harapan Hidup Waktu Lahir
2. Tingkat Pengangguran
3. APK SMA
4. Aglomerasi (pemusatan aktivitas) produksi

Menurut Sjafrizal (2012) dalam Islami (2018), faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah yaitu 1) perbedaan sumber daya alam, 2) faktor demografis termasuk kondisi tenaga kerja, 3) alokasi dana pembangunan antar wilayah baik investasi pemerintah maupun investasi swasta, 4) konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan 5) mobilitas barang dan jasa Investasi merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Indeks Wiliamson di Kabupaten Lombok Tengah termasuk dalam kriteria rendah. Artinya ketidakmerataan / kesenjangan pendapatan antar wilayah (kecamatan) di Lombok Tengah masih rendah. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh kondisi sumber daya alam antar kecamatan yang relatif serupa / merata serta mobilitas barang, jasa dan investasi yang merata di seluruh wilayah kecamatan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang cukup baik sesuai dengan pertumbuhan PDRB juga selalu meningkat.

Pendukung capaian kinerja indikator “indeks wiliamson” di Kabupaten Lomok Tengah antara lain:

1. Pembagian zona pembangunan dan pembinaan wilayah pemerintahan menjadi 3 (tiga) zona yaitu zona “aik meneng”, zona “tunjung tilah” dan zona “empak bau”. Pembentukan zona ini berfungsi pada pemetaan dan fokus pembangunan, perencanaan pembangunan serta daerah binaan bagi pemerintah daerah;

2. Pembentukan RPJMD dan RTRW sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan secara merata dan adil sesuai potensi dan kondisi wilayah masing-masing;
3. Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat dusun, desa, kecamatan hingga tingkat Kabupaten. Musrenbang merupakan instrumen untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat agar mendapat pendanaan dari pemerintah maupun swadaya masyarakat. Penyerapan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang merupakan salah satu upaya utama dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat atau antar wilayah;
4. Penyelarasan rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah dengan rencana dan pelaksanaan pembangunan nasional, provinsi dan desa. Hal ini sangat penting untuk menjamin keterpaduan penyelenggaraan pembangunan serta menghindari tumpang tindih perencanaan/ pemangunan di daerah;
5. Kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah secara kontinyu untuk memastikan pelaksanaan pembangunan oleh tiap OPD dapat berjalan lancar sesuai perencanaan yang telah ditetapkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat;
6. Pemanfaatan Dana Desa dan dana kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa / kelurahan. Pemerintah Kabupaten memberikan arahan, pendampingan, pembinaan dan monev terhadap penggunaan dana desa/ dana kelurahan agar sebesar-besarnya memberikan manfaat kepada kesejahteraan masyarakat secara maju dan merata;
7. Upaya penambahan jumlah/ nilai investasi di daerah yang berdampak pada peningkatan jumlah lapangan kerja. Contoh : investasi di bidang pariwisata dengan adanya KEK Mandalika;
8. Pembantuan dan pembinaan terhadap kelompok usaha mikro kecil dan menengah serta pertumbuhan wirausaha baru;
9. Pembinaan dalam manajemen pemasaran produk online dan offline (promosi dalam daerah dan luar daerah);
10. Penyelenggaraan transmigrasi dan peningkatan kualitas pelayanan tenaga kerja ke luar negeri;
11. Penyelenggaraan pelatihan/ kursus keterampilan yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK);

DALAM MENDUKUNG KONEKSITAS WILAYAH

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (Satu) indikator yaitu: Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2019	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2017	2018		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis	%	70,87	79,11	60,62*	85,5	78,1	-	-	halaman 8, Bab V lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021	Dinas PU
Rata-rata						85,5 %	Kriteria 2019 : BAIK				

Catatan: * kondisi tahun 2016. Adapun data kondisi Tahun 2017, 2018 dan 2019 tidak dapat disampaikan oleh Dinas PUPR.

Perbandingan capaian indikator “Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis” Kabupaten Lombok Tengah dengan Provinsi dan Nasional:

Tahun	Lombok Tengah	NTB	Nasional
2019	-	-	-

Catatan: Tidak ada data

Program / Kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis” antara lain:

A. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- Program pembangunan jalan dan jembatan
- Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
- Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
- Program Perencanaan Tata Ruang
- Program Pemanfaatan Ruang
- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
- Program Pengembangan Keciptakarya
- Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum

B. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

- Program pengembangan data/informasi

Program Kerjasama Pembangunan
Program perencanaan pembangunan daerah
Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah

Analisis:

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, diketahui bahwa : “Persyaratan teknis jalan meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus. Persyaratan teknis jalan tersebut harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan.

Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lombok Tengah dilaksanakan secara masif mulai dari Tahun 2011 sampai sekarang. Selain kegiatan pembangunan jalan, Pemerintah Kabupaten juga melaksanakan kegiatan pemantauan dan pemeliharaan jalan secara rutin untuk memaksimalkan penggunaan jalan agar sesuai dengan umur teknis jalan.

Pendukung capaian kinerja indikator “Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis” antara lain:

1. Komitmen kepala daerah yang sangat besar pada pemenuhan dan perbaikan infrastruktur di daerah, terutama jalan;
2. Pembangunan infrastruktur terutama jalan dan irigasi merupakan prioritas pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah;
3. Adanya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan yang intensif;
4. Adanya data base jalan dan jembatan di Lombok Tengah;
5. Keberadaan sumber daya (personil, peralatan, pendanaan) pada Dinas PUPR yang cukup memadai;
6. Pengaturan trayek dan kondisi lalu lintas angkutan oleh dinas perhubungan;

III.1.13. SASARAN 9

TERWUJUDNYA TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS

Sasaran tersebut diukur dengan 2 (Dua) indikator yaitu: Indeks Lingkungan Hidup dan Ketaatan terhadap RTRW. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2019	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2017	2018		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	52,51	53,5	66,254	126,2	125,0	-	58,66	Kertas Kerja penghitungan IKLH Tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Tengah	Dinas LH
2	Ketaatan terhadap RTRW	%	82,54	84,36	77,32*	93,7	91,7	-	-	halaman 8, Bab V lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021	Dinas PU
Rata-rata						109,9 %	Kriteria 2019 : SANGAT BAIK				

Catatan: * kondisi tahun 2016. Adapun kondisi Tahun 2017, 2018 dan 2019 tidak dapat disampaikan oleh Dinas PUPR.

A. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Perbandingan IKLH Lombok Tengah dengan provinsi NTB dan Nasional

NO	TAHUN	LOMBOK TENGAH	NTB	NASIONAL
1	2016	-	56,53	65,73
2	2017	66,698	56,99	66,46
3	2018	58,66	75,16	71,67
4	2019	66,254	-	-

Sumber: Report IKLH, Halaman: 18 dan Halaman 31 sebagaimana telah diunduh dari www.menlhk.go.id tanggal 7 Pebruari 2020 serta kertas kerja penghitungan IKLH Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019

Program / Kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator "IKLH" antara lain:

A. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 Program peningkatan pengendalian polusi
 Program Pengelolaan Sampah

B. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Program pengembangan data/informasi
Program Kerjasama Pembangunan
Program perencanaan pembangunan daerah
Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah

C. DINAS PERKIM

Program Pengembangan Perumahan
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program Pengembangan, Pengelolaan Permukiman dan Lingkungan

Analisis:

IKLH merupakan informasi kepada pengambil keputusan di tingkat daerah tentang kondisi lingkungan di daerah. Hal ini diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, IKLH juga digunakan untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan.

Penghitungan IKLH Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019

No	Indikator	Nilai	Bobot	Hasil
1	Indeks Kualitas Air	51,11	30%	15,333
2	Indeks Kualitas Udara	93,74	30%	28,122
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	56,998	40%	22,799
IKLH KABUPATEN LOMBOK TENGAH				66,254

Sumber: Kertas Kerja Perhitungan IKLH Kab. Lombok Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kab.lombok Tengah, Tahun 2020

Kondisi IKLH Tahun 2019 dapat dikatakan lebih baik karena mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya (Tahun 2017: 48,45, Tahun 2018: 58,66, Tahun 2019: 66,254). Peningkatan kinerja IKLH tahun 2019 menunjukkan upaya-upaya pelestarian dan penataan lingkungan di Kabupaten Lombok Tengah telah berjalan cukup baik.

Cakupan layanan persampahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup semakin luas dan semakin baik kualitasnya. Selain itu, saat ini seluruh desa dan kelurahan lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah membentuk lembaga kemasyarakatan Kelompok Masyarakat Peduli Sampah (KMPS). Penanganan sampah rumah tangga pada tiap desa dan kelurahan semakin mambaik dengan bertambahnya armada angkut serta personil khusus pada tiap desa/ kelurahan. Kegiatan daur ulang dan pemanfaatan sampah untuk kerajinan dan pembuatan pupuk saat ini juga semakin marak di Lombok Tengah. Contoh: di Kelurahan Tiwugalih, PKK telah melakukan pelatihan cara

pembuatan bunga dari limbah plastik dan dipamerkan pada event-event skala kabupaten.

Pemantauan kualitas air, udara dan tanah dilakukan secara rutin setiap triwulan sebagai bentuk pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas lingkungan hidup masyarakat.

Pendukung capaian kinerja indikator “IKLH” ini antara lain:

- a. Adanya dokumen RTRW yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Penghijauan / penanaman pohon oleh pemerintah dan masyarakat;
- c. Penanganan sampah secara terpadu dengan melibatkan berbagai *stakeholders* seperti pemerintah desa/ kelurahan, KMPS (kelompok masyarakat peduli sampah), Bank sampah, dll;
- d. Adanya NGO/ LSM yang peduli terhadap kesehatan lingkungan . Contoh komunitas hijau dll;
- e. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya / perilaku hidup bersih dan sehat;
- f. Adanya kegiatan penataan lingkungan yang dilaksanakan pemerintah maupun yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat;
- g. Adanya kegiatan pengawasan kondisi lingkungan.
- h. Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan secara rutin berupa pengujian kualitas lingkungan di titik-titik yang telah ditetapkan sehingga didapatkan data sebagai bahan penghitungan indeks kualitas lingkungan hidup
- i. Adanya sistem pengaduan masyarakat dimana masyarakat dapat menyampaikan masalah ataupun melaporkan kejadian/ masalah lingkungan yang terjadi di pemukimannya;
- j. Partisipasi aktif camat dan lurah dalam penataan lingkungan dan pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

B. KETAATAN TERHADAP RTRW

Perbandingan indikator “ketaatan terhadap RTRW” Lombok Tengah dengan provinsi NTB dan Nasional

NO	TAHUN	LOMBOK TENGAH	NTB	NASIONAL
1	2016	77,32	-	-
2	2017	-	-	-
3	2018	-	-	-
4	2019	-	-	-

Sumber: RPJMD Kab. Lombok Tengah 2016-2021

Program / Kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “ketaatan terhadap RTRW” antara lain:

A. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program pembangunan jalan dan jembatan
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pemanfaatan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
Program Pengembangan Keciptakarya
Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum

B. DINAS PERKIM

Program Pengembangan Perumahan
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program Pengembangan, Pengelolaan Permukiman dan Lingkungan

C. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Program pengembangan data/informasi
Program Kerjasama Pembangunan
Program perencanaan pembangunan daerah
Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah

D. SAT POL PP

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

- Pengendalian keamanan lingkungan
- Operasi Penegakan PERDA

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

- Penyuluhan/Sosialisasi Perda, Tramtibmas terhadap Masyarakat/PKL/Pelajar

Analisis:

Tingginya investasi yang masuk di Kabupaten Lombok Tengah baik untuk kegiatan industri maupun perumahan menyebabkan tingginya perubahan alih fungsi lahan. Untuk itulah diperlukan aturan tata ruang yang jelas, detil dan implementatif. RTRW Kabupaten Lombok Tengah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031. Produk hukum lain yang mengatur tata ruang dan diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut adalah Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). RDTR perlu disusun di kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/ kota. Dalam RDTR telah dijelaskan dengan pasti mengenai Ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Zonasi yang meliputi: Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan; Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang; Ketentuan Tata Bangunan; Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal; Ketentuan Pelaksanaan; Ketentuan Tambahan; Ketentuan Khusus; Standar Teknis; Ketentuan Peraturan Zonasi.

Penghambat dalam capaian kinerja indikator “ketaatan terhadap RTRW” antar lain:

- Kurangnya kapasitas sumberdaya manusia (SDM) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kegiatan penyusunan rencana rinci tata ruang bila dibandingkan beban kerja yang ada.
- Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya penataan ruang, sehingga lebih mementingkan kepentingan ekonomi diatas kepentingan budaya dan lingkungan.
- Bangunan yang belum berizin tersebut akan mengajukan izin, tidak sesuai atau menyalahi ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya.
- Permasalahan terkait perubahan fungsi bangunan rumah menjadi toko/ ruko di perumahan terhadap potensi pendapatan daerah dari IMB
- Perubahan bangunan cagar budaya.
- Kurangnya perhatian terhadap pengembangan kawasan perumahan dan permukiman tradisional atau bersejarah khususnya di kawasan Lombok Tengah lama

Solusi yang dilakukan adalah: harus diadakan tim verifikasi izin pemanfaatan ruang sehingga ada memonitor atau pengawasan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya. Meningkatkan kompetensi

dan kapasitas SDM di lingkungan Bidang Tata Ruang serta mengembangkan konsep audit penataan ruang sebagai instrumen monitoring dan evaluasi atau pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang dalam skala wilayah .

III.1.14. SASARAN 10 MENINGKATNYA KUALITAS KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAM

Sasaran tersebut diukur dengan 2 (Dua) indikator yaitu: Luasan Kawasan Kumuh dan Spot Kawasan Kumuh. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2019	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2017	2018		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Luasan Kawasan Kumuh	Ha	35,90	11,65	59,06	35,5	-48,5	-	-	Laporan Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2019	Dinas Perkim
	Spot kawasan kumuh	Spot	3	1	5	33,3	-50,0	-	-		
Rata-rata						34,41 %	Kriteria 2019 : SANGAT KURANG				

Perbandingan indikator “Luasan Kawasan Kumuh” dan “spot kawasan kumuh” Lombok Tengah dengan provinsi NTB dan Nasional

NO	TAHUN	LOMBOK TENGAH	NTB	NASIONAL
Indikator : Luasan Kawasan Kumuh				
1	2019	59,06	-	-
Indikator : Spot Kawasan Kumuh				
1	2019	5	-	-

Program / Kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “luasan kawasan kumuh” dan “spot kawasan kumuh” antara lain:

- A. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 - Program pembangunan jalan dan jembatan
 - Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
 - Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
 - Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
 - Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
 - Program Perencanaan Tata Ruang
 - Program Pemanfaatan Ruang
 - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
 - Program Pengembangan Keciptakarya

Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum

B. DINAS PERKIM

Program Pengembangan Perumahan

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program Pengembangan, Pengelolaan Permukiman dan Lingkungan

C. DINAS SOSIAL

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

D. SAT POL PP

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

- Pengendalian keamanan lingkungan

- Operasi Penegakan PERDA

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

- Penyuluhan/Sosialisasi Perda, Tramtibmas terhadap Masyarakat/PKL/Pelajar

E. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program pengembangan Ekonomi pedesaan

Program Pemberdayaan lembaga adat perdesaan

Program Peningkatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan

Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

Analisis:

Berdasarkan SK Bupati Lombok Tengah Nomor 504 Tahun 2015 tentang Penetapan Permukiman Kumuh, jumlah permukiman kumuh di Kabupaten Lombok Tengah sebesar 110.58 Ha yang berada di 13 lokasi.

Pada Tahun Anggaran 2019 terdapat beberapa kawasan Kumuh yang tertangani yaitu di wilayah Prapen Lingkungan II sebesar 3,58 Ha, Batujai I sebesar 1,55 Ha dan Penujak sebesar 2,41. Dengan demikian, total penanganan kawasan kumuh hingga tahun 2019 sebesar 7,54 Ha atau sebesar 6,82%, sehingga total kawasan kumuh yang telah tertangani sampai dengan tahun 2019 adalah 51,50 ha atau 46,58 % dengan perincian sebagai berikut:

Daftar lokasi kawasa kumuh di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019

No	Lokasi Kawasan Kumuh	Luas Areal Kumuh	Realisasi s/d Tahun 2019	Ket
1	Praya	0.79	0,79	Tertangani
2	Prapen Lingkungan I	1.96	1,96	Tertangani

3	Prapen Lingkungan II	11.71	6,04	Belum tertangani seluruhnya
4	Tiwugalih	10.11	10,11	Tertangani
5	Leneng	5.69	5,69	Tertangani
6	Panjisari	5.49	5,49	Tertangani
7	Renteng	4.82	4,82	Tertangani
8	Semayan	9.85	9,85	Tertangani
9	Tanak Awu	15.38	-	Belum tertangani
10	Batujai I	6.34	4,11	Belum tertangani seluruhnya
11	Batujai II	6.72	6,72	Tertangani
12	Batujai III	11.1	-	Belum tertangani
13	Penujak	20.6	2,41	Belum tertangani seluruhnya
Total		110.56	51,50	

Penataan kawasan kumuh dilaksanakan melalui pembangunan sarana prasarana permukiman dan penataan lingkungan dalam bentuk Pembangunan Saluran Drainase, Jalan Lingkungan, Trotoar, Rabat dan Normalisasi Saluran Drainase. Total hasil penataan dan pembangunan yang telah dilaksanakan adalah 24.350 m.

Persentase rumah tangga kumuh di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018

Variabel/ Klasifikasi	%		
	Perkotaan + perdesaan	perdesaan	perkotaan
Persentase Ruta Kumuh menurut Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Tengah, 2018			
Kumuh	4	4,09	3,81
Tidak Kumuh	96	95,91	96,19
Persentase Ruta yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau menurut Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Tengah, 2018			
Layak huni	96,64	95,88	98,25
Tidak Layak Huni	3,36	4,12	1,75

Sumber : Buku Statistik Perumahan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018, Halaman 40, 41

Pendukung capaian indikaor kinerja tersebut antara lain :

- a. Penanganan kumuh dilakukan secara kolaborasi yang artinya kerja sama dengan semua pihak sehingga sumber pendanaannya bisa dari APBD, Dana Desa, APBN maupun CSR. Contoh kolaborasi yang telah dilaksanakan yaitu kegiatan rehab/ pembangunan RTLH disetiap desa/ kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah. Pada Tahun 2019, tiap desa/ kelurahan melakukan

pembangunan dan rehab minimal 5 (lima) unit RTLH di wilayahnya masing-masing.

- b. Ada dokumen perencanaan yang jelas dalam penanganan kumuh sehingga kegiatan lebih terarah dan tepat sasaran;
- c. Target capaian penanganan kumuh tercapai dengan baik karena setiap tahun dilakukan evaluasi dengan menghitung pengurangan kumuh dan dampaknya;
- d. Adanya partisipasi masyarakat dengan membantu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur lingkungan permukiman dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Namun dalam pelaksanaan Penurunan Kawasan Kumuh ini masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan masih kurang sehingga butuh upaya dalam melakukan penyadaran perilaku hidup sehat;
- b. Masih belum dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat secara intensif terhadap dampak kumuh pada lingkungan permukiman sehingga tidak semua masyarakat ikut berperan aktif dalam mengurangi tingkat kekumuhan;

Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian target penanganan kumuh antara lain :

- a. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di lingkungan permukiman;
- b. Melakukan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur diantaranya: Pembangunan Saluran Lingkungan dan Pembangunan Jalan Lingkungan yang didukung dengan partisipasi masyarakat setempat yang sumber dananya dari APBD 2019;
- c. Melaksanakan pembangunan / peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan permukiman diantaranya: pembangunan saluran air, pembangunan jalan lingkungan, penyediaan air bersih, penanganan persampahan, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang sumber dananya dari APBN 2019;
- d. Adanya kegiatan pembinaan komunitas perumahan;
- e. Adanya kegiatan penataan lingkungan yang dilaksanakan pemerintah maupun yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat;

III.1.15. SASARAN 11

TERWUJUDNYA KAWASAN PERDESAAN MAJU DAN MANDIRI

Tujuan tersebut diukur dengan 1 (Satu) indikator yaitu: Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2019	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2017	2018		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang	Desa	24	35	27	112,5	93,1	-	-	Laporan capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2019, Bappeda Kabupaten Lombok Tengah	DPMD
Rata-rata						112,5 %	Kriteria 2019 : SANGAT BAIK				

Perbandingan capaian indikator “Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang” Kabupaten Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional:

Tahun	Lombok Tengah	NTB	Nasional
2018	-	-	-
2019	27	-	-

Program/ Kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang”:

A. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program pengembangan Ekonomi pedesaan
 Program Pemberdayaan lembaga adat pedesaan
 Program Peningkatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
 Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

B. DINAS PERTANIAN

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
 Program peningkatan produksi hasil peternakan
 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

C. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program pembangunan jalan dan jembatan
 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
 Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pemanfaatan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
Program Pengembangan Keciptakarya
Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum

D. DINAS PERKIM

Program Pengembangan Perumahan
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program Pengembangan, Pengelolaan Permukiman dan Lingkungan

E. DINAS SOSIAL

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

F. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Program peningkatan pengendalian polusi
Program Pengelolaan Sampah

G. DINAS PENDIDIKAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Pendidikan Non Formal
Program Pendidikan Luar Biasa
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

H. DINAS KESEHATAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Program Kebijakan dari manajemen pembangunan kesehatan
Program Jaminan Kesehatan Nasional
Program peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan

Analisis:

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan disampaikan bahwa: “Tingkat perkembangan Desa dan kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil dari Desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah Desa dan kelurahan”. Kemudian untuk mengetahui secara pasti tingkat perkembangan desa setiap tahun, Pemerintah desa, kecamatan dan Kabupaten melaksanakan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. “Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan”.

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk:

- a. menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dibagi menjadi 3 (tiga) bidang dan beberapa aspek sebagai berikut:

- (1) Evaluasi bidang pemerintahan desa dan kelurahan meliputi aspek:
 - a. Pemerintahan;
 - b. kinerja;
 - c. inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat;

- d. Desa dan kelurahan berbasis teknologi informasi/*E-Government*; dan
- e. pelestarian adat dan budaya.

(2) Evaluasi bidang kewilayahan desa dan kelurahan meliputi aspek:

- a. identitas;
- b. batas;
- c. inovasi;
- d. tanggap dan siaga bencana; dan
- e. pengaturan investasi.

(3) Evaluasi bidang kemasyarakatan desa dan kelurahan meliputi aspek:

- a. partisipasi masyarakat;
- b. lembaga kemasyarakatan;
- c. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- d. keamanan dan ketertiban;
- e. pendidikan;
- f. kesehatan;
- g. ekonomi;
- h. penanggulangan kemiskinan; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat.

Penilaian hasil perkembangan desa ditetapkan dengan kategori sebagai berikut:

- a. nilai di atas atau sama dengan 451 dikategorikan desa cepat berkembang;
- b. nilai 301 sampai dengan 450 dikategorikan desa berkembang;
- c. nilai di bawah atau sama dengan 300 dikategorikan desa kurang berkembang.

Pendukung capaian kinerja “Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang” Tahun 2019 adalah:

1. Sumberdaya (SDM, pendanaan dan kewenangan) pemerintah desa cukup besar. Hal ini memungkinkan pemerintah desa untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

2. Adanya tenaga pendamping desa yang membantu penyelenggaraan pemerintahan di desa. Tenaga pendamping desa melakukan pendampingan pada hampir seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, pendamping desa juga berfungsi sebagai fasilitator dan tim ahli dalam penyelesaian masalah-masalah di desa;
3. Adanya kegiatan Monev pembinaan dari pemerintah supra desa (Kecamatan, kabupaten, Provinsi dan pemerintah pusat);
4. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM pemerintah desa berupa Bimtek, pelatihan, kursus, sosialisasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Terdapat banyak LSM/ NGO yang melakukan pembinaan atau pendampingan desa;

Sedangkan hambatan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut antara lain:

1. Profil desa/ kelurahan tidak di *up date* secara rutin sehingga data yang disampaikan tidak valid/ akurat;
2. Minimnya kualitas pengumpulan dan pengolahan data kinerja di Pemerintahan desa;
3. Kurangnya kreatifitas dan inisiatif dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian budaya masyarakat;
4. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan *e governance* di desa;
5. Belum optimalnya kegiatan pembinaan dan pendampingan OPD teknis terkait terhadap penyelesaian/ penanganan masalah sosial kemasyarakatan di desa;
6. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam membantu pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah desa.

III.1.16. TUJUAN 5 MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Tujuan tersebut diukur dengan 1 (Satu) indikator yaitu: Nilai EKPPD. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2019	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2017	2018		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Nilai EKPPD	Poin	3,1431	3,1545	3,0738*	97,8	97,6	-	3,0738	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Atas LPPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor LHE-487/PW23/3/2019, Tanggal: 30 Agustus 2019	Bag. APU
Rata-rata						97,8 %	Kriteria 2019 : BAIK				

Catatan: *Kondisi Tahun 2018. Nilai EKPPD tahun 2019 akan diumumkan pertengahan tahun 2020

Perbandingan capaian indikator “nilai EKPPD” Kabupaten Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional:

Tahun	Lombok Tengah	NTB	Nasional
2016	3,1254	-	-
2017	3,0332	-	-
2018	3,0738	-	-

Program/ Kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “nilai EKPPD”:

A. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Program pengembangan data/informasi
Program Kerjasama Pembangunan
Program perencanaan pembangunan daerah
Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah

B. INSPEKTORAT

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

- Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
- Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
- Pembinaan pengawasan yang lebih komprehensif
- Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
- Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

C. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

D. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

E. SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)

Program Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

- Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah

- Penataan Kerjasama Daerah
- Evaluasi dan Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Tugas-Tugas Umum Pemerintah

Analisis:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diartikan sebagai “hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan”. Laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi: LPPD, LKPJ, RLPPD dan EPPD.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diukur berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator kinerja tersebut ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

LPPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan EPPD serta penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Hasil EPPD akan menjadi bahan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Nilai EKPPD juga disampaikan kembali kepada Pemerintah Daerah melalui sistem informasi elektronik secara daring.

Nilai EKPPD Kab. Lombok Tengah 2016-2019

NO	TAHUN	NILAI EKPPD	PREDIKAT	DOK. PENDUKUNG
1	2016	3,1254	Sangat Tinggi	LKJIP BPKP Perwakilan NTB Tahun 2018, Halaman 76-77
2	2017	3,0332	Sangat Tinggi	
3	2018	3,0738	Sangat Tinggi	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Atas LPPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor LHE-487/PW23/3/2019, Tanggal: 30 Agustus 2019

MAKSUD DAN TUJUAN EKPPD

1. Untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan;
2. Untuk membandingkan tingkat capaian kinerja antar satu daerah dengan daerah lainnya dalam wilayah provinsi dan nasional;
3. Sebagai umpan balik dan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Sebagai dasar Pemerintah memberikan penganugerahan kepada Pemerintah Daerah yang dinilai berkinerja tertinggi hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
5. Sebagai dasar Pemerintah melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas daerah, sebagaimana Perpres No. 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

1. Terhadap daerah-daerah yang dinilai berkinerja rendah hasil EKPPD, akan dilakukan peningkatan kapasitas daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perpres No. 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.
2. Terhadap daerah-daerah yang dinilai berkinerja tertinggi hasil EKPPD terhadap LPPD, diusulkan untuk diberikan penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada Kepala Daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Terhadap daerah-daerah yang dinilai berkinerja tertinggi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut hasil EKPPD terhadap LPPD, diusulkan untuk diberikan penghargaan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri, beberapa permasalahan utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Lombok Tengah adalah:

1. Sebagian besar OPD tidak memiliki profil atau statistik sektoral sesuai indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab sesuai Tupoksi yang dimiliki. Akibatnya sangat sulit untuk melakukan pengukuran dan akuntabilitas hasil kinerja yang dicapai.
2. Penurunan capaian kinerja urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh OPD;
3. Kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas terhadap pejabat/ pegawai dalam penyelenggaraan kinerja urusan pemerintahan.
4. Kualitas dokumentasi dan pengarsipan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah cukup rendah;
5. Kurangnya harmonisasi/ keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program/ kegiatan di daerah.

Berkaitan dengan penyusunan LPPD, kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2019 antara lain:

No	Tahapan Penyusunan	Uraian	Ket
1	Pengumpulan dokumen wajib ke Bag. APU Setda	Jenis dan jumlah dokumen sesuai daftar yang ditentukan	SKPD mengumpulkan hard copy dan soft copy
2	Konsultasi dengan Inspektorat Provinsi dan BPKP Koordinasi dan melengkapi dokumen wajib dari SKPD	Konsultasi tentang format dan tindak lanjut evaluasi inspektorat dan BPKP • Rekapitulasi SKPD yang belum mengumpulkan dokumen wajib; • Rapat Koordinasi /konsultasi dengan SKPD	• Dilakukan Oleh Bag. APU/Tim Kabupaten; • SKPD diminta untuk mengumpulkan seluruh dokumen wajib.
3	Penyusunan Laporan SKPD dan IKK Kabupaten.	Disusun sesuai pedoman penyusunan laporan SKPD	SKPD dapat berkonsultasi /koordinasi dengan Bag. APU/ Tim Kabupaten.
4	Pengumpulan Laporan SKPD dan IKK Kabupaten dari masing-masing SKPD kepada Bupati Lombok Tengah Cq. Kepala Bagian APU Setda.	• Pengumpulan laporan SKPD dan IKK Kabupaten dilengkapi dengan ekspedisi dan tanda terima; • Bag. APU akan melakukan rekapitulasi atas ketepatan waktu pengumpulan laporan /dokumen.	• laporan SKPD dan IKK Kabupaten disampaikan dalam bentuk hard copy dan soft copy (disimpan dalam <i>Compact Disc</i> (CD))
5	Klarifikasi dan cross cek data	• Rekapitulasi SKPD yang belum mengumpulkan IKK Kabupaten dan Laporan SKPD Tahun 2018; • Rapat Koordinasi /konsultasi dengan SKPD	Dilakukan oleh Bag. APU/Tim Kabupaten
6	Konsultasi dengan Inspektorat Provinsi dan BPKP	Konsultasi tentang format IKK Kabupaten dan LPPD Tahun 2018	Dilakukan oleh Bag. APU/Tim Kabupaten
7	Expose draft IKK Kabupaten dan LPPD tahun 2018	Ekspose dengan mengundang seluruh kepala SKPD dipimpin oleh Bupati Lombok Tengah	Dilakukan oleh Bag. APU/Tim Kabupaten
8	Penyempurnaan dan finishing IKK Kabupaten dan LPPD tahun 2018	Berdasarkan hasil konsultasi dengan inspektorat dan BPKP serta hasil ekspose yang dipimpin Bupati.	Dilakukan oleh Bag. APU/Tim Kabupaten
9	Pengiriman dokumen	• kepada Gubernur dan Mendagri.	Dilakukan oleh Bag. APU/Tim Kabupaten

III.1.17. SASARAN 12 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sasaran tersebut diukur dengan 2 (Dua) indikator yaitu: Nilai SAKIP, Nilai Opini Pengelolaan Keuangan Daerah. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2019	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2017	2018		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Nilai SAKIP	Nilai	B	BB	CC	50	50	CC	CC	Surat Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Nomor B/399/AA.05/2019, Hal: Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Pemerintah Tahun 2019	Bag. APU
2	Nilai Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	point	2	2	2*	100	100	2	2	Surat Kepala Perwakilan BPK NTB Nomor. 318/S/XIX.MTR/05/2019, Tanggal 24 Mei 2019, Perihal Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018	BPKAD
Rata-rata						75 %	Kriteria 2019 : SEDANG				

A. NILAI SAKIP

Perbandingan capaian Kinerja indikator “nilai SAKIP” Kabupaten Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional:

Tahun	Lombok Tengah	NTB	Nasional (Kemendagri)
2016	52,01 (CC)	66,64 (B)	-
2017	51,78 (CC)	61,01 (B)	-
2018	52,02 (CC)	BB	-
2019	54,88 (CC)	BB	-

Program/ Kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “nilai SAKIP”:

A. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Program pengembangan data/informasi
 Program Kerjasama Pembangunan
 Program perencanaan pembangunan daerah
 Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah

B. INSPEKTORAT

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

- Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
- Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
- Pembinaan pengawasan yang lebih komprehensif
- Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
- Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

C. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

D. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

E. SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)

Program Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

- Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah
- Penataan Kerjasama Daerah
- Evaluasi dan Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Tugas-Tugas Umum Pemerintah

Analisis:

Nilai SAKIP Kab. Lombok Tengah 2015-2019

NO	TAHUN	NILAI SAKIP	PREDIKAT	EVALUATOR	DOK. PENDUKUNG
1	2015				
2	2016	52,01	CC	Inspektorat Provinsi NTB	Laporan hasil Evaluasi Atas LKJIP Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017, Nomor 700/07 K/INSP/2018, Tanggal 10 Januari 2018
3	2017	51,78	CC		
4	2018	52,02	CC		
5	2019	54,88	CC	KemenPAN RB	Surat Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Nomor B/399/AA.05/2019, Hal: Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Pemerintah Tahun 2019

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauhmana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka setiap tahun dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi dan pemetaan peran OPD dalam implementasi SAKIP di Kabupaten Lombok Tengah

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen	OPD PENANGGUNGJAWAB
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).	•BAPPEDA •SELURUH OPD
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%)	•BAPPEDA •SELURUH OPD

			c. Implementasi pengukuran (7,5%)	
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)	•BAGIAN APU (SETDA) •BAPPEDA •SELURUH OPD
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)	INSPEKTORAT
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)	•INSPEKTORAT •SELURUH OPD
	TOTAL	100%		

Berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/399/AA.05/2019 Tanggal 30 desember 2019, Perihal: Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 diketahui bahwa nilai implementasi SAKIP di Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan nilai CC dengan kriteria “cukup”. Artinya, Target nilai SAKIP Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 dengan predikat “B” tidak tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi oleh KEMENPAN dan RB beberapa permasalahan utama dalam implementasi SAKIP di Kabupaten Lombok Tengah adalah:

- a. Rumusan tujuan dan sasaran strategis masih bersifat proses dan belum berorientasi hasil/outcome, dengan demikian keberhasilan pencapaian kinerja atau sasaran strategis tidak selalu memberi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat;
- b. Rumusan indikator kinerja tidak relevan dengan kondisi yang telah di rumuskan dalam tujuan dan sasaran strategis sehingga ukuran keberhasilan kinerja daerah tidak dapat diyakini;
- c. Ketidakselarasan penjabaran rumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pada RPJMD, perangkat daerah (PD) dan dokumen perjanjian kinerja sehingga level rendah. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja daerah belum sepenuhnya di dukung oleh kinerja pada unit dibawahnya dibawahnya serta individu pada jabatan yang ada;
- d. Program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan tidak relevan dengan tujuan dan sasaran strategis PD yang merupakan prioritas pembangunan daerah. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja daerah belum sepenuhnya didukung oleh kinerja pada unit dibawahnya serta individu pada jabatan yang ada;
- e. Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pada PD hingga level yang paling rendah belum berjalan dengan baik. Kondisi ini menyebabkan efektivitas pengendalian dalam rangka pencapaian kinerja belum optimal;

- f. Pelaporan kinerja masih bersipat formalitas dan belum memberikan informasi mengenai analisis faktor pendorong maupun penghambat keberhasilan capaian kinerja. Hal ini mengakibatkan laporan kinerja belum mampu memberikan umpan balik untuk mendorong perbaikan kinerja tahun berikutnya;
- g. Evaluasi akuntabilitas kinerja interal belum memberikan rekomendasi spesifik yang berkualitas pada masing-masing PD sehingga belum mampu mendorong perbaikan manajemen kinerja di seriap PD.

Pendukung atau upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja indikator “niai SAKIP” yang telah dilaksanakan, yaitu:

1. Reviu dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Lombok Tengah dan didampingi oleh BPKP perwakilan NTB. Bentuk perubahan adalah: Perbaikan indikator kinerja (Tujuan, sasaran, program dan kegiatan);
2. Penyederhanaan tujuan, sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan.

NO	ASPEK	LAMA	BARU/HASIL REVIU
1	Tujuan	45 (tanpa indikator)	5 (8 indikator)
2	Sasaran	165 (tanpa indikator)	13 (25 Indikator)
3	Program	140	74

3. Reviu dokumen RENSTRA OPD Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Lombok Tengah . Bentuk perubahan:
 - Perbaikan indikator kinerja OPD;
 - Penyesuaian dengan RPJMD hasil reviu;
 - Penyesuaian dengan struktur dan Tupoksi OPD yang baru;
4. Assistensi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Provinsi NTB Rabu, 24 April 2019 di Hotel Astoria Mataram. Hasil yang diperoleh:
 - Perbaikan indikator dan konten dokumen-dokumen perencanaan daerah dan OPD;
 - Reviu IKU OPD;
 - Reviu IKU Kabupaten;
 - Penyusunan dokumen cascading kinerja Kabupaten dan OPD;
 - Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan;

- Meningkatnya kualitas pengarsipan dokumen perencanaan daerah dan OPD.
 - Penyusunan Perjanjian kinerja seluruh pejabat struktural dan staf;
5. Penerapan aplikasi “e SAKIP Lombok Tengah” yang di koordinir oleh Bag. APU dimulai pada awal Tahun 2019.
Hasil: Media penyampaian laporan penyelenggaraan SAKIP oleh OPD.
 6. *Workshop* Penguatan Implementasi SAKIP pada tanggal 29 s.d. 31 Oktober 2019 bertempat di Praya Kabupaten Lombok Tengah dengan narasumber: DR. Marja Sinurat, M.Pd.,MM (Dosen IPDN).
 7. Studi Banding ke Kabupaten Kulon Progo Provinsi Yogyakarta Tgl 24-26 September 2019;
 8. *Workshop* Penguatan Implementasi SAKIP pada tanggal 2019 bertempat di Hotel D Max Praya Kabupaten Lombok Tengah.
Hasil:
 - Mendapatkan bimbingan/ arahan secara langsung dari KemenPAN dan RB;
 - Evaluasi menyeluruh terhadap dokumen perencanaan dan implementasi SAKIP di Kabupaten Lombok Tengah;
 - Meningkatkan silaturahmi dan pendampingan dari KemenPAN dan RB.

B. NILAI OPINI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Perbandingan capaian indikator “nilai opini pengelolaan keuangan daerah” Lombok Tengah dengan Provinsi NTB :

NO	Tahun	Lombok Tengah	NTB
1	2015	WTP	WTP
2	2016	WTP	WTP
3	2017	WTP	WTP
4	2018	WTP	WTP

Program/ Kegiatan OPD yang berkaitan dengan Indikator nilai SAKIP antara lain:

1. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
2. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. INSPEKTORAT
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
 - Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
 - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
 - Pembinaan pengawasan yang lebih komprehensif
 - Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
 - Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
 - Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
4. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Program pengembangan data/informasi
Program Kerjasama Pembangunan
Program perencanaan pembangunan daerah
Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah

Analisis:

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian *intern*.

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan

kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Pendukung prestasi Lombok Tengah dalam mencapai 7 kali opini WTP secara berturut-turut antara lain:

1. Komitmen untuk menyelesaikan seluruh temuan/ tindak lanjut dari hasil pemeriksaan keuangan daerah;
2. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah. Contoh : melaksanakan verifikasi dan validasi data aset daerah;
3. Koordinasi dan konsultasi intensif secara internal dan eksternal pemerintah daerah. Contoh adanya pendampingan intensif terhadap pejabat/pegawai pengelola keuangan pada seluruh OPD;
4. Meningkatkan peran aparat pengawas internal pemerintah (APIP) Inspektorat terutama dalam proses audit regular dan reviu atas LKPD;
5. Melakukan review berjenjang dalam proses penyusunan APBD mulai dari proses musrenbang, penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan RKA, pembahasan Raperda APBD, evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD serta Raperkada penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan merujuk pada Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Penerapan / implementasi reformasi birokrasi di daerah;
7. Penyelenggaraan SAKIP (sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di daerah;
8. Upaya penyusunan dokumen ASB (analisis standar belanja).
9. Inovasi penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan manajemen keuangan seperti:
 - Aplikasi "SILAK";
 - Aplikasi "SIMDA";
 - Aplikasi "SIDATU";

Dokumentasi :



III.1.18. SASARAN 13 MENINGKATNYA KAPASITAS FISKAL DAERAH

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (Satu) indikator yaitu: Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2019	%	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								2017	2018		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	%	9,28	9,35	9,65	104,0	103,5	9,47	9,65	Laporan BPKAD Kab. Lombok Tengah Tahun 2019.	BPKAD
Rata-rata						104 %	Kriteria 2019 : SANGAT BAIK				

Perbandingan capaian kinerja Indikator “Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah” Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional.

Tahun	Lombok Tengah	NTB	Nasional	Ket
2019	9,65	12,23	-	-

Sumber: Buku Laporan Perekonomian Provinsi NTB Kajian Triwulanan Periode Mei 2019, Halaman: 38, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB

Program/ Kegiatan OPD yang berkaitan dengan Indiator Tingkat Kemandirian fiskal Daerah antara lain:

1. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

2. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
4. INSPEKTORAT
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
 - Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
 - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
 - Pembinaan pengawasan yang lebih komprehensif
 - Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
 - Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
 - Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
5. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Program pengembangan data/informasi
Program Kerjasama Pembangunan
Program perencanaan pembangunan daerah
Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah

Analisis:

Rasio kemandirian adalah oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio transfer ke daerah (termasuk di dalamnya dana perimbangan) terhadap total pendapatan. Sumber: <http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01>.

Berikut disampaikan perhitungan tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 dan Tahun 2019.

Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 2018

KOMPONEN	NILAI (Rp)	
	2018	2019
PAD	187.324.721.970,60	204.508.576.776,21
PENDAPATAN TRANSFER	1.449.014.029.739,00	1.537.058.189.781,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	340.355.011.889,00	377.633.572.110,00
TOTAL PENDAPATAN	1.976.693.763.598,60	2.119.200.338.667,21
TINGKAT KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH (PAD/ TOTAL PENDAPATAN)	0,094766 = 9,476 %	0,0965027 = 9,65 %

Sumber: BPKAD Lombok Tengah Tahun 2019, data diolah

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah. Desentralisasi kewenangan menyebabkan daerah dapat menggali sumber keuangan yang ada di daerah, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan dengan meminimalkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus lebih cermat dan responsif memandang dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah sebagai pendapatan daerah. Pemerintah daerah harus mampu menunjukkan bahwa uang yang dikelola adalah uang masyarakat sedangkan DPRD harus mampu mengawasi pengelolaan uang oleh eksekutif secara profesional agar sebesar-besarnya bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Kemampuan keuangan daerah antara lain dapat diukur dari tingkat kemandirian fiskal yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal suatu daerah maka akan semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah. Faktor utama yang paling mempengaruhi kemandirian fiskal daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar PAD yang dimiliki akan menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat semakin berkurang.

Sampai dengan Tahun 2019, dapat diketahui bahwa realisasi PAD Kabupaten Lombok Tengah belum mampu membiayai belanja pembangunan yang ada di Lombok Tengah. Ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat masih sangat besar. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian fiskal di Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

- a. Komposisi industri yang ada di daerah masih kecil dan didominasi oleh UMK. Jumlah industri menengah/ besar sangat sedikit sehingga belum maksimal dalam menambah lapangan kerja serta pajak/ retribusi daerah;

- b. Kondisi sumber daya alam yang dimiliki daerah. Contoh: Kabupaten Lombok Tengah tidak memiliki kekayaan tambang yang potensial dikembangkan untuk menjadi industri pertambangan yang besar. Potensi tambang yang menonjol hanya pada galian c berupa material tanah urug dan kerikil;
- c. Masih kurangnya komitmen dari struktur sosial, politik dan institusional serta berbagai kelompok masyarakat yang relatif memiliki kekuatan untuk memajukan ekonomi/ industri di daerah;
- d. Masih kurangnya kualitas SDM/ aparatur, terutama kemampuan administratif, kejujuran dan integritas dari OPD dalam menjalankan manajemen fiskal daerah;
- e. Tingkat ketimpangan (ketidakmerataan) dalam distribusi pendapatan cukup tinggi;
- f. Kurangnya peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET PAD TAHUN 2019

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun sebelumnya (2018)	Sumber Data
Target PAD	Rp	203.374.473.513,38	173.475.133.328,02	85,30	166.443.247.023,43 (105,56 %)	LKjIP Bapenda Tahun 2019

Sumber : Dokumen LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2019

Pencapaian target PAD yang cukup baik ini didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tiap - tiap SKPD berusaha maksimal untuk mencapai targetnya.
- b. Setiap bulannya dilakukan Rekonsiliasi dan koordinasi dengan SKPD pengelola PAD.
- c. Adanya perjanjian kinerja tiap – tiap SKPD
- d. Melakukan sosialisasi dengan pihak pengusaha (WP dan WR), pihak aparat pemerintahan Kecamatan, Kelurahan/Desa, kadus/ kaling
- e. Melakukan uji petik setiap bulannya terhadap obyek pajak hotel dan pajak restoran dikawasan wisata
- f. Melakukan Monitoring dan evaluasi
- g. Melakukan pertemuan dengan Notaris (BPHTB)
- h. Melakukan koordinasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan instansi terkait (POL PP, BPMP2T, Kepolisian,Kejaksaan dan BPKP)

- i. Melakukan Reklas (penyesuaian) NJOP PBB-P2

Sedangkan penghambat pencapaian target PAD tahun 2019 adalah :

- a. Tingkat kepatuhan WP relatif masih rendah terutama hotel melati/homestay.
- b. Keterbukaan WP terhadap omzet penerimaan rendah
- c. Penggunaan BILL yang dapat menunjukkan hak pemerintah tentang TAX atau yang mencantumkan pajak masih belum optimal.
- d. WP mengeluhkan tingkat keamanan dan kenyamanan yang rendah menyebabkan tamu/konsumen tinggal sebentar.
- e. Masih banyaknya SPPT PBB P2 yang bermasalah.
- f. Pengakuan WP terhadap harga transaksi tanah cenderung lebih rendah dari harga transaksi yang sebenarnya.
- g. Belum ada payung hukum yang menjelaskan aturan apakah hotel dan restoran yang tidak memiliki izin operasi dan izin lokasi untuk penarikan pajaknya.

Dokumentasi:



III.3. ANALISIS EFISIENSI

Definisi efisiensi dalam laporan ini adalah: suatu cara (usaha dan kerja) yang dilakukan dalam menjalankan sesuatu dengan baik dan tepat serta meminimalisir pemborosan dari segi waktu, tenaga dan biaya. Definisi ini didasarkan pada beberapa pendapat atau sumber sebagai berikut:

- Mulyadi (2007;63), efisiensi adalah: “ketepatan cara (usaha dan kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi juga berarti rasio antara input dan out put atau biaya dan keuntungan”
- Hasibuan (2005;233) yang mengutip pernyataan H. Emerson. “efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan out put (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan”
- Menurut Kamus Besar Ekonomi (2003;178) , efisiensi dapat diartikan sebagai: “ Hubungan atau perbandingan antara faktor keluaran (out put) barang dan jasa dengan masukan (input) yang angka di dalam suatu unit kerja, atau ketetapan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga biaya)”.
- Efisiensi dalam ilmu ekonomi digunakan untuk merujuk pada sejumlah konsep yang terkait pada kegunaan pemaksimalan serta pemanfaatan seluruh sumber daya dalam proses produksi barang dan jasa. (wikipedia.org diakses tgl 07 Pebruari 2020).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001;284) . Efisiensi adalah “ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya), kedayagunaan, ketepatgunaan, kesangkilan serta kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya).”

Analisis efisiensi yang disampaikan dalam laporan ini adalah efisiensi pada aspek-aspek yang bersifat umum dan lintas urusan/ OPD bukan analisis efisiensi per indikator kinerja. LKjIP Bupati Lombok Tengah adalah laporan pada level pengambil kebijakan yang bersifat lintas urusan/ OPD. Sedangkan analisis per indikator kinerja idealnya disampaikan pada laporan kinerja level pelaksana kebijakan yaitu tingkat kepala OPD. Analisis yang memaparkan sampel beberapa

OPD bertujuan untuk memberikan gambaran riil kondisi pada sebagian OPD serta sebagai bahan dalam membuat kesimpulan secara induktif.

Penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019 secara kualitatif dapat dikatakan telah dilaksanakan secara efisien dan tepat waktu. Hampir seluruh program/ kegiatan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 telah dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai ketentuan. Hanya terdapat beberapa kegiatan fisik yang dianggarkan dalam perubahan 2019 yang masa pengerjaannya melewati Tanggal 31 Desember 2019. Perpanjangan masa pengerjaan proyek ini masih dapat dilakukan karena kontrak yang bersifat “*multi years*”. Contoh: belum diselesaikannya pembangunan gedung baru Kantor Bupati Lombok Tengah. Hal ini disebabkan kontrak akan berakhir pada Tanggal 31 Maret 2020 serta kondisi dan dinamika lingkungan (cuaca, kelangkaan material, dll) yang terjadi selama proses pengerjaan sehingga tidak dapat diselesaikan tepat waktu.

Adapun efisiensi penyelenggaraan pemerintahan tahun 2019 dari aspek tenaga dan biaya, kami sampaikan dengan menganalisis kondisi sumber daya manusia, aset, anggaran serta belanja Tahun 2019 sebagai berikut:

A. Aspek Sumber Daya Manusia

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2019 (kondisi per 31 Desember 2019)

NO	OPD	KEBUTUHAN RIIL PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN KEBUTUHAN TEKNIS ORGANISASI (Org)	JUMLAH SDM (PNS) YANG DIMILIKI (Org)	KEKURANGAN SDM	KETERANGAN	Sumber
1	BAPPEDA	57	49	8	<ul style="list-style-type: none"> • 6 jabatan struktural (eselon dan non eselon) • 2 Jabatan fungsional perencanaan 	LKjIP Bappeda Tahun 2019
2	BAPENDA	258	144	14	14 jabatan struktural pada sekretariat dan pada bidang teknis (eselon dan non eselon)	LKjIP Bappenda Tahun 2019
3	DINAS PERHUBUNGAN	126	44	4	4 jabatan struktural yaitu: Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Lalu Lintas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta Kepala Seksi Pengendali dan Kelaikan Kendaraan Bermotor	LKjIP Dinas Perhubungan Tahun 2019
				78	Pegawai pada seluruh bidang teknis	
4	DINAS PERKIM	85	60	35	Kekurangan pegawai pada bidang-bidang teknis (eselon dan non eselon)	LKjIP Dinas PERKIM Tahun 2019
5	SET DPRD	58	54	4	4 jabatan struktural (eselon dan non eselon)	LKjIP SET DPRD Tahun 2019
6	SAT POL PP	92	84	8	8 jabatan struktural (eselon dan non eselon)	LKjIP Sat POL PP Tahun 2019

7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	58	46	12	12 Jabatan struktural (eselon dan non eselon)	LKjIP Dinas Kelautan dan perikanan Tahun 2019
8	DINAS SOSIAL	50	28	22	22 Jabatan struktural (eselon dan non eselon)	LKjIP Dinas Sosial Tahun 2019
9	INSPEKTORAT	170	70	100	Struktural : 10 (eselon dan non eselon) Fungsional : 90	LKjIP Inspektorat Tahun 2019
10	DP3AP2KB		60			LKjIP DP3AP2KB Tahun 2019
11	DPMPTSP		31			LKjIP DPMPTSP Tahun 2019
12	RSUD PRAYA		341			LKjIP Dinas Perhubungan Tahun 2019

Berdasarkan penghitungan beban kerja dan serta analisis kebutuhan teknis pada tiap-tiap OPD diketahui bahwa pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengalami kekurangan pegawai pada hampir seluruh OPD (teknis dan non teknis). Meskipun pada tabel tersebut diatas hanya dipaparkan kondisi dari sebagian OPD, namun secara nyata dapat merepresentasikan kondisi keseluruhan OPD lingkup Pemkab. Lombok Tengah.

Ditengah kondisi kekurangan pegawai (kuantitas dan kualitas), Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui seluruh OPD terus berupaya melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal untuk mencapai target kinerja sesuai yang telah dijanjikan. Kondisi ini dapat diartikan sebagai salah satu bentuk efisiensi dari aspek SDM (pegawai). Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berhasil mengoptimalkan pegawai yang dimiliki saat ini untuk menutupi masalah kekurangan pegawai yang dialami. Pegawai yang ada saat ini telah digerakkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih besar dari tanggungjawab dan beban kerja yang dimiliki. Artinya, selain melaksanakan Tupoksi yang dimiliki, para pegawai juga harus melaksanakan tugas-tugas lain diluar Tupoksi bahkan diluar jam kerja para pegawai.

B. Aspek Sumber Daya Aset

Selain aspek sumber daya manusia, pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dipengaruhi oleh kondisi aset yang dimiliki. Kondisi sarana prasarana (aset) merupakan komponen yang sangat penting untuk mendukung capaian kinerja. Pemanfaatan aset secara optimal dalam melaksanakan tugas merupakan bentuk efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebab, seluruh aset yang dimiliki Pemkab memiliki nilai ekonomi yang semakin lama akan semakin menurun serta memerlukan biaya pemeliharaan/ perawatan secara rutin. Namun, jika dimanfaatkan dengan baik, suatu aset justeru dapat memberikan manfaat tambahan secara ekonomi maupun non ekonomi dan secara kuantitatif atau kualitatif bagi daerah. Suatu aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal

merupakan bentuk pemborosan yang bertentangan dengan prinsip efisiensi. Gambaran pemanfaatan aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 antara lain dipaparkan pada sebagian OPD sebagai berikut:

**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ASET TAHUN 2019
(kondisi per 31 Desember 2019)**

NO	OPD	NILAI ASET (Rp.)	JUMLAH ITEM	ASET DALAM KONDISI BAIK YANG TIDAK DIGUNAKAN (%)	SUMBER
1	BAPPEDA	9.939.750.547,01	546	0	LKjIP BappedaTahun 2019
2	BAPPENDA	8.884.077.017,46		2,28	LKjIP BappendaTahun 2019
3	DINAS PERHUBUNGAN	42.946.973.360,00	1.890	0	LKjIP Dinas Perhubungan Tahun 2019
4	DINAS PERKIM	40.170.112.520	300	0	LKjIP Dinas Perkim Tahun 2019
5	SET DPRD	15.247.797.490,-	718	0	LKjIP Set DPRD Tahun 2019
6	SAT POL PP	6.600.712.210	153	0	LKjIP Sat POL PP Tahun 2019
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	369.795.600	7	0	LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2019
8	RSUD PRAYA	219.390.625.666,75	1.495	0	LKjIP RSUD Praya Tahun 2019
9	DINAS SOSIAL	5.352.808,22	194	0	LKjIP Dinas Sosial Tahun 2019
10	INSPEKTORAT	5.733.837.160,	252	0	LKjIP Inspektorat Tahun 2019
11	BAKESBANGPOLDAGRI	1.115.410.000,00	322	0	LKjIP Bakesbangpoldagri Tahun 2019

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan hanya sebesar 2,28 %. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan efisiensi sumberdaya dengan memanfaatkan aset secara optimal seluruh aset yang dimiliki dalam rangka mendukung capaian kinerja. Aset milik organisasi yang tidak dimanfaatkan secara optimal merupakan bentuk pemborosan yang bertentangan dengan prinsip efisiensi.

C. Aspek anggaran dan belanja

Efisiensi anggaran dan belanja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat dari seberapa banyak penghematan yang dilakukan serta optimalisasi penggunaan dana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Terdapat beberapa bentuk efisiensi anggaran dan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, yaitu:

1. Efisiensi tender

Efisiensi ini diperoleh dari selisih nilai proyek yang dilelang dengan nilai penawaran yang diberikan oleh rekanan serta nilai tawaran yang ditetapkan menjadi pemenang melalui mekanisme lelang secara elektronik. Penghematan dari hasil tender ini dapat dialokasikan pada jenis belanja lainnya oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kebutuhan. Adapun nilai efisiensi dari pelaksanaan lelang secara elektronik di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2019 adalah sebagai berikut:

Tahun 2011: 0,52 Milyar, Tahun 2012: 20,34 Milyar, Tahun 2013: 9,59 Milyar, Tahun 2014: 8,8 Milyar, Tahun 2015:13,91 Milyar, Tahun 2016:19,47 Milyar, Tahun 2017: 20,61 Milyar, Tahun 2018: 19,15 Milyar Tahun 2019: 18,95 Milyar.

2. Efisiensi non tender

Efisiensi ini diperoleh dari selisih nilai harga perkiraan sendiri (HPS) dengan nilai kontrak non tender yang telah ditetapkan. Penghematan dari hasil non tender ini dapat dialokasikan pada jenis belanja lainnya sesuai kebutuhan. Adapun nilai efisiensi dari pelaksanaan non tender di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018-2019 adalah sebagai berikut:

Tahun 2018

- HPS : Rp.445,15 Juta
- KONTRAK NON TENDER : Rp.440,63 Juta
- SELISIH / EFISIENSI : Rp.4,52 Juta

Tahun 2019

- HPS : Rp.153.155,42 Juta
- KONTRAK NON TENDER : Rp.142.642,6 Juta
- SELISIH/ EFISIENSI : Rp. 518,45 Juta

Sumber: Si Mandalika Report, <https://lpse.lombotengahkab.go.id>,
diunduh Tanggal 6 Maret 2020

3. SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)

Salah satu bentuk efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah adalah pelaksanaan kegiatan sampai tuntas (realisasi fisik 100 %) namun masih menyisakan anggaran. Artinya target kinerja dapat dicapai dengan baik namun dengan menggunakan pendanaan yang lebih murah. Hampir seluruh program dan kegiatan pada Tahun 2019 telah terealisasi dengan baik (realisasi fisik 100%).

Sehingga, SILPA yang ada pada Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai bentuk efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemungkinan SILPA berasal dari kesalahan perencanaan atau program kegiatan yang belum selesai dapat dinegasikan/ ditolak karena seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran telah disusun secara berjenjang, direviu dan dikawal secara intens oleh OPD terkait (Inspektorat, BAPPEDA, BKAD). Proses perencanaan (partisipatif, teknokratis dan politis) yang dilakukan pemerintah daerah, kini telah memanfaatkan teknologi informasi berupa penggunaan sistem informasi dan beberapa aplikasi dalam perencanaan dan keuangan daerah. Selain itu pemerintah daerah juga mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari instansi pengawas seperti BPK dan BPKP. Hal ini menjamin bahwa proses perencanaan yang dilakukan pemerintah daerah telah dilaksanakan secara profesional sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditentukan untuk menghilangkan kemungkinan salah perencanaan. Disisi lain, adanya sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) serta adanya kegiatan pengendalian dan monev yang dilakukan secara kontinyu oleh pemerintah daerah telah berhasil mengawal seluruh pelaksanaan program/ kegiatan agar sesuai dengan perencanaan dan mencapai target yang telah ditentukan. Transparansi dan penanganan terhadap adanya pengaduan / laporan masyarakat juga dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Lombok Tengah Bulan Desember 2019 yang telah disusun oleh Bagian Administrasi Pembangunan dan LPSE diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- Pagu dana : Rp. 1.908.807.039.682
- Realisasi
 1. Keuangan : Rp. 1.793.174.480.435
 2. % keuangan : 93,94
 3. % Fisik : 98,83
- Sisa dana/ efisiensi : Rp. 120.113.015.337

Berikut disampaikan beberapa contoh penghematan yang dilakukan oleh OPD:

1. Sekretariat DPRD

Capaian realiasi fisik untuk kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan daerah untuk tahun 2019 adalah sebanyak 21 dokumen, sedangkan target kinerjanya sebanyak 13 dokumen. Persentase capaian target untuk kegiatan ini adalah sebesar 161,53%. Capaian ini jauh

melampaui target yang ditetapkan karena pembahasan Ranperda tentang Pembentukan Desa yang merupakan Perda Usul Pemerintah dibahas secara simultan dalam satu periode pembahasan sehingga menghasilkan 16 buah produk Peraturan Daerah. Hal ini dapat dilakukan karena secara substansif persoalan antara desa satu dengan yang lain tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Demi efisiensi, pembahasannya dilakukan secara bersama-sama oleh Panitia Khusus.

Capaian kegiatan Rapat-rapat alat kelengkapan dewan melebihi target yang ditetapkan dengan anggaran yang justru dibawah target. Target kinerja kegiatan ini adalah 12 dokumen sedangkan realisasi 15 Dokumen. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan rapat-rapat berjalan sangat efektif dan efisien. Pengambilan keputusan dalam rapat berjalan lancar tanpa hambatan. Dari 3 hari rencana pelaksanaan rapat untuk mengambil keputusan dan menghasilkan 1 buah dokumen, ternyata mampu diselesaikan hanya dalam waktu 1 – 2 hari saja.

2. Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)

1. Penyusunan Draf Peraturan Bupati tentang Rukun Tetangga dan Lingkungan telah dilaksanakan oleh Bagian Adm. Pemerintahan Umum meskipun tidak ada dalam anggaran / DPA;
2. Penyusunan Draf Peraturan Bupati Tentang Pedoman kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan telah dilaksanakan oleh Bagian Adm. Pemerintahan Umum meskipun tidak ada dalam anggaran / DPA;
3. Pada kegiatan “Evaluasi dan Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Tugas-Tugas umum Pemerintah” tahun 2019 terdapat anggaran honor tim fasilitasi penyesuaian kecamatan sebesar Rp. 12.800.000,- dan makan minum Rp. 2.700.000,- yang tidak dibayarkan karena kegiatan tersebut digabungkan pada tim lain yaitu “Tim Pembina Kecamatan”. Meskipun digabungkan dengan Tim lain, out put yang menjadi target kinerja “tim fasilitasi penyesuaian kecamatan” dapat terealisasi 100 % berupa : Pembentukan Tim, Laporan pelaksanaan tugas tim dan Draf Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Puyung dengan Kelurahan Renteng (Batas Kecamatan Praya dan Kecamatan Jonggat).

Adapun contoh efisiensi anggaran dan belanja yang dilakukan beberapa OPD Lingkup Pemkab. Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019 kami paparkan sebagai berikut:

EFISIENSI SUMBER DAYA ANGGARAN DAN BELANJA TAHUN 2019

N O	OPD	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	Sisa Anggaran	KETERANGAN	SUMBER
1	BAPPEDA	13.609.115.716,10	12.889.658.552,00	95,02	719.457.164,-	Efisiensi pada aspek honorarium pegawai, perjalanan dinas dan kontrak pengadaan	LKjIP Bappeda Tahun 2019
2	BAPENDA	15.665.756.699,50	14.875.090.324,00	94,95	34 000 000,00	pemeriksaan pajak hotel dan restoran bersama dengan BPKP NTB perwakilan Mataram dengan kegiatan Pengawasan, Pemeriksaan dan Pelaporan Pajak Daerah Non PBB P2 dan BPHTB	LKjIP Bappeda Tahun 2019
3	DINAS PERHUBUNGAN	11.569.390.448,50	10.752.116.748,00	92,94	817.273.700		LKjIP dinas perhubungan
4	DINAS PERKIM	97.633.729.008,85	96.105.741.680	98,43	1.527.987.328,85		
5	SET DPRD	57.812.148.794,-	55.618.464.865,-	96,67	2.193.839.929		
6	SATPOL PP	11.152.739.384,40	10.817.558.384	96,96	335.181.000,40		
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	11.302.325.515	10.644.182.104	94,18	658.143.411		
8	Rsud Praya	105.094.327.205,75	101.272.787.012,00	96,36	3.821.540.193,75		
9	DINAS SOSIAL	7.982.919.974,90	7.698.924.970,00	96,44	283.995.004,90		
10	INSPEKTORAT	11.117.531.498,05	10.783.024.792,00	97	334.506.706,05		
11	KESBANGPOLDA GRI	3.879.537.090,70	3.817.882.450,00	95,99	155.477.083,70		

III.4. REALISASI ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor3).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019.

Pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2019 diarahkan pada upaya penyusunan APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang lebih memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang meliputi:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas**

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel ditekankan pada adanya sistem dan prosedur yang menjadi rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, melalui penetapan perangkat hukum yang menjadi landasan yuridis formal, antara lain; penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

serta Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2. Disiplin

Disiplin dalam pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan pemahaman pada kaidah-kaidah hukum yang menjadi pedoman dalam proses penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, sehingga senantiasa berlandaskan pada azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

3. Keadilan

Keadilan pengelolaan keuangan daerah ditekankan pada upaya pengaturan secara lebih proporsional dalam setiap proses penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, sehingga pengelolaan keuangan daerah mencerminkan tata kelola yang tanpa diskriminasi.

4. Efisiensi dan Efektifitas

Pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif diarahkan pada upaya penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, indikator yang ingin dicapai serta penetapan prioritas kegiatan dan penetapan harga satuan yang rasional.

5. Berbasis Kinerja

Pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja merupakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang telah ditetapkan. Hasil dan manfaat yang dicapai merupakan kesesuaian antara perencanaan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan dan melaksanakan berbagai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah tersebut secara konsekuen diharapkan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 pada tanggal 27 Desember 2018 dengan struktur sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini :

**Struktur APBD Kabupaten Lombok Tengah
Tahun Anggaran 2019**

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	2,152,687,126,109.00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	199,494,241,000.00
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	73,180,915,000.00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	23,587,547,000.00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12,376,596,000.00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	90,349,183,000.00
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1,564,779,169,000.00
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	77,188,937,000.00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	1,028,786,865,000.00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	458,803,367,000.00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	388,413,716,109.00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	98,153,011,000.00
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	82,526,493,109.00
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	207,459,593,000.00
4.3.6.	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga	274,619,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	2,152,687,126,109.00
5	BELANJA DAERAH	2,232,646,126,109.00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,243,706,073,109.00
5.1.1.	Belanja Pegawai	872,752,713,087.00
5.1.2.	Belanja Bunga	4,286,051,822.00
5.1.4.	Belanja Hibah	42,487,500,000.00
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	6,561,191,000.00
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	9,676,847,000.00
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintahan Desa dan Partai Politik	306,941,770,200.00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	988,940,053,000.00
5.2.1.	Belanja Pegawai	55,237,708,500.00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	530,725,672,295.00
5.2.3.	Belanja Modal	402,976,672,205.00
	JUMLAH BELANJA	2,232,646,126,109.00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(79,959,000,000.00)

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	79.959.000.000,00
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	0,00
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	79,959,000,000.00
6.1.7.	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah	0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	79,959,000,000.00
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0.00
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	79,959,000,000.00
6.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0.00

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Selanjutnya pada perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019 selama satu semester berjalan mengalami berbagai dinamika yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi struktur APBD dan penatausahaannya. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat;
5. Keadaan luar biasa.

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap APBD Kabupaten Lombok Tengah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan asumsi dasar

Kebijakan Umum APBD; perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah dan perubahan kebijakan pembiayaan daerah yang berimplikasi pada perubahan struktur APBD Tahun Anggaran 2019, serta untuk melaksanakan dan mempercepat prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian target-target kinerja tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021. Adapun substansi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 adalah melakukan penyesuaian-penyesuaian struktur APBD baik pada sisi pendapatan maupun belanja, antara lain:

1. Peningkatan dan penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah pada beberapa objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyesuaian target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang bersumber dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (PT. Bank NTB, PD. BPR LKP dan PT. Jamkrida NTB Bersaing) berdasarkan hasil RUPS tahun 2018, peningkatan target lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bersumber dari penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito.
2. Penyesuaian besaran target dana perimbangan, meliputi: Penyesuaian besaran target yang bersumber dari DBH-CHT berdasarkan SK Gubernur NTB Nomor 976-32 Tahun 2019.
3. Peningkatan target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dari Provinsi serta pengurangan target Bagi Hasil Pajak Permukaan.
4. Pergeseran anggaran antar organisasi perangkat daerah, antar kegiatan dan antar jenis belanja yang disebabkan capaian target kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD.
5. Pemanfaatan SiLPA Tahun Anggaran 2018 berdasarkan hasil audit BPK dan tambahan target dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, yang harus dialokasikan dalam belanja pada perubahan APBD baik yang penggunaannya diarahkan/ bersifat mengikat maupun bersifat umum.
6. Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian target kinerja RPJMD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

7. Program dan kegiatan baru yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, seperti: pengalokasian Pendapatan Dana BOS dalam Belanja Daerah.

Dengan adanya beberapa hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019, diawali dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dengan Nomor 905/266/BPKAD dan 903/110/DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA Perubahan) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Perubahan) dengan Nomor 903/95/DPRD dan 905/342.b/BPKAD yang disepakati tanggal 17 Juli 2019. Selanjutnya diikuti dengan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sampai dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 23 Agustus 2019, yang secara struktur sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini :

**Struktur Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah
Tahun Anggaran 2019**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
4	PENDAPATAN DAERAH	2,152,687,126,109.00	2,161,842,234,622.38	9,155,108,513.38
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	199,494,241,000.00	203,099,854,513.38	3,605,613,513.38
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	73,180,915,000.00	78,480,915,000.00	5,300,000,000.00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	23,587,547,000.00	22,797,547,000.00	(790,000,000.00)
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12,376,596,000.00	9,173,070,056.38	(3,203,525,943.62)
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	90,349,183,000.00	92,648,322,457.00	2,299,139,457.00
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1,564,779,169,000.00	1,571,801,664,000.00	7,022,495,000.00
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	77,188,937,000.00	84,211,432,000.00	7,022,495,000.00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	1,028,786,865,000.00	1,028,786,865,000.00	0.00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	458,803,367,000.00	458,803,367,000.00	0.00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	388,413,716,109.00	386,940,716,109.00	(1,473,000,000.00)
4.3.1.	Pendapatan Hibah	98,153,011,000.00	96,653,011,000.00	(1,500,000,000.00)
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	82,526,493,109.00	82,526,493,109.00	0.00
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	207,459,593,000.00	207,459,593,000.00	0.00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
4.3.5.	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga	274,619,000.00	301,619,000.00	27,000,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	2,152,687,126,109.00	2,161,842,234,622.38	9,155,108,513.38
5	BELANJA DAERAH	2,232,646,126,109.00	2,279,133,654,703.50	46,487,528,594.50
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,243,706,073,109.00	1,217,319,704,372.14	(26,386,368,736.86)
5.1.1.	Belanja Pegawai	872,752,713,087.00	846,993,089,350.14	(25,759,623,736.86)
5.1.2	Belanja Bunga	4,286,051,822.00	2,186,051,822.00	(2,100,000,000.00)
5.1.4.	Belanja Hibah	42,487,500,000.00	42,787,300,000.00	299,800,000.00
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	6,561,191,000.00	6,561,191,000.00	0.00
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	9,676,847,000.00	10,127,847,000.00	451,000,000.00
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintahan Desa dan Partai Politik	306,941,770,200.00	307,664,225,200.00	722,455,000.00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	988,940,053,000.00	1,061,813,950,331.36	72,873,897,331.36
5.2.1.	Belanja Pegawai	55,237,708,500.00	56,490,680,500.00	1,252,972,000.00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	530,725,672,295.00	584,143,464,323.30	53,417,792,028.30
5.2.3.	Belanja Modal	402,976,672,205.00	421,179,805,508.06	18,203,133,303.06
	JUMLAH BELANJA	2,232,646,126,109.00	2,279,133,654,703.50	46,487,528,594.50
	SURPLUS/(DEFISIT)	(79,959,000,000.00)	(117,291,420,081.12)	(37,332,420,081.12)
6.1	PEMBIAYAAN DAERAH	79,959,000,000.00	127,127,668,821.12	47,168,668,821.12
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	79,959,000,000.00	127,127,668,821.12	47,168,668,821.12
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	0,00	58,358,151,321.12	0.00
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	79,959,000,000.00	68,769,517,500.00	(11,189,482,500.00)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	79,959,000,000.00	127,127,668,821.12	47,168,668,821.12
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00	9,836,248,740.00	9,836,248,740.00
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	9,836,248,740.00	0.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00	9,836,248,740.00	9,836,248,740.00
	PEMBIAYAAN NETTO	79,959,000,000.00	117,291,420,081.12	37,332,420,081.12
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0.00	0.00	0.00

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan satu kesatuan atau bagian integral dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disamping belanja daerah dan pembiayaan daerah. Secara garis besar komponen pendapatan

daerah dapat dikelompokkan atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan daerah secara khusus dalam konteks penganggaran menjadi sebuah instrumen untuk menilai tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan di daerahnya. Adapun secara umum pendapatan daerah mencerminkan *performance* perekonomian suatu daerah yang bisa menggambarkan kemampuan finansial, tingkat investasi dan *income* perkapita di daerah.

Dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sejalan dengan hal tersebut maka penetapan besaran target pada masing-masing sumber pendapatan dalam APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019 disesuaikan dengan potensi pendapatan yang ada.

Sebagai pedoman dalam pengelolaan pendapatan daerah maka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menetapkan arah kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 meliputi :

- a. Sumber penerimaan pendapatan khususnya Pajak dan Retribusi daerah diupayakan optimal dari segi hasil (*yield*) berdasarkan azas keadilan (*equity*) memperhatikan efisiensi ekonomi, kemampuan melaksanakan (*ability to implement*) dan kecocokan sebagai sumber Penerimaan Daerah (*suitability as local revenue source*). Lebih lanjut pengadministrasian penerimaan pendapatan daerah meliputi upaya Pajak (*tax effort*) yaitu antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak (PBB), hasil guna (*efficiency*) yaitu mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak.
- b. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.
- c. Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat, diikuti dengan meningkatkan pelayanan baik dalam pemungutan maupun pengelolaannya.
- d. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi melalui

- perbaikan manajemen dengan menggunakan sistem informasi penerimaan daerah yang lebih dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh yang mencakup jumlah dan potensi terhadap data obyek pajak dan retribusi.
- e. Meminimalkan kebocoran pemungutan pajak maupun retribusi daerah melalui peningkatan sistem pemungutan, sistem pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian insentif biaya pemungutan.
 - f. Melakukan pendataan serta pemutakhiran data terhadap wajib pajak PBB yang merupakan salah satu komponen pendapat asli daerah yang bersumber dari sektor pajak daerah.
 - g. Mencari obyek bagi sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi yang menguntungkan. Dalam pemungutan obyek baru tersebut diupayakan tidak menghambat kinerja perekonomian yang ada baik di pusat maupun daerah. Untuk itu dalam merencanakan sumber penerimaan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi agar kebijakan tersebut tidak memiliki dampak yang kontraproduktif terhadap perekonomian masyarakat maupun nasional.
 - h. Menumbuh kembangkan iklim yang sehat di BUMD sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah dan mengoptimalkan pengelolaan aset dan kekayaan daerah agar dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah.
 - i. Untuk dana perimbangan dilakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan.
 - j. Dari sisi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten Lombok Tengah akan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
 - k. Mengoptimalkan pengelolaan aset dan kekayaan daerah agar dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah.

Selanjutnya rencana upaya yang dilakukan untuk pencapaian target pendapatan daerah, meliputi :

a. Pendapatan Asli Daerah

Adapun upaya yang dilakukan untuk pencapaian target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, antara lain :

- 1) Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi daerah untuk membayar kewajiban pajak dan retribusinya dengan menerapkan kebijakan sanksi (*punishment*) dan imbalan (*reward*) secara konsisten dan berkelanjutan.
- 2) Melakukan pembenahan dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah terutama penatausahaan dan pengadministrasian serta menerapkan audit juru pungut secara berkala.
- 3) Mengoptimalkan operasionalisasi aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah.
- 4) Merancang sistem berbasis teknologi informasi dalam pemrosesan data dan potensi Pendapatan Asli Daerah.
- 5) Melakukan revisi terhadap Perda pajak dan retribusi daerah yang tidak relevan lagi.

b. Dana Perimbangan

Adapun upaya yang dilakukan untuk pencapaian target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan, antara lain :

- (1) Melakukan langkah-langkah koordinatif dengan kementerian teknis dan Pemerintah Provinsi terkait dengan pembagian atas alokasi dana Bagi Hasil Bukan Pajak seperti; Bagi Hasil Pertambangan Umum (*royalty*), landrent dan bagi hasil perikanan.
- (2) Meningkatkan peran pengendalian, monitoring dan evaluasi atas proses waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar penyaluran dananya dapat tepat waktu.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Adapun upaya yang dilakukan untuk pencapaian target pendapatan

daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, antara lain:

- 1) Menyusun database potensi daerah yang berkaitan dengan kendaraan bermotor dengan domisili di Kabupaten Lombok Tengah untuk menetapkan bagian daerah bagi hasil PKB, BBNKB dan PBBKB.
- 2) Melakukan langkah-langkah koordinatif dengan Kantor Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (KPPRD) untuk melakukan *sweeping* atas kendaraan bermotor yang mengalami tunggakan.
- 3) Melakukan inventarisasi ijin pemakaian air bawah tanah dan permukaan sebagai dasar alokasi bagi hasil pajak pemakaian air bawah tanah dan permukaan.

2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Adapun target pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2,161,842,234,622.38. Dari target pendapatan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mampu mencapai realisasi dari keseluruhan sumber pendapatan daerah sebesar Rp2.119.200.338.667,21 atau 98,03%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tabel berikut ini:

Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	%
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	2.161.842.234.622,38	2.119.200.338.667,21	98,03
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	203.099.854.513,38	204.508.576.776,21	100,69
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	78.480.915.000,00	77.650.264.291,17	98,94
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	22.797.547.000,00	14.560.718.384,95	63,87
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.173.070.056,38	8.901.639.456,38	97,04
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	92.648.322.457,00	103.395.954.643,71	111,60
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.571.801.664.000,00	1.537.058.189.781,00	97,79
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	84.211.432.000,00	72.767.261.200,00	86,41
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.028.786.865.000,00	1.032.033.870.000,00	100,32
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	458.803.367.000,00	432.257.058.581,00	94,21

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	%
1	2	3	4	5
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	386.940.716.109,00	377.633.572.110,00	97,59
4.3.1.	Pendapatan Hibah	96.653.011.000,00	69.573.404.986,00	71,98
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	82.526.493.109,00	100.077.991.424,00	121,27
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	207.459.593.000,00	207.459.593.000,00	100,00
4.3.6.	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga	301.619.000,00	522.582.700,00	173,26
	JUMLAH PENDAPATAN	2.161.842.234.622,38	2.119.200.338.667,21	98,03
5	BELANJA DAERAH	2.279.133.654.703,50	2.171.915.901.434,96	95,30
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.217.319.704.372,14	1.190.932.327.574,65	97,83
5.1.1.	Belanja Pegawai	846.993.089.350,14	825.067.591.213,00	97,41
5.1.2.	Belanja Bunga	2.186.051.822,00	1.415.319.751,00	64,74
5.1.4.	Belanja Hibah	42.787.300.000,00	42.387.258.000,00	99,07
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	6.561.191.000,00	6.446.921.364,00	98,26
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	10.127.847.000,00	6.953.411.442,65	68,66
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintahan Desa dan Partai Politik	307.664.225.200,00	307.661.858.054,00	100,00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	999.967.750,00	100,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.061.813.950.331,36	980.983.573.860,31	92,39
5.2.1.	Belanja Pegawai	56.490.680.500,00	49.546.277.921,00	87,71
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	584.143.464.323,30	526.034.760.169,69	90,05
5.2.3.	Belanja Modal	421.179.805.508,06	405.402.535.769,62	96,25
	JUMLAH BELANJA	2.279.133.654.703,50	2.171.915.901.434,96	95,30
	SURPLUS/(DEFISIT)	(117.291.420.081,12)	(52.715.562.767,75)	44,94
6,1	PEMBIAYAAN DAERAH	127.127.668.821,12	117.423.783.121,12	92,37
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	127.127.668.821,12	117.423.783.121,12	92,37
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	58.358.151.321,12	58.358.151.321,12	100,00
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	68.769.517.500,00	58.990.531.800,00	85,78
6.1.7.	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah	0,00	75.100.000,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	127.127.668.821,12	117.423.783.121,12	92,37
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.836.248.740,00	9.836.248.740,00	100,00
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.836.248.740,00	9.836.248.740,00	100,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.836.248.740,00	9.836.248.740,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	117.291.420.081,12	107.587.534.381,12	91,73
6,3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) Sebelum Koreksi	0,00	54.871.971.613,37	0,00

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	%
1	2	3	4	5
	Koreksi SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	12.243.378,47	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	54.884.214.991,84	0,00

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah hampir mencapai target sebagaimana amanat APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019.

Uraian secara detail mengenai realisasi masing-masing sumber pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2019 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Hasil Pajak Daerah

Adapun target pajak daerah pada pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp78,480,915,000.00 dan realisasi yang mampu dicapai sebesar Rp77,650,264,291.17 atau 98.94%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi pajak daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Realisasi Hasil Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2019**

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.1.01.	Pajak Hotel	8,805,819,100.00	9,600,602,686.00	109.03
4.1.1.02.	Pajak Restoran	10,122,462,101.00	10,571,961,635.00	104.44
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	163,584,000.00	255,353,264.00	156.10
4.1.1.04.	Pajak Reklame	565,979,000.00	1,043,450,525.00	184.36
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	18,085,767,000.00	19,490,273,926.00	107.77
4.1.1.07.	Pajak Parkir	2,126,028,000.00	1,776,060,441.00	83.54
4.1.1.08.	Pajak Air Tanah	207,348,000.00	110,719,900.00	53.40
4.1.1.09.	Pajak Sarang Burung Walet	13,250,000.00	16,250,000.00	122.64
4.1.1.11.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,202,199,000.00	1,725,842,190.00	143.56
4.1.1.12.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	22,110,078,799.00	17,014,321,848.17	76.95
4.1.1.13.	Pajak PBHTB	15,078,400,000.00	16,045,427,876.00	106.41
	JUMLAH	78,480,915,000.00	77,650,264,291.17	98.94

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

2) Hasil Retribusi Daerah

Adapun target retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp22,797,547,000.00 dan realisasi yang dicapai sebesar Rp.14.560.718.384,95 atau 63,87%. Lebih rinci target dan realisasi retribusi daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Realisasi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	12.966.187.000,00	9.848.057.324,95	75,95
4.1.2.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	61.932.480,00	118.209.000,00	190,87
4.1.2.05	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	582.360.000,00	102.942.000,00	17,68
4.1.2.06	Retribusi Pelayanan Pasar	2.617.010.950,00	450.164.000,00	17,20
4.1.2.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	361.100.000,00	444.011.000,00	122,96
4.1.2.12	Retribusi Tera/Tera Ulang	8.654.000,00	8.450.000,00	97,64
4.1.2.14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	988.636.370,00	132.835.694,00	13,44
4.1.2.15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	674.954.800,00	464.646.500,00	68,84
4.1.2.16	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	853.830.000,00	496.657.000,00	58,17
4.1.2.19	Retribusi Tempat Khusus Parkir	28.800.000,00	0,00	0,00
4.1.2.21	Retribusi Rumah Potong Hewan	77.784.000,00	23.310.000,00	29,97
4.1.2.23	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	80.400.000,00	90.310.000,00	112,33
4.1.2.25	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	606.247.400,00	385.001.500,00	63,51
4.1.2.26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.370.675.000,00	1.578.715.666,00	66,59
4.1.2.27	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	48.250.000,00	108.250.000,00	224,35
4.1.2.29	Retribusi Izin Trayek	2.725.000,00	3.450.000,00	126,61
4.1.2.32	Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)	468.000.000,00	305.708.700,00	65,32
	JUMLAH	22.797.547.000,00	14.560.718.384,95	63,87

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Adapun target Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp9,173,070,056.38 dan terealisasi sebesar Rp8,901,639,456.38 atau 97.04%.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yaitu yang berasal dari deviden PT. Bank NTB Cabang Praya, PD. BPR NTB Cabang Lombok Tengah dan PT. Jamkrida NTB.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2019 mempunyai target sumber pendapatan lainnya pada kelompok Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Tengah yaitu sebesar Rp92,648,322,457.00. Adapun capaian realisasinya sebesar Rp103.395.954.643,71 atau 111,60%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2019

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	350.000.000,00	330.000.000,00	94,29
4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro	3.000.000.000,00	2.996.944.396,65	99,87
4.1.4.03.	Pendapatan Bunga deposito	10.000.000.000,00	9.736.496.782,58	97,36
4.1.4.04.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	1.416.259.192,23	0
4.1.4.06.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	562.863.006,06	0,00
4.1.4.07.	Pendapatan Denda Pajak	0,00	351.457.563,00	0,00
4.1.4.08.	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	1.400.000,00	0,00
4.1.4.10.	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	535.794.098,46	0,00
4.1.4.16.	Pendapatan dari BLUD	53.373.588.457,00	56.629.510.943,71	106,1
4.1.4.18.	Penerimaan Lain-lain	0,00	73.415.393,02	0,00
4.1.4.22.	Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN pada FKTP	25.924.734.000,00	30.761.813.268,00	118,66
	JUMLAH	92.648.322.457,00	103.395.954.643,71	111,6

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terealisasi sebesar 97.79% atau sebesar Rp1,537,058,189,781.00 dari target anggaran sebesar Rp1,571,801,664,000.00.

1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Adapun target pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp84,211,432,000.00. Dari target tersebut realisasi yang dicapai yakni sebesar Rp72,767,261,200.00 atau 86.41% dari target yang ditetapkan dalam APBD. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasinya Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Tahun Anggaran 2019**

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	64,552,195,000.00	59,116,113,400.00	91.58
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	6,598,106,000.00	5,049,527,600.00	76.53
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri	115,332,000.00	69,199,200.00	60.00
4.2.1.01.04	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	48,235,331,000.00	48,235,331,000.00	100.00
4.2.1.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21	9,603,426,000.00	5,762,055,600.00	60.00
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	19,659,237,000.00	13,651,147,800.00	69.44
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	17,084,000.00	0.00	0.00
4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	18,658,560,000.00	13,060,992,000.00	70.00
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	983,593,000.00	590,155,800.00	60.00
	JUMLAH	84,211,432,000.00	72,767,261,200.00	86.41

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1,028,786,865,000.00 terealisasi sebesar Rp1,032,033,870,000.00 atau 100.32 %.

Menindaklanjuti PMK no 166/PMK.07/2019 tentang DAU tambahan bantuan pembayaran selisih perubahan iuran jaminan kesehatan penduduk yang di daftarkan oleh Pemerintah Daerah,

DAU tambahan senilai Rp3.247.005.000,00 tersebut di catat dan di laporkan sebagai Realisasi pendapatan DAU.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp458,803,367,000.00 dengan realisasi sebesar Rp432,257,058,581.00 atau 94.21%.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan hibah ditargetkan sebesar Rp96,653,011,000.00. Dari target tersebut terealisasi sebesar Rp70.095.987.686,00 atau 72,30%. Pendapatan hibah dari Pemerintah merupakan Program Rehabilitasi dan Peningkatan Infrastruktur Irigasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk peningkatan produktivitas pertanian beririgasi di Kabupaten Lombok Tengah dan hibah Program Pengolahan air limbah setempat selain itu hibah Biaya Operasional Sekolah (BOS) SD dan (BOS) SMP.

2) Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi

Pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp82,526,493,109.00. Dari target tersebut terealisasi sebesar Rp.100,077,991,424.00 atau 121.27%. Terdapat kurang salur pendapatan tahun 2018 sebesar 20% yang tidak di targetkan. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi sebagaimana tabel berikut ini:

**Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi
Tahun Anggaran 2019**

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5

4.3.3.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	15,076,068,750.00	19,604,429,443.00	130.04
4.3.3.01.03.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	14,799,825,300.00	18,833,160,155.00	127.25
4.3.3.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20,201,548,309.00	23,505,479,463.00	116.35
4.3.3.01.07.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	61,800,750.00	53,979,197.00	87.34
4.3.3.01.08.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	32,387,250,000.00	38,080,943,166.00	117.58
	JUMLAH	82,526,493,109.00	100,077,991,424.00	121.27

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada Tahun Anggaran 2019 merupakan pendapatan yang bersumber dari Dana Penyesuaian berupa Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Adapun Target pendapatan yang bersumber dari dana penyesuaian tersebut adalah sebesar Rp207,459,593,000.00, dari target tersebut terealisasi sebesar Rp207,459,593,000.00 atau 100.00 %, sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini :

Realisasi Penerimaan Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2019

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.3.4.01.03.	Dana Insentif Daerah	14,284,203,000.00	14,284,203,000.00	100
4.3.4.01.06.	Dana Desa	193,175,390,000.00	193,175,390,000.00	100
	JUMLAH	207,459,593,000.00	207,459,593,000.00	100

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

4) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi

Untuk tahun anggaran 2019 tidak ada Pendapatan daerah yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.

3. Permasalahan dan Solusi

Pendapatan daerah yang ditargetkan dalam APBD Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2019 realisasinya mencapai 98,03%. Tidak tercapainya target ini disebabkan masih ada beberapa sumber pendapatan daerah yang tidak mampu mencapai target, jenis pendapatan daerah yang

tidak mencapai target adalah Pendapatan Retribusi Daerah. Untuk jenis Pendapatan Retribusi Daerah terjadi pada objek pendapatan retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha, hampir terjadi pada seluruh rincian objek pendapatannya, Terutama yang bersumber dari Pendapatan Retribusi pengendalian menara telekomunikasimencapai 13.44% ,Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum mencapai 17.68% , Retribusi Pelayanan Pasar mencapai 17.20%,Retribusi Rumah Potong Hewan mencapai 29.97%, retribusi tempat rekreasi dan olah raga mencapai 112.33% ,dan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang tidak terealisasi di tahun 2019, dari target yang telah ditetapkan serta beberapa pendapatan lainnya yang capaiannya dibawah 50%.Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2019, antara lain:

- a. Pengelolaan administrasi Pendapatan Asli Daerah terutama terkait pengelolaan retribusi daerah pada SKPD relatif masih belum terlaksana dengan tertib.
- b. Masih rendahnya kinerja pengelola retribusi daerah sehingga berdampak pada rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang telah ditargetkan di beberapa SKPD. Rendahnya kinerja ini disebabkan oleh masih kurangnya kuantitas dan kualitas pengawasan
- c. Belum diterapkannya penegakan hukum (*law inforcement*) terhadap wajib pajak atau wajib retribusi yang tidak patuh membayar pajak/retribusi daerah. Akibatnya wajib pajak/retribusi tersebut tetap lalai untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak/retribusi.
- d. Penetapan peraturan yang mengatur besarnya pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah baik dari dana perimbangan maupun bagi hasil pajak propinsi sering terlambat diperoleh, sehingga penetapan target pada APBD belum semuanya mencerminkan besaran sesuai dengan peraturan yang menetapkannya.

Berdasarkan permasalahan diatas maka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah perlu menempuh berbagai upaya untuk memecahkan masalah yang ada sehingga permasalahan yang ada dapat teratasi. Beberapa kebijakan yang perlu diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah:

- a. Melakukan konsultasi dan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi agar pendapatan

daerah khususnya yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dapat terealisasi secara tepat waktu dan dengan nominal sesuai target yang sudah ditetapkan bahkan melampaui target.

- b. Melakukan pengawasan dan monitoring secara berkala atau rutin terhadap pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang bersifat internal maupun pengawasan yang bersifat eksternal. Melalui upaya ini diharapkan tidak terjadi penyimpangan atau kebocoran dalam pengelolaan PAD dan para petugas atau aparat pengelola PAD akan lebih termotivasi dalam bekerja.
- c. Melakukan penyuluhan dan himbauan kepada wajib pajak/wajib retribusi melalui pertemuan/rapat, spanduk, media cetak maupun melalui papan reklame untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak/wajib retribusi daerah sehingga mereka akan lebih patuh atau taat dalam membayar kewajibannya.
- d. Memberikan penghargaan kepada perusahaan/lembaga atau perseorangan yang memiliki kesadaran tinggi dalam membayar pajak dan juga memberikan penghargaan kepada institusi atau petugas yang berprestasi dalam memungut pajak/retribusi daerah. Melalui upaya ini diharapkan para wajib pajak akan termotivasi dalam membayar kewajibannya begitu pula kepada petugas pemungut pajak/retribusi diharapkan dapat meningkatkan motivasinya dalam bekerja.
- e. Meningkatkan sarana mobilitas sehingga operasional penagihan pajak/retribusi daerah dapat berjalan lancar. Dengan adanya dukungan sarana mobilitas yang memadai diharapkan pemungutan pajak/retribusi daerah dapat terlaksana secara intensif.
- f. Melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap obyek dan subyek pajak yang baru sehingga jumlah obyek dan subyek pajak akan meningkat.
- g. Melakukan penilaian atau uji petik terhadap obyek pajak sehingga diperoleh target yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Melalui kegiatan ini diharapkan target obyek pajak akan bisa meningkat.
- h. Melakukan revisi terhadap beberapa peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga diharapkan target penerimaan Daerah dapat meningkat.

- i. Membangun dan merehabilitasi infrastruktur seperti pasar, rumah sakit dan lainnya sehingga akan menambah dan meningkatkan sumber dan target Pendapatan Asli Daerah dari jenis Retribusi Daerah.

Permasalahan pokok yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan keuangan daerah adalah bahwa kondisi riil beban Belanja Daerah masih didominasi oleh besarnya alokasi Belanja Pegawai (Belanja Aparatur), sehingga alokasi belanja untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara efisien dan efektifitas mulai dari Perencanaan (Planning), Pelaksanaan (Actuating), Pengorganisasian (Organizing) hingga pengawasan (Controlling) sesuai dengan penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pada masing-masing dinas satuan kerja. Pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan. Tanpa pelimpahan ini, otonomi daerah menjadi tidak bermakna. Salah satu indikator penting dari kewenangan keuangan adalah Pendapatan Asli Daerah.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah pada Tahun 2019 diarahkan untuk mendukung pencapaian target tahun kedua RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 dan mendukung pencapaian target-target yang belum tercapai pada RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2016.

Pembangunan tahun 2019 di fokuskan pada pencapaian target tahun kedua RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021. Adapun Proritas Pembangunan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal
2. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan sosial
3. Penguatan struktur ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam

4. Peningkatan kualitas infrastruktur Kabupaten dan Penataan Wilayah Perkotaan Praya
5. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik.

Untuk mendukung Pencapaian fokus pembangunan di atas, arah dan kebijakan pengelolaan belanjadaerah Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun 2019 adalah :

1. Pengalokasian belanja daerah pada belanja yang bersifat wajib dan mengikat.
2. Mengalokasikan belanja daerah dalam rangka mendukung prioritas nasional dan prioritas provinsi NTB dalam kerangka Otonomi Daerah Negara kesatuan Republik Indonesia
3. Peningkatan proporsibelanjayangberpihakpadakepentinganpublik, disampingtetapmenjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai prioritas, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah
4. Menitikberatkan alokasi Belanja Daerah pada urusan pemerintahan konkuren yang merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah.
5. Mengalokasikan belanja pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014.

1. Kebijakan Belanja Daerah

Adapun kebijakan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2018, meliputi :

a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan kelompok belanja yang penganggarannya tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja ini terbagi kedalam beberapa jenis belanja, antara lain : belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

Penyediaan belanja pegawai untuk Tahun Anggaran 2019 diarahkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNSD, pembayaran gaji Kepala Daerah, Penghasilan DPRD, dengan tetap menyediakan akses sebesar 2,5 persen dalam rangka mengantisipasi adanya kenaikan pangkat, gaji berkala, tunjangan keluarga dan antisipasi mutasi pegawai.

Terhadap belanja subsidi di Tahun Anggaran 2019 tidak menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah daerah sehingga tidak disediakan anggarannya.

Kebijakan belanja Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. Penetapan besaran hibah dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Kebijakan Belanja Bantuan Sosial dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Mekanisme penganggaran bantuan sosial ditempuh melalui proses evaluasi oleh SKPD untuk selanjutnya mendapat rekomendasi Kepala Daerah melalui TAPD.

Kebijakan penganggaran belanja Bagi Hasil diarahkan untuk penganggaran bagi hasil pajak dan retribusi yang dicapai daerah pada tahun anggaran berkenaan untuk desa maupun kelurahan se-Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan penganggaran Bantuan Keuangan pada APBD Tahun Anggaran 2018 diarahkan untuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dengan yang diprioritaskan untuk penyediaan serta peningkatan besaran Alokasi Dana Desa (ADD), penyediaan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) dan Tunjangan Kepala Dusunserta

pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus yaitu bantuan untuk penyelenggaraan Pilkades, bantuan keuangan untuk tenaga ketentraman dan keterbiban umum yang ditempatkan di desa/kelurahan. Terdapat pula bantuan keuangan bersifat khusus untuk peningkatan kesejahteraan pengurus rumah ibadah melalui penyediaan honorarium untuk Marbot Masjid atau peribadatan lainnya dan dukungan operasional. Sedangkan untuk bantuan keuangan kepada 12 Partai Politik dianggarkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan penganggaran belanja tidak terduga pada APBD Tahun Anggaran 2019 dianggarkan untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluarkendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat.

b. Kebijakan Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan kelompok belanja yang penganggarnya terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan didasarkan pada tugas pokok dan fungsi dari SKPD berdasarkan landasan hukum pembentukannya yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, harus dapat mencerminkan adanya tingkat besaran fungsi-fungsi yang dilaksanakan (*money follow function*).

Kebijakan penganggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2019 diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pada 44 OPD berdasarkan pembagian urusan dan unit organisasi. Alokasi berdasarkan urusan dan unit organisasi tersebut terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar oleh 9 OPD, urusan wajib bukan pelayanan dasar dilaksanakan oleh 12 OPD, urusan pilihan pada 4 OPD dan Urusan Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan dilaksanakan oleh 19 OPD.

Selanjutnya kebijakan penganggaran Belanja Langsung pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 terdapat penambahan plafon. Beberapa hal yang mendasari penambahan plafon ini, antara lain

antara lain bersumber dari SiLPA 2018 yang perlu dialokasikan yaitu, pengalokasian SiLPA DAK Fisik dan Non Fisik Tahun Anggaran 2018, SiLPA BLUD RSUD Praya Tahun Anggaran 2018, kapitasi, retensi, penyelesaian kegiatan yang belum rampung pada Tahun Anggaran 2018, pengalokasian belanja tambahan target pendapatan baru (Dana BOS dan Pendapatan UPTD Unit Transfusi Daerah. Adanya tambahan target Pendapatan Asli Daerah 2019 dan tambahan target pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang bersumber dari alokasi kurang bayar beberapa objek pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dari pemerintah pusat serta tambahan target Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsidiarahkan untuk penambahan anggaran Pembangunan Gedung Kantor Bupati, penambahan anggaran untuk pembebasan lahan Pasar Jelojok, penambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan Biao, penambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, penyediaan sarana dan prasarana Gedung DPRD, penyediaan lahan untuk fasilitas kesehatan maupun pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit, obat-obatan di Rumah Sakit peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dan pemenuhan kebutuhan belanja insentif Guru Tidak Tetap (GTT) sertadiarahkan untuk menunjang Program/Kegiatan berdasarkan skala Prioritas dan tersebar di beberapa SKPD.

2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Adapun penganggaran Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2,279,133,654,703.50 dengan realiasi sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp2.171.915.901.434,96 atau sebesar 95,30%.

Selanjutnya anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2019 secara lebih rinci sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

KODE	URAIAN	ANGGARANSETELAH PERUBAHAN(Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH			
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.217.319.704.372,14	1.190.932.327.574,65	97,83
5.1.1.	Belanja Pegawai	846.993.089.350,14	825.067.591.213,00	97,41
5.1.3.	Belanja Bunga	2.186.051.822,00	1.415.319.751,00	64,74
5.1.4.	Belanja Hibah	42.787.300.000,00	42.387.258.000,00	99,07
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	6.561.191.000,00	6.446.921.364,00	98,26
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	10.127.847.000,00	6.953.411.442,65	68,66
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik	307.664.225.200,00	307.661.858.054,00	100,00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	999.967.750,00	100,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.061.813.950.331,36	980.983.573.860,31	92,39
5.2.1.	Belanja Pegawai	56.490.680.500,00	49.546.277.921,00	87,71
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	584.143.464.323,30	526.034.760.169,69	90,05
5.2.3.	Belanja Modal	421.179.805.508,06	405.402.535.769,62	96,25
	JUMLAH BELANJA	2.279.133.654.703,50	2.171.915.901.434,96	95,30

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi belanja daerah hampir mencapai target sebagaimana amanat APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019.

Uraian secara detail mengenai realisasi masing-masing belanja daerah pada Tahun Anggaran 2019 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp846,993,089,350.14 dan direalisasikan sebesar Rp825,067,591,213.00 atau 97.41%.Selanjutnya secara lebih rinci anggaran dan realisasi belanja pegawai daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2019**

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	780,100,166,250.14	766,995,050,824.00	98.32
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	55,000,400,000.00	46,975,055,100.00	85.41
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	6,828,600,000.00	7,057,500,000.00	103.35
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3,924,045,750.00	3,424,746,908.00	87.28
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,139,877,350.00	615,238,381.00	53.97
	JUMLAH	846,993,089,350.14	825,067,591,213.00	97.41

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

2) Belanja Bunga

Belanja Bunga yang dianggarkan pada Tahun 2019 sebesar Rp2,186,051,822.00 dan terealisasi sebesar Rp1,415,319,751.00 atau 64.74% merupakan pembayaran Bunga atas pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur untuk pembangunan Pasar Jelojok Kopang.

3) Belanja Hibah

Belanja hibah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2019 merupakan hibah yang diberikan kepada Badan/lembaga/Organisasi Kemasyarakatan adalah sebesar Rp42,387,300,000.00 dan direalisasikan sebesar Rp41.987.258.000,00 atau 99,06%. Selain itu terdapat hibah kepada Instansi Vertikal yakni KPUD dan Bawaslu dengan anggaran sebesar Rp400,000,000.00 dan direalisasikan sebesar Rp400,000,000.00 atau 100,00%.

4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Sosial pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp6,561,191,000.00 dibelanjakan dalam bentuk pemberian bantuan sosial berupa pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat Non Quota yang realisasi mencapai Rp934,421,364.00 atau 89.10%, Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya yang realisasi mencapai Rp 5,512,500,000.00 atau 100%,

5) Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa

Rencana anggaran belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa Tahun 2019 adalah sebesar Rp10,127,847,000.00 dan terealisasi sebesar Rp6,953,411,442.65 atau 68.66%. Lebih rinci rencana anggaran dan realisasi bagi hasil kepada Pemerintah Desa sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
5.1.6.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	7,848,092,000.00	5,865,348,554.12	74.74
5.1.6.05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah	2,279,755,000.00	1,088,062,888.53	47.73
	JUMLAH	10,127,847,000.00	6,953,411,442.65	68.66

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

6) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik

Rencana anggaran bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik adalah sebesar Rp307,664,225,200.00 dan terealisasi sebesar Rp307,661,858,054.00 atau 100,00%. Lebih rinci rencana anggaran dan realisasi belanja Bantuan ke Desa dan Partai Politik sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dan Partai Politik Tahun Anggaran 2019

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
5.1.7.03.	Belanja Bantuan Keuangan ke Desa	306,864,225,200.00	306,862,359,122.00	100,00
5.1.7.05.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	800,000,000.00	799,498,932.00	99.94
	JUMLAH	307,664,225,200.00	307,661,858,054.00	100.00

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

7) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp1,000,000,000.00 dan direalisasikan sebesar clxix

Rp999.967.750,00 atau 100,00%. Belanja Tidak Terduga ini digunakan untuk Pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan atas kelebihan penyeteroran sisa kas oleh Dinas Sosial senilai Rp5.107.500,00, bencana alam banjir dan longsor dusun Tendak-Endak Desa Aik berik Kecamatan Batukliang Utara senilai Rp 692.483.000,00 dan bencana alam kekeringan di 84 Desa/Kelurahan pada 9 Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah senilai Rp302.377.250,00.

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Langsung pada pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp56.490.680.500,00 dan direalisasikan sebesar Rp49.546.277.921,00 atau 87,71%. Selanjutnya secara lebih rinci belanja pegawai langsung sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Realisasi Belanja Pegawai Langsung
Tahun Anggaran 2019**

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
5.2.1.01.	Honorarium PNS	29.686.450.500,00	28.307.454.700,00	95,35
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.770.780.000,00	5.653.405.000,00	97,97
5.2.1.04.	Honorarium Pengelola Dana BOS	13.582.320.000,00	8.428.479.141,00	62,05
5.2.1.05.	Belanja Pegawai BLUD	4.587.500.000,00	4.361.526.580,00	95,07
5.2.1.06.	Uang Picket	2.863.630.000,00	2.795.412.500,00	97,62
	JUMLAH	56.490.680.500,00	49.546.277.921,00	87,71

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp584.143.464.323,30 dan realisasi sebesar Rp526.034.760.169,69 atau 90,05%. Selanjutnya secara lebih rinci belanja barang dan jasa sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019

KODE 1	URAIAN 2	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp) 3	REALISASI (Rp) 4	% 5
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.224.878.682,00	25.930.103.567,00	95,24
5.2.2.02.	Belanja Bahan Material	23.239.285.401,00	22.622.231.761,00	97,34
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	98.151.567.076,00	90.594.000.022,00	92,30
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	17.687.932.520,00	16.231.442.548,00	91,77
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.704.680.900,00	3.988.839.110,00	84,78
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.654.744.510,00	7.402.696.947,00	96,71
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang	2.325.321.000,00	1.944.245.000,00	83,61
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	749.327.500,00	700.587.500,00	93,50
5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	280.000.000,00	279.150.000,00	99,70
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	1.733.360.000,00	1.563.805.000,00	90,22
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.565.616.850,00	31.261.643.583,00	93,14
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	608.450.000,00	607.560.000,00	99,85
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	396.373.000,00	392.143.000,00	98,93
5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	663.450.000,00	658.075.000,00	99,19
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.078.218.228,25	38.205.657.873,00	95,33
5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	165.000.000,00	165.000.000,00	100,00
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan dan Sosialisasi	3.602.365.000,00	3.491.749.700,00	96,93
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	752.923.000,00	729.717.400,00	96,92
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.501.000.000,00	1.485.426.000,00	98,96
5.2.2.22.	Belanja Barang Dana BOS	70.326.480.000,00	39.056.124.448,00	55,54
5.2.2.23.	Belanja Barang untuk diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga	190.958.582.132,75	186.235.244.729,28	97,53
5.2.2.26.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	49.551.751.662,30	44.349.680.481,41	89,50
5.2.2.28.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	8.108.700.000,00	8.037.400.000,00	99,12
5.2.2.29.	Belanja Perawatan Alat-alat kesehatan	113.456.861,00	102.236.500,00	90,11
	JUMLAH	584.143.464.323,30	526.034.760.169,69	90,05

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

3) Belanja Modal

Belanja Modal pada pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp421,179,805,508.06 dan realisasi sebesar Rp405,402,535,769.62 atau 96.25%.Selanjutnya anggaran danrealisasi belanja modalberdasarkan objek belanja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2019**

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
5.2.1.01.	Belanja Modal Tanah	16.033.733.040,00	16.021.847.040,00	99,93
5.2.1.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.938.412.854,00	51.645.271.331,00	89,14
5.2.1.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	254.170.378.856,21	235.856.415.521,62	92,79
5.2.1.05.	Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan	76.967.343.289,00	71.094.035.480,00	92,37
5.2.1.06.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.548.650.000,00	1.536.644.513,00	99,22
5.2.3.90	Belanja Modal Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	6.640.000.000,00	19.877.676.411,00	299,36
5.2.3.91	Belanja Modal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	7.881.287.468,85	9.370.645.473,00	118,90
	JUMLAH	421.179.805.508,06	405.402.535.769,62	96,25

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

C. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penganggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2019bersumber dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA),

Pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah merencanakan pinjaman kembali kepada PT. SMI senilai Rp79.959.000.000,00. Pinjaman ini rencananya akan digunakan untuk Pembangunan Pasar Jelajok. Sampai dengan 31 Desember 2019 Pemerintah

Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah menerima pinjaman dari PT SMI senilai Rp70.180.014.300,00 dari total pinjaman senilai Rp79.959.000.000,00

Selanjutnya pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, besaran penganggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA disesuaikan berdasarkan hasil audit BPK RI terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp58.358.151.321,12.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah melakukan penyertaan modal senilai Rp9.836.248.740,00 yaitu penyertaan modal PT Bank NTB senilai Rp7.150.162.778,00 dan PD BPR NTB senilai Rp2.686.085.962,00.

3. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran untuk Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah. Adapun Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp117.423.783.121,12 atau 92,37% dari anggaran sebesar Rp127.127.668.821,12.

Realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp107.587.534.381,12 atau 91,73% dari anggaran Pembiayaan Netto sebesar Rp117.291.420.081,12.

Adapun target dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 secara lebih rinci sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	127.127.668.821,12	117.423.783.121,12	92,37
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	58.358.151.321,12	58.358.151.321,12	100,00

06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	68.769.517.500,00	58.990.531.800,00	85,78
06.01.05	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	0,00	75.100.000,00	0,00
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	9.836.248.740,00	9.836.248.740,00	100,00
06.02.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.836.248.740,00	9.836.248.740,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	117.291.420.081,12	107.587.534.381,12	91,73

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Realisasi penerimaan pembiayaan berupa penerimaan pinjaman daerah telah mencapai senilai Rp79.959.000.000,00 atau 87,77% yang digunakan untuk Pembangunan d Pasar Jelojoksedangkan penerimaan kembali investasi non permanen bersumber dari penerimaan kembali dana bergulir penguatan permodalan koperasi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2019 telah melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan. Program yang diimplementasikan melalui kegiatan yang diprioritaskan sesuai visi misi yang telah diamanatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja serta keuangan yang menyertainya, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019, dengan tujuan menyampaikan tingkat kualitas dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Sebagaimana telah dijabarkan dalam perjanjian kinerja Bupati Lombok Tengah Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki 5 (Lima) tujuan, 13 (Tiga Belas) sasaran, 8 (Delapan) indikator tujuan dan 24 (Dua Puluh Empat) indikator sasaran. Adapun capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara kumulatif Tahun 2019 adalah sebesar 95,08% (**BAIK**). Apabila dilihat dari persentase capaian kinerja kumulatif ini, maka kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat dikategorikan tercapai dengan baik dan berkualitas.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan LKj-IP Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 adalah:

1. Penyelenggaraan urusan statistik, terutama statistik sektoral sesuai urusan/ Tupoksi yang dimiliki OPD di Kabupaten Lombok Tengah sangat kurang. Ketergantungan terhadap data-data BPS sangat tinggi. Padahal, data yang dipublikasikan oleh BPS adalah data kondisi N-1 (satu tahun sebelumnya) serta masih bersifat “sementara” dan “sangat sementara”. Penggunaan data BPS sebagai dasar dalam perencanaan dan evaluasi (pelaporan) pemerintah daerah menimbulkan potensi terjadinya bias yang harus menjadi perhatian bersama;
2. Mekanisme pengumpulan dan pengolahan data kinerja belum dilaksanakan dengan optimal. Contoh belum semua OPD memiliki profil atau statistik sektoral sesuai dengan Tupoksi yang dimiliki;
3. Kurangnya pemahaman aparatur tentang SAKIP, kurangnya sosialisasi tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Permen PAN dan RB No 53 Tahun 2014;
4. Kurangnya kedisiplinan OPD dalam menyusun dan menyampaikan laporan sesuai dengan pedoman yang telah diberikan secara tepat waktu.

B. Saran-Saran.

Berdasarkan kesimpulan diatas perlu dilakukan langkah-langkah pemecahan masalah yang dihadapi dan peningkatan kualitas penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Oleh sebab itu, dirumuskan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan minimal, dan standar operasional prosedur pada setiap SKPD dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pelaksanaan tugas;
2. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah perlu membangun sistem informasi dalam penyelenggaraan perencanaan, keuangan, kepegawaian, monitoring dan evaluasi, palaporan dan SAKIP ;
3. Perlu dilaksanakan reviu secara kontinyu terhadap dokumen-dokumen

perencanaan lingkup kabupaten dan SKPD;

4. Tiap-tiap OPD perlu menyusun profil OPD yang terutama memuat data-data statistik sektoral yang berkaitan dengan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki;
5. Perlu dilakukan upaya nyata untuk peningkatan pemahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja seperti memberikan pelatihan dan bimbingan SAKIP secara komprehensif;
6. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi rutin tentang penyelenggaraan SAKIP dan pengumpulan data kinerja SKPD.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2019 telah melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan. Program yang diimplementasikan melalui kegiatan yang diprioritaskan sesuai visi misi yang telah diamanatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja serta keuangan yang menyertainya, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019, dengan tujuan menyampaikan tingkat kualitas dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Sebagaimana telah dijabarkan dalam perjanjian kinerja Bupati Lombok Tengah Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki 5 (Lima) tujuan, 13 (Tiga Belas) sasaran, 8 (Delapan) indikator tujuan dan 24 (Dua Puluh Empat) indikator sasaran. Adapun capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara kumulatif Tahun 2019 adalah sebesar 95,08% (**BAIK**). Apabila dilihat dari persentase capaian kinerja kumulatif ini, maka kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat dikategorikan tercapai dengan baik dan berkualitas.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan LKj-IP Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 adalah:

5. Penyelenggaraan urusan statistik, terutama statistik sektoral sesuai

urusan/ Tupoksi yang dimiliki OPD di Kabupaten Lombok Tengah sangat kurang. Ketergantungan terhadap data-data BPS sangat tinggi. Padahal, data yang dipublikasikan oleh BPS adalah data kondisi N-1 (satu tahun sebelumnya) serta masih bersifat “sementara” dan “sangat sementara”. Penggunaan data BPS sebagai dasar dalam perencanaan dan evaluasi (pelaporan) pemerintah daerah menimbulkan potensi terjadinya bias yang harus menjadi perhatian bersama;

6. Mekanisme pengumpulan dan pengolahan data kinerja belum dilaksanakan dengan optimal. Contoh belum semua OPD memiliki profil atau statistik sektoral sesuai dengan Tupoksi yang dimiliki;
7. Kurangnya pemahaman aparatur tentang SAKIP, kurangnya sosialisasi tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Permen PAN dan RB No 53 Tahun 2014;
8. Kurangnya kedisiplinan OPD dalam menyusun dan menyampaikan laporan sesuai dengan pedoman yang telah diberikan secara tepat waktu.

B. Saran-Saran.

Berdasarkan kesimpulan di atas perlu dilakukan langkah-langkah pemecahan masalah yang dihadapi dan peningkatan kualitas penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Oleh sebab itu, dirumuskan beberapa saran-saran sebagai berikut:

7. Perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan minimal, dan standar operasional prosedur pada setiap SKPD dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pelaksanaan tugas;
8. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah perlu membangun sistem informasi dalam penyelenggaraan perencanaan, keuangan, kepegawaian, monitoring dan evaluasi, palaporan dan SAKIP ;
9. Perlu dilaksanakan reviu secara kontinyu terhadap dokumen-dokumen perencanaan lingkup kabupaten dan SKPD;
10. Tiap-tiap OPD perlu menyusun profil OPD yang terutama memuat data-data statistik sektoral yang berkaitan dengan kinerja pelaksanaan tugas

dan fungsi yang dimiliki;

11. Perlu dilakukan upaya nyata untuk peningkatan pemahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja seperti memberikan pelatihan dan bimbingan SAKIP secara komprehensif;
12. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi rutin tentang penyelenggaraan SAKIP dan pengumpulan data kinerja SKPD.